



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI KERJA SAMA INDO-PASIFIK  
UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA:  
PERSPEKTIF INDONESIA**

**INDRI YANUARTI  
NIM: 120180101006**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

**BOGOR  
2019**



**UNIVERSITAS PERTAHANAN**

**STRATEGI KERJA SAMA INDO-PASIFIK  
UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA:  
PERSPEKTIF INDONESIA**

**INDRI YANUARTI  
NIM: 120180101006**

**Tesis yang Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam  
Mendapatkan Gelar Magister Pertahanan**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN  
PROGRAM STUDI STRATEGI PERANG SEMESTA**

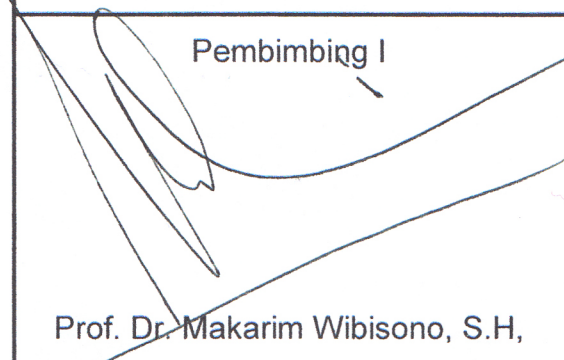
**BOGOR  
2019**


## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Indri Yanuarti  
NIM : 120180101006  
Program Studi : Strategi Perang Semesta  
Fakultas : Strategi Pertahanan  
Judul Tesis : Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung  
Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Makarim Wibisono, S.H,  
M.A

  
Letjen TNI (Purn). Dr. I Wayan  
Midhio, M.Phil

Tanggal: September 2019

Tanggal: September 2019

Mengetahui,

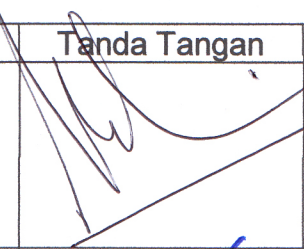
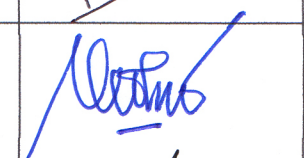
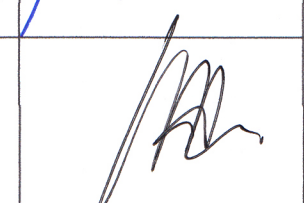
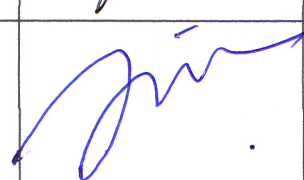
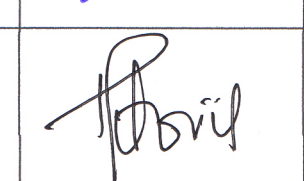
Dekan

Fakultas Strategi Pertahanan

  
Mayjen TNI Murlim Mariadi, S.IP, M.M, M.Tr (Han)

Tanggal September 2019

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

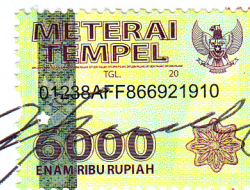
<b>Nama</b>	: Indri Yanuarti		
<b>NPM</b>	: 120180101006		
<b>Program Studi</b>	: Strategi Perang Semesta		
<b>Fakultas</b>	: Strategi Pertahanan		
<b>Judul Tesis</b>	: Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia		
No.	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Pembimbing I:  Prof. Dr. Makarim Wibisono, S.H, M.A		2/10-19
2.	Pembimbing II:  Dr. I Wayan Midhio, M.Phil Letnan Jenderal TNI (Purn)		
3.	Reviewer I:  Dr. Edi Suhardono S.E, M.A.P Laksma TNI		2/10 19
4.	Reviewer II:  Dr. Mochammad Afifudin, S.E, M.M, M.Si Brigjen TNI		4/10-19
5.	Reviewer III:  Dr. Harangan Sitorus, M.Sc, M.Si (Han) Brigjen TNI (Purn)		2/10-19

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan/undang-undang yang berlaku.

Bogor, Oktober 2019



Indri Yanuarti

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Indri Yanuarti  
NIM : 120180101006  
Program Studi : Strategi Perang Semesta  
Fakultas : Fakultas Strategi Pertahanan  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**STRATEGI KERJA SAMA INDO-PASIFIK UNTUK MENDUKUNG  
PERTAHANAN NEGARA: PERSPEKTIF INDONESIA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bogor, 5 Oktober 2019



Indri Yanuarti

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas kemudahan dan kelancaran yang telah dianugerahkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia". Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister pada Program Studi Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan.

Penulisan tesis ini banyak mendapatkan inspirasi dari lingkungan asal peneliti bekerja dan mengabdikan, yaitu Kementerian Luar Negeri, khususnya di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. Awal tahun 2018, kami menyaksikan langsung bagaimana ide atau gagasan Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia mulai dirancang di direktorat tempat peneliti bekerja. Pertengahan tahun 2018 pada saat dinyatakan lolos beasiswa Universitas Pertahanan, peneliti mendapat dukungan dari atasan dan beberapa rekan kerja untuk memanfaatkan tugas belajar dengan mengkaji konsep Indo-Pasifik secara akademik, mengingat konsep Indo-Pasifik masih terus digulirkan dan dinegosiasikan di tingkat ASEAN. Maka tercetuslah prakarsa untuk merencanakan penulisan ini sebagai tema tesis peneliti, tentu ditinjau dari sudut pandang strategi pertahanan sebagaimana visi dan misi program studi peneliti. Sepanjang menjalani perkuliahan, peneliti juga semakin menemukan keterkaitan pentingnya sinergi kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan negara dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik berdasarkan teori-teori strategi pertahanan, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan analisis lingkungan strategis.

Rampungnya penulisan tesis ini tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materiil. Untuk itu peneliti bermaksud mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang memberikan andil dalam keseluruhan proses peneliti menjalani perkuliahan di Universitas Pertahanan hingga menyusun tesis. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Suami tercinta Ricky Ardiansyah serta putra-putri terkasih Kanaya Alyshandrea dan Nayaka Arsyandendra atas doa, dukungan dan pengertian yang senantiasa diberikan selama peneliti menjalani studi di Universitas Pertahanan.
2. Dosen Pembimbing peneliti, yaitu Prof. Dr. Makarim Wibisono, S.H, M.A dan Letjen TNI (Purn.) Dr. I Wayan Midhio, M.Phil; yang telah memberikan semangat, arahan, saran dan masukan yang konstruktif bagi penyelesaian tesis ini
3. Seluruh narasumber dalam penelitian tesis ini, yaitu Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri, Dr. Siswo Pramono; Dirjen Strahan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Rizerius Eko Handisancoko; Guru Besar UNHAN Prof. Purnomo Yusgiantoro Ir, M.Sc, M.A, Ph.D dan Laksamana TNI (Purn.) Prof. Dr. Marsetio, M.M; Tenaga Profesional Bidang HI dan Strategi Lemhanas, Laksda TNI (Purn.) Robert Mangindaan; Komandan Seskoal, Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T, M.Sc, D.E.S.D; Pengamat Pertahanan Ibu Connie Rahakundini Bakrie; dan Analis Geostrategi dan Penulis Buku "Indonesia Inc: Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia, Dr. Ian Montratama.
4. Sekretaris Program Studi Strategi Perang Semesta, Kolonel Pas Dr. Drs. Bastari R, M.Pd, M.Sc, M.Si (Han) dan seluruh dosen pengajar pada prodi Strategi Perang Semesta, di antaranya Mayjen TNI (Purn.) Dr. Drs. TSL Toruan, Dipl. S.S; Mayjen TNI (Purn.) Dr. Ir Syaiful Anwar, M.Bus. M.A; Brigjen TNI (Purn.) Dr. Harangan Sitorus, M.Sc, M.Si (Han).
5. serta rekan-rekan yang telah menjadi sahabat selama menempuh studi di Universitas Pertahanan; Akmalia, Ari, Putu Ika, Selly,

Yenglis, Niki, mentor Gusti, dan Shazri atas pertemanan tulus, dukungan serta motivasinya selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan-kebaikan berbagai pihak atas bantuannya.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami membuka diri atas kritik dan saran konstruktif guna perbaikan substansi tesis ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pertahanan dan bermanfaat bagi *stakeholder* terkait dalam meningkatkan sinergi dan memajukan strategi pertahanan negara untuk mengakselerasikan tercapainya kepentingan nasional.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Bogor, Oktober 2019

Indri Yanuarti

## ABSTRAK

### STRATEGI KERJA SAMA INDO-PASIFIK UNTUK MENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA: PERSPEKTIF INDONESIA

INDRI YANUARTI

Sejak awal diartikulasikan oleh Presiden AS Donald Trump pada bulan November 2017, konsep *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)* semakin menarik perhatian atas Indo-Pasifik sebagai wujud pergeseran geopolitis. FOIP pada akhirnya dianggap sebagai langkah awal untuk memperkuat strategi penghadangan melawan kebangkitan Cina dan untuk merekonstruksi tatanan regional. Beberapa *flashpoint* di kawasan tidak terhindarkan bahkan pada tataran tertentu semakin memperburuk situasi akibat rivalitas AS-Cina. Indonesia sebagai *natural leader* ASEAN menyadari bahwa negara-negara *middle power* tidak semestinya berdiam diri dalam mencermati perubahan lingkungan strategis yang didominasi dengan rivalitas AS-Cina, hingga menstimulasi konsep-konsep Indo-Pasifik sebagai geostrategi. Gagasan Indonesia agar ASEAN memiliki konsep Indo-Pasifik yang lebih inklusif, terbuka dan tetap menghormati hukum internasional akhirnya disahkan sebagai panduan bersama, yaitu *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)* pada 22 Juni 2019. Dokumen AOIP yang masih bersifat politis tentu perlu ditindaklanjuti secara lebih komprehensif. Dari sudut pandang Indonesia, AOIP dapat menjadi modalitas untuk terus mencapai kepentingan nasional melalui sebuah strategi kerja sama Indo-Pasifik. Penelitian ini berupaya memetakan ancaman dan peluang sebagai konsekuensi pengaruh lingkungan strategis Indo-Pasifik, khususnya terhadap pertahanan negara. Selanjutnya penelitian ini juga berupaya merumuskan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pertahanan negara. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber yang kompeten dan data sekunder dari studi literatur serta analisis berdasarkan teori yang relevan seperti teori strategi, kerja sama, konsep pertahanan dan diplomasi. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengarahkan AOIP sebagai arah kerja sama yang dapat mendukung pertahanan negara, baik militer dan non militer yang lebih menekankan pada kerja sama untuk mengatasi ancaman non-tradisional dibandingkan ancaman tradisional.

Kata Kunci: Strategi, Kerja sama Internasional, Indo-Pasifik, Rivalitas AS-China, Pertahanan Negara

## **ABSTRACT**

### **INDO-PACIFIC COOPERATION AS A STRATEGY TO ENHANCE STATE DEFENSE: INDONESIA'S PERSPECTIVE**

**INDRI YANUARTI**

*Since the initial articulation by the United States (US) President Trump in November 2017, the concept of a Free and Open Indo-Pacific (FOIP) has attracted growing concern over Indo-Pacific as a geopolitical shift. FOIP has eventually been regarded as starting point to establish a containment against the rise of China and to reconstruct the regional order. Some flashpoints that tend to spark were inevitable, and to some extent, could further worsen the situation due to US-China rivalry. Indonesia as a natural leader of ASEAN realizes that middle power countries should not remain silent in witnessing the dynamic of strategic environment dominated by US-China rivalry that has stimulated Indo-Pacific concepts as geostrategy. An Indo-Pacific concept derived from Indonesia's perspective that is more inclusive, open and continues to respect international law and norms has finally been adopted as a joint guidelines, namely ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) on June 22 2019. AOIP document might be political in nature, hence it need a comprehensive follow-up. From Indonesia's point of view, AOIP can be used a modality to further achieve its national interests based on Indo-Pacific cooperation strategy. This research seeks to elaborate threats and opportunities in the field of state defense by assesing the strategic environment impact, particularly the Indo-Pacific phenomenon. In addition, this research also tries to formulate an Indo-Pacific cooperation strategy that will ultimately enhance Indonesia's state defense policy. This study is undertaken by qualitative method using primary data such as interview with distinguished key informants and using secondary data gathered by literature study as well as analysis based on relevant theories: theory of strategy, international cooperations along with the concept of defense and diplomacy. The result of this research indicates the significance of directing AOIP as the basis of cooperation that could enhance the national defense policy, both military and non-military. The said cooperation should emphasize cooperation among countries in the Indo-Pacific region in addressing non-traditional threat rather than traditional threats.*

*Key words: Strategy, International Cooperations, Indo-Pacific, US-China rivalry, State Defense*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	14
1.5 Ruang Lingkup .....	15
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	17
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	45
2.3 Kerangka Berpikir .....	53
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode dan Desain Penelitian .....	57
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	58

3.3	Subyek dan Obyek Penelitian .....	59
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	60
3.5	Pemeriksaan Keabsahan Data .....	63
3.6	Teknik Analisis Data .....	65
<b>BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian .....	69
	4.1.1 Gambaran Umum Perkembangan Lingkungan Strategis Terkini: Abad Asia dan Narasi Indo-Pasifik .....	69
	4.1.2 Konsep Indo-Pasifik dari Perspektif Indonesia sebagai Cikal Bakal AOIP.....	92
	4.1.3 Pertahanan Negara dan Relevansi Poros Maritim Dunia	98
4.2	Pembahasan .....	105
	4.2.1 Pengaruh Lingkungan Strategis di Indo-Pasifik bagi Pertahanan Negara: Ancaman dan Peluang.....	105
	4.2.2 Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara .....	116
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>		
5.1	Kesimpulan .....	141
5.2	Rekomendasi .....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>146</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
	LAMPIRAN 1 – PEDOMAN WAWANCARA .....	155
	LAMPIRAN 2 – <i>FINAL TEXT AOIP</i> .....	163
	LAMPIRAN 3 – SURAT IJIN PENELITIAN .....	168
	LAMPIRAN 4 – DOKUMENTASI PENELITIAN .....	170
<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI .....</b>		<b>173</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik 10 Resiko Global berdasar <i>Global Risk Report 2019</i> .....	2
Gambar 1.2	Grafik Pengeluaran Militer dunia berdasarkan kawasan ...	5
Gambar 1.3	Peta Wilayah Indo-Pasifik.....	7
Gambar 2.1	Alur Pikir Peneliti atau Kerangka.....	47
Gambar 4.1	Grafik <i>Chinese Annual Real GDP Growth 1979-2018</i> .....	69
Gambar 4.2	Grafik <i>Asia's Share of Global GDP 1700-2050</i> .....	70
Gambar 4.3	Skema BRI .....	72
Gambar 4.4	Grafik Anggaran Pertahanan Cina berdasarkan <i>Share GDP</i> .....	74
Gambar 4.5	Grafik Jumlah keterlibatan pasukan dalam Latihan Militer Bersama yang diikuti Rusia (2013-2018).....	79
Gambar 4.6	Perbedaan Cakupan Wilayah Asia Pasifik dan Indo Pasifik.....	80
Gambar 4.7	<i>Area of Responsibility US INDOPACOM</i> .....	82
Gambar 4.8	Wilayah Sengketa LCS .....	86
Gambar 4.9	<i>an Indo-Pacific Framework for Mutually Beneficial Cooperation</i> .....	93
Gambar 4.10	Posisi Silang Wilayah Indonesia .....	99
Gambar 4.11	Dampak Perang Dagang terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN .....	112
Gambar 4.12	Tren Penurunan Perang antara <i>Great Powers</i> .....	119
Gambar 4.13	Jumlah Kejadian Pembajakan di Asia Tenggara .....	125
Gambar 4.14	Alutsista Indonesia 2018 .....	129

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Pengeluaran Militer berbagai Negara di Dunia.....	6
Tabel 2.1	Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	51
Tabel 4.1	Tabel Wilayah NKRI .....	84
Tabel 4.2	Distribusi Kekuatan Negara berdasarkan Kuantifikasi Sumber Daya dan Pengaruh .....	90
Tabel 4.3	Lini Waktu Perang Dagang AS-China 2018-2019 .....	98
Tabel 4.4	Aktivitas Diplomasi Pertahanan.....	126

## DAFTAR SINGKATAN

ACPP	<i>ASEAN Cyber Capacity Program</i>
ADB	<i>Asian Development Bank</i>
ADMM	<i>ASEAN Defence Ministers' Meeting</i>
ALKI	Alur Laut dan Kepulauan Indonesia
APEC	<i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
APRA	Angkatan Perang Ratu Adil
ARF	<i>ASEAN Regional Forum</i>
ARIA	<i>Asia Reassurance Initiative Act</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asia Nations</i>
AOIP	<i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i>
BRI	<i>Belt and Road Initiative</i>
CBM	<i>Confidence Building Measures</i>
EAS	<i>East Asia Summit</i>
FOIP	<i>Free and Open Indo-Pacific</i>
GDP	<i>Growth Domestic Product</i>
IORA	<i>Indian Ocean Rim Association</i>
ISEAS	<i>Institute of South East Asian Studies</i>
KKIP	Komite Kebijakan Industri Pertahanan
KTT	Konferensi Tingkat Tinggi
LCS	Laut Cina Selatan
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OBOR	<i>One Belt One Road</i>
PCA	<i>Permanent Court of Arbitration</i>
PIF	<i>Pacific Island Forum</i>
PLA	<i>People Liberation Army</i>
PMD	Poros Maritim Dunia

RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>
RMA	<i>Revolution in Military Affairs</i>
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SIPRI	<i>Stockholm International Peace Research Institute</i>
SWPD	<i>South West Pacific Dialogue</i>
TNI	Tentara Nasional Indonesia
TPP	<i>Trans-Pacific Partnership</i>
UMKM	Usaha Mikro Kecil Menengah
UN	<i>United Nations</i>
UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
VUCA	<i>Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity</i>
WEF	<i>World Economic Forum</i>
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kekuatan pertahanan menjadi hal yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara berdaulat. Bagi Indonesia, pertahanan negara menjadi semakin signifikan dalam kaitannya dengan struktur geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keunggulan demografi dan sumber daya alam melimpah. Kondisi tersebut di satu sisi merupakan modalitas besar yang dapat diberdayakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, namun di sisi lain juga memberikan tantangan dalam mengelola dan mengamankannya. Hal tersebut selanjutnya berimplikasi terhadap kepentingan pembangunan dan pengelolaan sistem pertahanan negara yang handal.

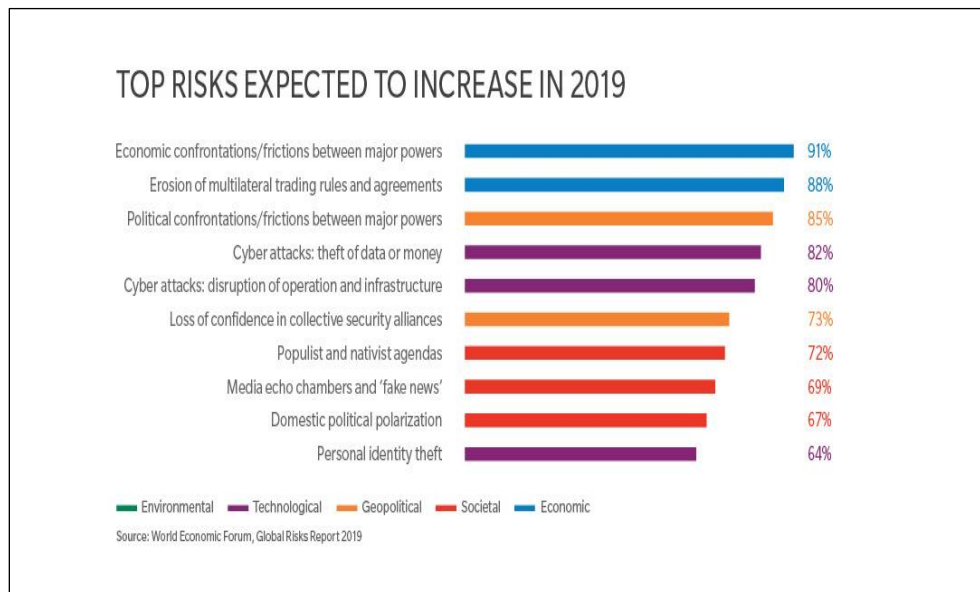
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hingga saat ini Indonesia terus berupaya memperkuat pertahanan dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi mengingat kontinum ancaman terus berproliferasi. Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015:1) menyebutkan bahwa perubahan terhadap spektrum ancaman kini semakin kompleks akibat perkembangan lingkungan strategis sehingga turut berimplikasi terhadap penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia.

Dalam merumuskan kebijakan pertahanan, kompleksitas ancaman tersebut kemudian digolongkan ke dalam pola dan jenis ancaman yang multidimensional meliputi ancaman militer, ancaman non-militer dan ancaman

hibrida dan dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang muncul, Indonesia menganut dan menerapkan suatu sistem pertahanan semesta (sishanta), tidak agresif dan tidak ekspansif dalam rangka melindungi kepentingan nasional (Buku Putih Pertahanan Indonesia; 2015:2). Untuk itu Indonesia selalu mengedepankan diplomasi yang diarahkan untuk mendorong kerja sama dan kemitraan dengan negara lain demi mewujudkan keseimbangan dinamis di kawasan.

Namun demikian, dinamika lingkungan strategis nampaknya terus menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi pertahanan negara. Isu-isu geopolitik masih mewarnai hubungan antar negara di kawasan. Yang terkini adalah tensi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan Cina sebagai salah satu fenomena penting bagi situasi kompetitif antar negara-negara besar di kawasan. Rivalitas AS-Cina tidak hanya menyentuh sektor ekonomi dan perdagangan saja melainkan bersinggungan pula dengan perluasan pengaruh di kawasan dalam hal stabilitas dan keamanan di Asia, khususnya berkaitan dengan konflik Laut Cina Selatan. Sorotan atas isu geopolitik tersebut turut ditekankan dalam laporan *Global Risk Report 2019* yang dirilis *World Economic Forum*. Dalam laporan tersebut, WEF memprediksikan resiko atau tantangan di tingkat global yang harus dihadapi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Friksi dan konfrontasi ekonomi negara-negara besar tercatat dalam peringkat teratas dalam grafik sejumlah tantangan yang diperkirakan akan terus meningkat selama tahun 2019. Lihat Gambar 1.1

Perang dagang antara AS dan Cina yang masih bergulir hingga sekarang menjadi salah satu wujud konfrontasi ekonomi yang perlu diantisipasi. Ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut dalam perkembangan terkini telah menciptakan ketidakpastian bagi semua negara, termasuk negara-negara di kawasan ASEAN.



**Gambar 1.1 Grafik 10 Resiko Global berdasarkan *Global Risk Report WEF 2019***  
 Sumber: WEF Global Risk Report 2019

Diawali pada bulan Maret 2018, Presiden AS Donald Trump mencanangkan instruksi untuk *sweeping tariffs* terhadap barang impor Cina yang bernilai 60 miliar Dolar AS. Hal ini dipicu akibat dugaan AS kepada Cina terkait pencurian teknologi dan kekayaan intelektual. Langkah balasan dilakukan Cina terhadap produk AS pada bulan April 2018 hingga menginisiasi perang dagang antar negara dengan ekonomi terbesar di dunia (*Council on Foreign Relations, 2018*). Perang dagang AS-Cina memasuki babak berikutnya setelah Trump menaikkan tarif sebesar 25% untuk produk Cina senilai 200 dolar AS pada tanggal 10 Mei 2019. Keputusan Trump dibalas oleh Cina dengan kenaikan tarif pada barang AS senilai 60 dolar AS pada tanggal 1 Juni 2019.

Kompetisi semakin tajam dan diperburuk dengan sengketa AS melawan perusahaan telekomunikasi raksasa Cina, Huawei. Selain menuding Huawei sebagai ancaman bagi keamanan siber, AS juga menduga kuat bahwa Huawei mencuri rahasia dagang dan teknologi robotik milik AS,

*T-mobile Inc.* AS kemudian melarang lembaga AS membeli perangkat dan jasa Huawei dan menyertakan Huawei dalam *entity list* Kementerian Perdagangan AS (*Huawei Lawan Balik...*, 2019). Fakta tersebut turut mencerminkan volatilitas 'perang' yang bukan persoalan tarif ekspor-impor semata, tetapi juga kompetisi industri teknologi informasi.

Ketegangan AS-Cina berpotensi menjadi api dalam sekam bagi stabilitas keamanan kawasan. Pertaruhan stabilitas keamanan di kawasan sebagai dampak perang dagang Cina-AS menjadi semakin beralasan sejak ditandatanganinya *Asia Reassurance Initiative Act* (ARIA) pada tanggal 31 Desember 2018. Undang-undang tersebut mengesahkan anggaran senilai 1,5 miliar Dolar AS atau sekitar 21,1 triliun Rupiah selama 5 tahun yang digunakan untuk meningkatkan komitmen keamanan dengan sekutunya, termasuk Jepang, Korea Selatan dan Australia serta memperkuat kerja sama keamanan dengan negara di Asia Timur dan Tenggara (Garcia, 2019:3). Dalam surat kabar *South China Morning Post*, kepala perusahaan riset *Complete Intelligence*, Tony Nash menelaah bahwa komitmen ARIA sangat kontras dengan hubungan transaksional yang sedang dibangun Cina melalui kebijakan *Belt and Road Initiative* (BRI) (*Trump Meningkatkan Komitmen...*, 2019).

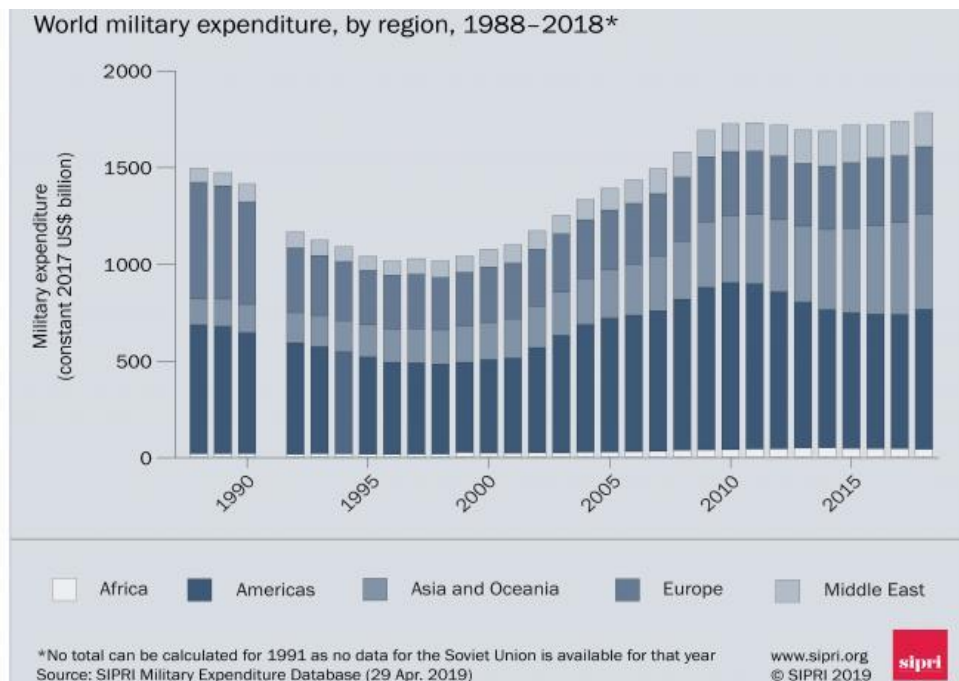
Berdasarkan fenomena tersebut, ASEAN akan sulit berkelit dari perebutan pengaruh (*power projection*) yang dilakukan AS dengan komitmen dana untuk peningkatan kerjasama maupun Cina dengan skema bantuan pembiayaan proyek infrastruktur BRI yang sudah diluncurkan sejak tahun 2013. Dalam situasi ini, sentralitas dan kesatuan ASEAN barangkali akan mendapatkan ujian di titik tertinggi. Beberapa negara anggota ASEAN yang dikenal sebagai loyalis AS, seperti Filipina misalnya, mengisyaratkan untuk mulai berpaling dari komitmen aliansinya. Filipina secara terbuka telah sepakat dengan Cina dalam sebuah perjanjian ekonomi di mana Cina bahkan menyumbang senjata yang digunakan Filipina dalam konflik untuk

memberantas terorisme di Mindanao. Demikian pula Thailand yang mulai tidak nyaman dengan AS terutama sejak pemerintahan Obama, kini tercatat menjalin kerja sama dengan Cina dalam proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai 5,1 miliar dolar AS (Khasru, 2017:6-9). Indonesia, meskipun juga ditarik lebih dekat melalui pendekatan ekonomi Cina, tetap harus waspada menempatkan diri. Selain tetap berpijak pada politik luar negeri bebas aktif, Indonesia juga harus mempertahankan posisinya sebagai tulang punggung kekuatan non-blok

Merujuk pada survei terbaru yang diterbitkan Pusat Studi ASEAN di ISEAS-Yusof Ishak Institute pada awal Januari 2019, Cina memang dipandang oleh 73 persen responden telah menanamkan pengaruh ekonomi terbesar di kawasan. Selain itu Cina juga diyakini memiliki pengaruh politik dan strategi yang lebih besar daripada Amerika Serikat (*Southeast Asia Wary...*, 2019). Namun demikian lebih dari 50 persen responden juga menyatakan tidak mempercayai bahwa AS maupun Cina, dapat berkontribusi bagi perdamaian, keamanan, kesejahteraan dan tata kelola global. Kondisi *trust deficit* yang ditimbulkan oleh ketegangan hubungan AS-Cina telah menjadi ancaman bagi stabilitas kawasan.

Prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan pecahnya perang atau konflik terbuka akibat perseteruan hegemonik antara AS-Cina mulai mengemuka. Melalui buku "*Destined for War: Can America and China Escape Thucydides Trap?*", Graham Allison mengungkapkan bahwa dari 16 rivalitas *rising power* melawan *established power* yang pernah terjadi sepanjang sejarah dunia, 12 diantaranya berakhir dengan perang. Jika menilik laporan tahunan *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) yang dirilis akhir April 2019 mengenai pengeluaran negara untuk kebutuhan militer dan pertahanan yang mencapai tingkat tertinggi sejak berakhirnya Perang Dingin, probabilitas terjadinya perang menjadi meningkat akibat menajamnya dilema keamanan kawasan. SIPRI yang merupakan

institusi *think tank* di bidang pertahanan global mencantumkan keseluruhan anggaran belanja militer pada level global pada tahun 2018 mencapai 1,82 triliun Dolar AS (meningkat 2,6 persen dibanding tahun sebelumnya).



**Gambar 1.2 Grafik Pengeluaran Militer berdasarkan Kawasan**  
 Sumber: SIPRI 2019

Selanjutnya berdasarkan data yang dirilis oleh SIPRI sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.1, terlihat bahwa AS dan Cina menjadi penyumbang terbesar dari total nilai pengeluaran belanja militer dunia. AS menyerap anggaran pertahanan terbesar senilai 649 miliar dolar AS sedangkan Cina di peringkat kedua mencatatkan total pengeluaran untuk pos militernya sebesar 250 miliar dolar AS (Irfani, 2019:2-3).

Tabel 1.1 Pengeluaran Militer Beberapa Negara di Dunia

Rank		Country	Spending (\$ b), 2018	Change (%), 2009-18	Spending as a share of GDP (%) <sup>b</sup>		World share (%), 2018
2018	2017 <sup>a</sup>				2018	2009	
1	1	United States	649	-17	3.2	4.6	36
2	2	China	[250]	83	[1.9]	[2.1]	[14]
3	3	Saudi Arabia	[67.6]	28	[8.8]	9.6	[3.7]
4	5	India	66.5	29	2.4	2.9	3.7
5	6	France	63.8	1.6	2.3	2.5	3.5
<b>Subtotal top 5</b>			<b>1 097</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>60</b>
6	4	Russia	61.4	27	3.9	3.9	3.4
7	7	United Kingdom	50.0	-17	1.8	2.4	2.7
8	9	Germany	49.5	9.0	1.2	1.4	2.7
9	8	Japan	46.6	2.3	0.9	1.0	2.6
10	10	South Korea	43.1	28	2.6	2.7	2.4
<b>Subtotal top 10</b>			<b>1 347</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>74</b>
11	13	Italy	27.8	-14	1.3	1.6	1.5
12	11	Brazil	27.8	17	1.5	1.5	1.5
13	12	Australia	26.7	21	1.9	1.9	1.5
14	14	Canada	21.6	12	1.3	1.4	1.3
15	15	Turkey	19.0	65	2.5	2.5	1.0
<b>Subtotal top 15</b>			<b>1 470</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>81</b>
16	16	Spain	18.2	-5.2	1.3	1.3	1.0
17	17	Israel	15.9	-5.8	4.3	6.8	0.9
18	18	Iran	13.2	-10	2.7	3.2	0.7
19	24	Poland	11.6	48	2.0	1.8	0.6
20	19	Pakistan	11.4	73	4.0	3.3	0.6
21	25	Netherlands	11.2	-4.4	1.2	1.4	0.6
22	21	Singapore	10.8	13	3.1	3.9	0.6
23	20	Taiwan	10.7	-2.9	1.8	2.3	0.6
24	23	Colombia	10.6	15	3.2	3.9	0.6
25	22	Algeria	9.6	85	5.3	3.8	0.5
26	26	Indonesia	7.4	99	0.7	0.6	0.4
27	29	Kuwait	7.3	39	5.1	4.0	0.4
28	30	Norway	7.1	23	1.6	1.6	0.4
29	31	Thailand	6.8	16	1.3	1.8	0.4
30	32	Sri Lanka	[6.7]	69	[8.2]	[7.0]	[0.4]
31	32	Mexico	6.6	36	0.5	0.5	0.4
32	27	Iraq	6.3	58	2.7	2.9	0.3
33	33	Sweden	5.8	18	1.0	1.2	0.3
34	35	Chile	5.6	25	1.9	2.3	0.3
35	37	Viet Nam	5.5	76	2.3	2.3	0.3
36	36	Greece	5.2	-46	2.4	3.2	0.3
37	39	Belgium	5.0	-12	0.9	1.2	0.3
38	38	Switzerland	4.8	6.3	0.7	0.7	0.3
39	43	Ukraine	4.8	69	3.8	[2.8]	0.3
40	46	Romania	4.6	112	1.9	1.3	0.3
<b>Subtotal top 40</b>			<b>1 683</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>93</b>
<b>World</b>			<b>1 822</b>	<b>5.4</b>	<b>2.1</b>	<b>2.6</b>	<b>100</b>

Sumber: SIPRI, 2019

Turbulensi geopolitik tersebut semakin menjelaskan bahwa lingkungan strategis yang penuh dinamika turut menambah kompleksitas ancaman bagi keamanan negara-negara di kawasan. Apalagi mandala yang menjadi medan kompetisi AS dan Cina berada pada kawasan Asia Pasifik yang kini mengalami pergeseran terminologi menjadi kawasan Indo-Pasifik dengan turut memperhitungkan negara-negara di lingkaran Samudera Hindia, khususnya India. Jika Asia Pasifik lebih berdimensi kontinental, maka kawasan Indo-Pasifik lebih bercirikan wilayah alamiah dengan dimensi kemaritiman. Kawasan ini mencakup negara-negara yang lebih luas dari sekedar Asia Pasifik, menghubungkan Asia dan Afrika dan menempatkan Asia Tenggara sebagai pusat kawasan tersebut (Rivai Ras, 2018:7). Ditinjau dari sudut pandang geopolitik, terminologi Indo-Pasifik menjadi bentuk rekonsiliasi kekuatan di kawasan dengan meleburnya dua fitur geografis yang berbeda tetapi dalam mekanisme keamanan yang serupa (Godbole, 2017:13).



**Gambar 1.3 Peta Wilayah Indo-Pasifik**

Sumber: (<http://www.indopacificsecurity.com/2014/05/about.html>), 2014

Sebagai titik-titik geografis yang menghubungkan lingkaran Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, kawasan Indo-Pasifik memiliki parameter fisik yang cukup signifikan. Samudera Hindia meliputi area seluas 68,6 juta kilometer persegi, sedangkan Samudera Pasifik memiliki luas 155,6 juta kilometer persegi. Garis pantai (*coast line*) Samudera Hindia mencapai 66.526 kilometer dan Samudera Pasifik sepanjang 135.663 kilometer (Priatna, 2019:9). Indo-Pasifik saat ini telah menjelma menjadi kawasan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. Dalam hal *purchasing power parity*, kawasan ini mencatatkan GDP mencapai lebih dari 65,8 triliun Dolar AS pada tahun 2018. Dalam tiga tahun ke depan, diperkirakan mencapai 95,6 triliun dolar AS (Kementerian Luar Negeri RI, 2018:9).

Indo-Pasifik dalam perkembangannya telah menstimulasi konsep-konsep baru dalam mengoptimalkan struktur kerjasama dalam memperkaya arsitektur kawasan (Rivai Ras, 2018:8). AS yang menggandeng India, Jepang dan Australia kembali mengonsolidasikan *Quadrilateral Security Dialogue (the Quad)* pada tahun 2017 setelah sebelumnya vakum sejak

dibentuk tahun 2007. *The Quad* dibangkitkan kembali sebagai upaya *counter balance* untuk membendung langkah Cina yang agresif menerapkan *Belt and Road Initiative*. Dapat dikatakan bahwa Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis yang menjadi sorotan geopolitik terkini. Berbagai potensi kerja sama telah berjalan untuk memperkuat esensi kawasan tersebut, khususnya dalam hal supremasi maritim, seperti kerja sama keamanan maritim dan kerja sama di bidang sumber daya kelautan.

Indonesia, misalnya, telah memainkan andil besar mengaktifkan kerja sama *Indian Ocean Rim Association (IORA)* melalui *IORA Summit* yang pertama diadakan pada tahun 2017 di Jakarta dan menghasilkan *Jakarta Declaration and Plan of Action*. Kerja sama dalam kerangka regional seperti *ASEAN*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *South West Pacific Dialogue (SwPD)*, dan mekanisme lainnya juga telah lebih dulu berjalan untuk mengawal berbagai langkah *confidence building measures (CBMs)* di kawasan. Namun, untuk merespon perubahan lingkungan strategis yang sedemikian dinamis, diperlukan penguatan arsitektur kawasan yang tidak diarahkan untuk menciptakan mekanisme baru melainkan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada untuk lebih bersinergi dan lebih efektif dalam memitigasi potensi-potensi friksi dan ketegangan antar negara di kawasan.

Dinamika lingkungan strategis yang menggambarkan rivalitas sekaligus peluang kerjasama, khususnya yang terkait dengan AS-Cina ini menimbulkan konsekuensi pilihan kebijakan untuk saling mengakomodasi atau saling kontradiktif satu sama lain sehingga turut mendorong efek *spillover* pada negara-negara lainnya (Huang, 2015:16). Tarik ulur kepentingan antara AS dan Cina inilah yang kemudian menjadikan kawasan Indo-Pasifik teater geotragis tunggal yang mau tidak mau turut menyeret negara-negara di kawasan dalam pusaran dinamika Indo-Pasifik. Asia Tenggara, termasuk Indonesia di dalamnya, merupakan titik pusat (*fulcrum*) Indo-Pasifik.

Dengan prinsip pertahanan defensif aktif, Indonesia berkepentingan merespon potensi ancaman di kawasan dengan langkah-langkah untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan yang kondusif sebagai bagian dari kerangka membangun arsitektur pertahanan negara. Titik berat kepentingan bersama dalam arsitektur pertahanan kawasan adalah menumbuhkan spirit untuk saling menghormati dan rasa saling percaya antar negara-negara di kawasan, sehingga dapat bersama-sama mengantisipasi dan mengatasi berbagai ancaman yang timbul dalam berbagai spektrum (Ryacudu, 2018). Apabila situasi keamanan terkendali, maka pertumbuhan ekonomi nasional pun akan mudah tercapai, sehingga pada gilirannya mampu membawa Indonesia mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Indonesia sangat memiliki kepentingan besar dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik mengingat struktur geografisnya yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Terlebih, keterbukaan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menjadi jalur lintas pelayaran internasional telah menjadikan perairan Indonesia (*sea lanes*) ramai dilalui kapal-kapal besar dari Benua Asia ke benua Amerika melalui Pasifik, maupun sebaliknya (Karim, 2010:2). Tantangan peningkatan keamanan menjadi keniscayaan mengingat masing-masing ALKI memiliki ancaman transnasional yang dinilai serius, seperti *illegal fishing*, *drugs trafficking*, dan terorisme.

Untuk itulah, Indonesia bergegas menggagas kerja sama penguatan arsitektur kawasan demi menjamin stabilitas kawasan Indo-Pasifik sehingga mampu menopang kelancaran pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, Pemerintah RI c.q Kementerian Luar Negeri telah mengusung konsep kerja sama Indo-Pasifik yang menghendaki kawasan tersebut mampu menjadi “ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran” sebagaimana ASEAN yang selama ini berkomitmen mewujudkan Asia Tenggara sebagai zona perdamaian, kebebasan dan

netralitas. Pengembangan kerangka kerjasama Indo-Pasifik berdasarkan perspektif Indonesia ini didasarkan pada prinsip-prinsip terbuka, inklusif, transparan dan menekankan kerjasama. Konsep kerja sama Indo-Pasifik pada intinya merupakan aspirasi untuk menyuarakan kepentingan Indonesia mengenai penguatan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik yang diarahkan pada peningkatan kerja sama di bidang maritim, konektivitas dan agenda pembangunan berkesinambungan. Indonesia dengan modalitas wilayah maritim yang luas akan memiliki peluang sekaligus tantangan dalam proses penguatan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Konsep kerja sama Indo-Pasifik yang berlandaskan politik luar negeri bebas-aktif ini juga sejalan dengan visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang juga menjadi arah pembangunan pertahanan negara.

Dalam konsep kerjasama ini, Indonesia mengusulkan pemanfaatan ASEAN *led-mechanism* yang paling dapat menjembatani prinsip inklusivitas tersebut, yakni *East Asia Summit* (EAS). Pada sebuah *talkshow* di CNN Indonesia pada tanggal 19 Desember 2018, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, Siswo Pramono, menyampaikan bahwa EAS dipilih sebagai *platform* untuk memfasilitasi kerja sama Indo-Pasifik mengingat EAS merupakan *leaders-led forum* untuk membahas berbagai perkembangan strategis di kawasan. Secara historis, EAS memang diiniasi ASEAN untuk bisa menggalang kekuatan besar dan menengah di kawasan, seperti AS, Australia, Jepang, Cina, Korea Selatan, India, Rusia dan Selandia Baru.

Usulan konsep kerja sama Indo-Pasifik telah disampaikan Indonesia sejak pertemuan *retreat* Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN pada Januari 2018 dan terus diusung dalam berbagai *proper meetings* ASEAN sepanjang tahun 2018. Saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN di Singapura, April 2018, dan lebih lanjut pada pertemuan *East Asia Summit* (EAS), November 2018, Presiden Joko Widodo telah

menegaskan pentingnya peran ASEAN dalam pengembangan konsep kerja sama Indo-Pasifik agar ASEAN tetap relevan dan dapat menunjukkan sentralitas dan kemampuannya dalam mengelola perubahan lingkungan strategis.

Dalam perkembangan terkini, ASEAN telah menyepakati *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand pada tanggal 22 Juni 2019 (Kementerian Luar Negeri RI, 2019: 1-2). Konsep kerja sama ini digagas Indonesia dan disirkulasikan sejak tahun 2018 sebagai respon atas rivalitas kekuatan besar yang berpotensi mempengaruhi perdamaian dan stabilitas serta upaya pencapaian kemakmuran di kawasan. *Outlook* tersebut menekankan kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam menjunjung prinsip perdamaian, penguatan budaya dialog dan peningkatan kerja sama.

Secara spesifik, peluang kerjasama Indo-Pasifik juga perlu dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan pertahanan negara. Hal ini sejalan dengan urgensi kalibrasi ulang sistem pertahanan negara yang disampaikan Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu, pada kuliah umum di depan civitas akademika Universitas Pertahanan di Sentul, pada 19 September 2018. Menhan Ryacudu menyebutkan, bahwa kalibrasi ulang tatanan arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik perlu direalisasikan untuk menghadapi kompleksitas ancaman dan tantangan di kawasan secara tepat dan proporsional, dengan beberapa ancaman yang menjadi prioritas seperti terorisme dan keamanan siber.

Dengan terkonsolidasinya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, Indonesia berpeluang menunjukkan peran aktif dalam memajukan kerjasama Indo-Pasifik sekaligus mempromosikan stabilitas keamanan dan kemakmuran di kawasan. Mencermati berbagai konsekuensi baik peluang maupun tantangan kerja sama Indo-Pasifik, peneliti bermaksud mengkaji isu ini lebih

lanjut dan menuangkan penelitian ini dengan judul “Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang masalah tersebut, peneliti bermaksud melakukan tinjauan analitis terhadap strategi kerja sama yang dapat dilakukan dalam kerangka penguatan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Adapun rumusan masalah yang akan diangkat adalah: bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang diusung Indonesia di ASEAN dalam rangka memperkuat pertahanan negara? Dari fokus penelitian tersebut, selanjutnya dibagi dalam dua subfokus yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik terhadap pertahanan negara Indonesia, terutama ditinjau dari aspek peluang dan ancaman?
- b. Bagaimana strategi kerja sama Indo-Pasifik untuk mendukung kebijakan pertahanan negara yang akan dioptimalkan melalui mekanisme ASEAN guna mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian menurut Locke et al. (2007:16) berarti menunjukkan “mengapa anda ingin melakukan penelitian dan apa yang ingin anda capai”. Sedangkan menurut Bungin (2012:23), tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah penelitian untuk mengungkapkan keinginan peneliti.

Untuk itu, mengacu pada rumusan pertanyaan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Menganalisis pengaruh dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik terhadap pertahanan negara Indonesia, terutama ditinjau dari aspek peluang dan ancaman
- b. Menganalisis strategi kerja sama Indo-Pasifik untuk mendukung kebijakan pertahanan negara yang akan dioptimalkan melalui mekanisme ASEAN guna mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara umum hasil penelitian akan memberikan khasanah pengayaan akademis dalam ilmu pertahanan, khususnya untuk Lembaga Universitas Pertahanan Indonesia. Di samping itu juga mendiseminasikan pengetahuan dan perkembangan tentang dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik serta strategi kerja sama Indo-Pasifik yang digulirkan Indonesia di tingkat ASEAN untuk mendukung pertahanan negara utamanya dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan terkait, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan instansi terkait lainnya. Dengan harapan lebih mensinergikan langkah-langkah dalam memajukan efektivitas kerjasama Indo-Pasifik yang dapat diarahkan untuk mendukung sasaran strategis pertahanan negara menuju Poros Maritim Dunia.

## **1.5 Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan difokuskan sebagai kajian pertahanan dengan memetakan peluang dan ancaman yang dapat berimplikasi pada pembangunan pertahanan negara berdasarkan dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Penelitian ini selanjutnya juga akan diarahkan untuk menformulasikan langkah-langkah yang dapat dioptimalkan sebagai suatu strategi pertahanan dengan menggunakan instrumen kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, khususnya dalam mekanisme ASEAN. Adapun ruang lingkup penelitian disusun dengan tata urutan yaitu:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Berisi: Latar belakang masalah; rumusan masalah tujuan penelitian manfaat penelitian (manfaat akademis dan manfaat praktis); ruang lingkup.

### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

Berisi: teori-teori yang akan dijadikan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dirumuskan; penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang berupa rangkaian pemikiran dalam satu kerangka berdasarkan teori-teori yang digunakan

### **BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Berisi: Desain penelitian, sumber data/subyek/obyek (sumber data, subyek penelitian, obyek penelitian); teknik pengumpulan data, teknik analisa data, prosedur penelitian (instrumen penelitian, data primer, data sekunder, jadwal penelitian).

### **BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisi: Hasil penelitian (gambaran umum obyek penelitian); Analisa data (interpretasi hasil penelitian); dan pembahasan tentang hasil analisa terhadap tantangan dan peluang kerja sama Indo-Pasifik untuk mendukung pertahanan negara menuju Poros Maritim Dunia

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi: Kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan permasalahan dan rekomendasi yang ditawarkan sebagai langkah-langkah ke depan untuk memperkuat pembangunan pertahanan negara melalui kerja sama Indo-Pasifik berdasarkan analisis peluang dan tantangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi: Daftar buku-buku yang relevan dan menunjang penelitian.

## LAMPIRAN

Berisi: Lampiran (surat ijin penelitian, panduan wawancara, panduan observasi, transkrip wawancara, dokumentasi wawancara, hasil observasi).

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Tinjauan Pustaka bertujuan memberikan informasi terkait hasil penelitian yang berkorelasi dengan obyek penelitian. Hubungan antara penelitian dengan literatur-literatur yang digunakan akan menjadi dasar tinjauan sehingga memperkaya hasil penelitian sebelumnya (Creswell, 2014:71). Tinjauan Pustaka selanjutnya akan mendasari kerangka pemikiran dan menjadi tolok ukur dalam menjelaskan fenomena yang menjadi obyek penelitian dengan merujuk pada penelitian terkait sebelumnya.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori dari literatur yang relevan sebagai pisau analisis yakni, teori analisis lingkungan strategi, teori strategi (pertahanan), teori kerja sama, teori perang semesta, konsep pertahanan negara yang terkait dengan visi Poros Maritim Dunia serta teori lainnya yang dianggap dapat membantu menganalisis masalah dalam penelitian.

##### **2.1.1 Teori Analisis Lingkungan Strategis**

Analisis terhadap lingkungan strategis memiliki korelasi yang signifikan bagi penyelenggaraan pertahanan negara. Hal inipun jelas dicantumkan dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015:1) yang menyebutkan keterkaitan perkembangan lingkungan strategis dengan makin kompleksnya spektrum ancaman. Karena itulah pembangunan pertahanan negara harus senantiasa merespon dinamika tersebut. Tak heran pula, Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu (2018) juga menyinggung pentingnya kalibrasi ulang strategi pertahanan negara akibat dinamika lingkungan strategis masa kini yang makin disruptif. Hal ini sebagaimana disampaikan Menhan Ryamizard saat memberikan Kuliah Umum di

Universitas Pertahanan pada 19 September 2018. Menurut Menhan Ryamizard, perumusan strategi pertahanan harus selalu mengacu pada kondisi aktual potensi ancaman, mengingat strategi yang telah ditetapkan dengan jangka waktu 30-40 tahun yang lalu bisa tidak semuanya relevan dengan situasi ancaman yang aktual di masa sekarang.

Lingkungan strategis adalah situasi internal dan eksternal, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan nasional (Awaluddin, 2012:2). Lingkungan strategis pada dasarnya terbentuk sebagai wadah interaksi yang sangat dinamis dalam konteks internal maupun eksternal. Menurut Yarger (2006:17) dinamika lingkungan strategis tersebut pada akhirnya menjadi fenomena yang penuh kompleksitas karena cakupan pola interaksi yang cukup luas dan meliputi beragam isu, termasuk diantaranya adalah ancaman dan peluang sebagai dampak yang akan mempengaruhi keberhasilan suatu negara dalam menjalin hubungan dengan entitas lainnya, baik aktor negara dan aktor non-negara serta berbagai kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang.

Hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan strategis disampaikan pula oleh Micahel W. Guilliot (2003:3) sebagai berikut:

*“Within the strategic environment one must consider many factors and actors. This construct is neither template nor checklist- nor recipe for perfection. This framework recognizes the fact that one must conceptualize in both political and military realms. Additionally, it illustrates how the strategic environment is interrelated, complementray and contradictory.”*

Pengertian di atas menjelaskan bahwa lingkungan strategis sangat berkaitan dengan analisis dalam bidang politik dan militer (pertahanan) dengan menggunakan dasar tinjauan atas aktor dan faktor yang saling mempengaruhi dalam hubungan antar negara.

Kehadiran aktor-aktor baru selain aktor negara dalam hubungan internasional ini pada akhirnya juga menjadi bagian dari lingkungan eksternal

yang turut berpengaruh pada kebijakan keamanan nasional suatu negara. Hal ini sebagaimana disampaikan Libor ( 2003:9) bahwa:

*“Security environment is an external environment affecting national security policy. It can be seen as an area where national interest area implemented and where these face interest of other actors within the system of international relations and where those processes take place substantially influencing the level of national security..”*

Jika demikian, maka lingkungan strategis dapat menggambarkan potensi ancaman dengan berbagai kemungkinan konflik serta penilaian kemampuan yang harus dikembangkan oleh suatu negara.

Senada dengan pemahaman tersebut di atas, Ikrar Nusa Bhakti (2004:13) membuat argumentasi bahwa kebijakan pertahanan harus dikembangkan secara *outward looking* berdasarkan dinamika lingkungan yang terus berubah dan berbanding lurus dengan tingkat perubahan politik, baik di level global, regional dan nasional. Dengan demikian postur pertahanan pun akan direfleksikan berdasarkan tipologi ancaman, bentuk konflik dan eskalasi konflik sebagai hasil dari perubahan lingkungan strategis tersebut. Dalam kaitan inilah Bhakti menyimpulkan bahwa lingkungan strategis akan mempengaruhi keseluruhan kebijakan politik luar negeri dan pertahanan negara, termasuk kemampuan diplomasi, pembangunan postur pertahanan serta kebijakan strategis yang akan ditentukan dan dilakukan secara operasional untuk menghadapi dinamika lingkungan strategis tersebut.

Sifat lingkungan strategis yang dinamis dan cepat berubah telah banyak dikaji dengan berbagai interpretasi. *US Army War College* menggambarkan *nature* dari lingkungan strategis dalam sebuah akronim VUCA, yaitu *volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity* (Magee, 1998:1) *Volatility* merujuk pada situasi yang tidak stabil dan mudah bergejolak, yang terkadang diwarnai dengan kekerasan. *Uncertainty* menggambarkan situasi

yang penuh ketidakpastian berkaitan dengan isu atau permasalahan yang terjadi. Pada saat muncul isu yang baru, permasalahan yang lama bisa muncul kembali sehingga seolah solusi yang pernah tercapai sebelumnya menjadi diragukan. *Complexity* dimaknai sebagai sebuah kerumitan situasi karena terlalu banyak sisi-sisi yang terhubung satu sama lain namun sulit untuk dipahami baik sebagai bagian yang terpisah satu sama lain maupun secara satu kesatuan. Sedangkan *ambiguity* mencerminkan pemaknaan atas lingkungan strategis yang multi interpretasi dengan aneka konklusi dan solusi yang dapat terbukti baik maupun buruk.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan sistem pertahanan negara, lingkungan strategis akan mencakup level nasional, regional dan global. Bandoro (2014) dalam materi Kuliah Umum di Unhan berjudul *Strategic Environment* mengatakan bahwa pada cakupan tersebut diperlukan komponen analisis untuk menentukan apakah suatu isu merupakan ancaman. Beberapa komponen tersebut yaitu: (1) *Scanning*, yang merupakan proses deteksi seluruh bagian yang terkait dengan lingkungan strategis, termasuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpengaruh di masa kini dan masa depan; (2) *Monitoring*, yang berarti mengamati dan merekam seluruh kegiatan yang dilakukan dalam agenda-agenda yang berlangsung dalam lingkungan strategis sehingga menjadi informasi penting yang akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan; (3) *Forecasting*, yang merupakan upaya memproyeksikan situasi yang dapat terjadi di masa depan berdasarkan informasi dan data dari proses *monitoring* dan *scanning*; (4) *Assesment*, yang merupakan upaya penilaian sebagai bagian dari pembuatan keputusan setelah melalui pertimbangan-pertimbangan berdasarkan tiga komponen sebelumnya. Komponen analisis ini dapat dijadikan sebagai langkah untuk meminimalkan resiko pembuatan kebijakan sebagai komponen analisis yang terakhir; (5) *Policy measures*; yang merupakan pembuatan kebijakan sebagai tanggapan atas pengaruh

atau dampak yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan.

Dari tinjauan teoritik di atas dapat dipahami bahwa dinamika lingkungan strategis dapat berdampak *positif*, yang artinya memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai cita-cita, tujuan dan kepentingan politik, maupun berdampak *negatif*, yang artinya dapat meningkatkan potensi ancaman bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam meraih tujuan dan kepentingan nasionalnya. Selanjutnya sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, teori analisis lingkungan strategis dapat disintesis sebagai suatu pengamatan atas dinamika lingkungan strategis di tataran global, regional dan nasional yang muncul dalam bentuk perubahan-perubahan dinamis dan kompleks untuk kemudian menjadi konsideran penting dalam menentukan strategi atau langkah ke depan.

Perubahan lingkungan strategis saat ini cukup didominasi oleh pertentangan hegemoni negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik yang telah berimplikasi pada persaingan dan ketegangan baik di bidang ekonomi maupun pertahanan-keamanan yang pada akhirnya mengindikasikan tajamnya dilema keamanan. Oleh karena itu pembangunan kekuatan pertahanan perlu disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis tersebut. Dengan membaca tren pertahanan maritim dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin mengemuka, maka Indonesia juga perlu mengembangkan dan memutakhirkan (*update and upgrade*) unsur-unsur pertahanan, yang akan diperlukan sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia (PMD). Oleh karenanya pemerintah bersama segenap komponen bangsa dituntut responsif dan adaptif untuk memanfaatkan peluang dan tantangan demi menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika lingkungan strategis yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian kepentingan nasional, khususnya perwujudan PMD.

### 2.1.2 Teori Strategi

Dari uraian sebelumnya, dipahami bahwa analisis lingkungan strategis memberikan andil besar dalam penentuan strategi ke depan. Karena itu diperlukan pula tinjauan teoritis mengenai strategi yang akan membantu pemikiran para perancang dan perumus strategi untuk terbiasa mencermati kompleksitas pada lingkungan strategi yang berkenaan dengan perubahan, yang diantaranya ditandai dengan peluang dan tantangan. Berdasarkan etimologi bahasa, kata “strategi” berasal dari kata “*strategos*” (bahasa Yunani), dari perpaduan kata *stratos* yang berarti militer dan “*ag*” yang berarti pemimpin (Zukifliemansyah&Hari.P, 1996: 8). *Strategos* merujuk pada *generalship* atau komandan militer yang berkembang pada masa demokrasi Athena tahun 500-400SM. Pada era tersebut, setiap pasukan dipimpin oleh *strategos* untuk berupaya memenangkan peperangan, hingga akhirnya teknik dan cara penyusunan langkah-langkah memenangkan pertempuran mulai dipelajari sebagai sebuah strategi. Jadi, secara historis, strategi berakar dari peperangan yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Strategi dinilai berperan penting untuk memenangkan sebuah perang.

Sedangkan jika menelaah lebih dalam perkembangan makna strategi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, maka definisi strategi adalah: **(1)** ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tertentu, dalam perang dan damai; **(2)** ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang; **(3)** rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”. Senada dengan pengertian di atas, kamus *Merriam-Webster* juga memaknai strategi sebagai: “*the science and art of employing the political, economic, psychological and military forces of a nation or group of nations to afford the maximum support to adopt policies in peace or war*”.

Strategi kemudian menjadi studi yang berkembang dan terus dikaji

secara akademik hingga sekarang, tidak hanya di bidang militer dan pertahanan, tetapi dikembangkan juga secara masif dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Salah satu tokoh yang mengembangkan strategi klasik mengenai perang adalah Sun Tzu yang dikenal dengan bukunya *The Art of War*. Dalam buku yang banyak menuangkan filosofi perang tersebut, Sun Tzu memberikan pemahaman bahwa esensi strategi adalah cara untuk mencapai kemenangan dalam perang. Tokoh prominan lain yang berhasil mengembangkan teori strategi perang adalah Carl von Clausewitz, seorang jenderal asal Jerman yang dikenal melalui bukunya *On War* (1780-1831). Dalam bukunya, Clausewitz juga banyak menuangkan pemikiran tentang strategi yang ia definisikan sebagai cara penggunaan pertempuran untuk mencapai tujuan perang (*strategy is the use of the engagement for the purpose of war*) (Clausewitz, 1984:133). Definisi-definisi strategi di atas termasuk dalam definisi klasik yang lebih didominasi perspektif militer dengan menekankan bahwa strategi adalah perencanaan yang diupayakan guna memenangkan perang (Drew&Snow, 1988:13).

Pemaknaan strategi terus berkembang seiring perubahan zaman, namun demikian pemikiran klasik tetap relevan dan menjadi dasar pemikiran strategi modern sebagaimana yang digagas oleh Collin S. Gray, bahwa "*strategy is the bridge that relates military power to political purpose*" yang dapat dimaknai bahwa strategi tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau *hard power* belaka. Pemikiran ini dipandang berdekatan dengan pemikiran Clausewitz yang secara sederhana menyatakan bahwa strategi merupakan perpanjangan dari politik atau pencapaian kepentingan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran Clausewitz merupakan pemikiran yang tidak bisa dilepaskan dalam upaya memahami definisi strategi, termasuk strategi modern. Ketika Clausewitz menyatakan bahwa strategi merupakan "*...the use of engagement for the object of war*" Gray menyatakan bahwa definisi Clausewitz ini berorientasi pada pelaksanaan

operasional yang digunakan dalam sebuah pertempuran. Hal ini disebabkan karena peperangan itu bisa terjadi dengan waktu, tujuan serta tempat tertentu sesuai dengan kebijakan politik dari negara yang bersangkutan (Gray, 1999:17).

Dari definisi strategi menurut Gray, secara umum strategi berkaitan dengan kegiatan penggunaan kekuatan (militer) untuk mendapatkan tujuan politik tertentu. Sebagai konsekuensinya, diperlukan pula elaborasi aspek multidimensional lain yang perlu dipelajari, seperti ekonomi, demografi masyarakat, kemampuan teknologi, informasi, bahkan pemahaman akan pola perilaku (psikologi) dari lawan yang akan dihadapi (Mahnken&Maiolo, 2008:394).

Titik balik studi strategi terjadi secara signifikan pasca berakhirnya Perang Dingin. Ken Booth (1991: 313-326) menyatakan bahwa akhir Perang Dingin menjadi simbol berakhirnya pula kajian strategis yang sebelumnya sangat militeristik. Perubahan lingkungan strategis pada era tersebut telah menstimulasi studi strategi untuk merambah ke kajian terkait isu keamanan yang berfokus pada bentuk-bentuk potensi ancaman yang membahayakan eksistensi negara dan keselamatan rakyatnya. Dalam hal ini strategi dilakukan dengan penggunaan kekuatan militer yang bertujuan politis. Dengan demikian, strategi makin mengalami pergeseran makna fundamental berkaitan dengan bagaimana negara memberdayakan kekuatan (*power*) seperti politik, ekonomi, diplomatik dan militer, sebagai upaya pertahanan dari segala bentuk ancaman yang muncul.

Dalam analisis lebih lanjut mengenai strategi, berkembang pula konsep mengenai *grand strategy*. Adapun definisi *grand strategy* sebagaimana dikutip dari buku *The Strategy Bridge* (Gray, 2011:3), adalah: *“the direction and use made of any or all of the assets of a security community, including its military instrument, for the purpose of policy as decided by politics”*. Implementasi *grand strategy* akan mengarahkan

*distribution of power* dari suatu negara dengan mengandalkan berbagai bentuk *power* yang dimiliki guna melemahkan kemampuan lawan (Hart, 1991:321). Dalam kaitan ini, kekuatan nasional yang dapat diberdayakan untuk merumuskan *grand strategy* adalah kondisi geografi, populasi, kemampuan ekonomi, politik dan diplomasi (Drew&Snow, 1988:16).

Pertimbangan geografi akan menjadi kunci penting dalam menentukan *grand strategy* ditinjau dari sudut pandang geostrategi dan geopolitik. Hal ini sejalan dengan pernyataan Collin S. Gray dan Geoffrey Sloan bahwa geografi merupakan ibu dari strategi (Gray, 1999:5). Menurut Gray, instrumen geografis atau yang disebut dengan "*environmentally focused instrument*" terbagi dalam lima bagian, yaitu *land power*, *sea power*, *air power*, *space power* dan *cyber power*. Pada saat strategi klasik dibentuk, instrumen geografis yang dibahas cenderung berada pada dimensi *land power* dan *sea power*. Seiring dengan adaptasi taktik, perkembangan teknologi serta instrumen dalam perang yang lebih modern, maka penting pula menekankan pembangunan kekuatan dari sisi *air power* yang akan menjadi pelengkap keterpaduan tiga matra kekuatan di darat, air dan udara, termasuk penguasaan teknologi untuk membangun *space power* dan *cyber power*. Pada gilirannya penggunaan strategi modern di abad ke-21 tidak lagi menitikberatkan pada penguasaan satu, dua atau tiga instrumen geografis saja. Keseluruhan instrumen geografis yang komplementer satu sama lain akan lebih menghasilkan rumusan strategi yang lebih terpadu dengan berpijak pula pada prinsip pertahanan semesta mengingat lingkup kekuatan nasional yang menjadi instrumen strategi tersebut di atas tidak hanya menjadi domain militer, tetapi juga nirmiliter.

Dalam konteks Indonesia, pertahanan yang mendasarkan kondisi geografis akan menjadi hal krusial mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan sebagai halaman terdepan yang berada pada posisi strategis persilangan dunia (jalur perdagangan dan pelayaran

internasional). Untuk itu *sea power* sebagai sebuah geostrategi perlu diutamakan untuk lebih menjaga kedaulatan teritorial perairan di wilayah-wilayah perbatasan serta menjaga kedaulatan sumber daya ekonomi, pangan dan energi mengingat dua pertiga wilayah Indonesia merupakan lautan. Berdasarkan teori *sea power* yang dikemukakan Alfred T. Mahan dalam buku *The Influence of Sea Power upon History* (2011:25-89), kekuatan pertahanan negara di laut dan aspek ekonomi suatu negara memiliki korelasi yang erat yang terhubung melalui kemakmuran ekonomi, perdagangan dan kekuasaan. Menurut Mahan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, negara harus lebih dulu berupaya meningkatkan penguasaannya terhadap laut (*command of the sea*) serta kepemilikan armada laut yang kuat. Mahan juga menekankan bahwa negara yang mempunyai kekuatan besar di bidang maritim akan cenderung menggunakan laut sebagai sarana di berbagai aktivitas. Kekuatan laut selanjutnya akan menjadi basis langkah defensif dalam menjaga fungsi laut untuk kepentingan ekonomi.

Kajian teoritis berkaitan dengan strategi dan *grand strategy* di atas selanjutnya akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini. Jika disintesakan, maka strategi dalam membangun kekuatan pertahanan semesta perlu mengedepankan pemahaman atas kekuatan-kekuatan nasional, khususnya instrumen geografis, untuk kemudian mengolah distribusi kekuatan nasional tersebut untuk melemahkan kemampuan lawan. Dengan menyadari kekuatan Indonesia sebagai negara kepulauan yang disatukan dan dihubungkan oleh perairan maka pembangunan pertahanan juga perlu diarahkan pada sektor kemaritiman. Hal ini juga selaras dengan fokus pertahanan negara untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) berdasarkan Buku Putih Pertahanan (2015). Lebih lanjut kebijakan PMD yang diarahkan untuk lebih *outward looking* juga akan diharmonisasikan dengan konsep Indo-Pasifik sebagai konsekuensi perubahan lingkungan strategis di tingkat regional dan global

### 2.1.3 Konsep DIME

Perkembangan penggunaan strategi telah terjadi seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi. Gagasan lama mengenai strategi perang, bahwa penggunaan kekuatan militer saja cukup untuk menghancurkan kehendak musuh dan memajukan kepentingan nasional tidak lagi bisa diadaptasi di dunia modern. Strategi perang sebuah negara maju saat ini memutuhkan integrasi setidaknya empat elemen kekuatan nasional yang efektif yakni: Diplomasi, Informasi, Militer dan Ekonomi, atau disingkat menjadi DIME. Commander Jeff Farlin (2014:9), dalam "*Instruments of National Power: How America Earned Independence*" menyatakan bahwa memang suatu negara tidak harus unggul dalam setiap elemen DIME dalam upayanya mencapai tujuan dan kepentingan nasional mereka. Namun negara harus bisa mahir dalam mengelola setiap elemen kekuatan nasional ini secara sinergis untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Pemikiran mengenai DIME ini pertama kali dicetuskan oleh Amerika Serikat dan angkatan militernya. Pada tahun 1933 Edward Carr membagi kekuasaan politik internasional ke dalam tiga kategori: kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuasaan atas opini. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan angkatan bersenjatanya memperluas kategori-kategori tersebut dan mengembangkan skema empat elemen yang dikenal sebagai DIME (Worley, 2015:14). DIME membantu menjelaskan kekuatan nasional dengan mengatur aktivitas dan output nasional menjadi elemen-elemen diplomatik, informasi, militer dan ekonomi. (John, 2006:5-6). Elemen DIME berasal dari sumber daya suatu negara. Sumber daya dapat dianggap sebagai alam (yaitu sumber daya dan populasi) atau sosial (yaitu budaya, industri, politik, militer) (Jablonsky, 2004:53). Singkatnya, sumber daya suatu negara adalah input untuk elemen kekuatan nasional, sementara elemen

kekuatan nasional digabungkan dalam berbagai proporsi untuk membentuk dan mengartikulasikan kekuatan nasional (Khomko, 2019:21).

Sebagai elemen kekuatan nasional masing-masing elemen ini tidaklah berdiri sendiri. Keberadaan mereka itu saling mempengaruhi satu sama lain. Kekuatan militer yang kuat dapat memberikan *domino effect* kepada elemen lain. Dengan militer yang kuat negara memiliki daya tangkal atau *deterrence effect* (bersifat informasional) terhadap negara lain sehingga dapat menangkal ancaman dari luar. Karena ketika suatu negara (negara A) memiliki informasi bahwa negara tetangganya (Negara B) memiliki kekuatan tempur yang kuat, mereka (Negara A) relatif akan lebih berhati-hati (cenderung *defensif* ketimbang *offensif*) terhadap negara tetangga mereka itu (Negara B). Dengan kekuatan militer yang kuat sesungguhnya negara juga diuntungkan dalam bidang diplomasinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan militer yang kuat memberikan posisi tawar yang baik hampir di setiap meja perundingan saat penyelesaian konflik antar negara dilakukan. Sehingga dengan posisi tawar yang kuat ini stabilitas keamanan akan terjadi yang juga berpengaruh terhadap momentum kemajuan ekonomi. Momentum tercipta karena ketiadaan gangguan baik dari luar maupun dalam negeri sehingga stabilitas ekonomi dan pemerintahan (politik) terjadi.

### **2.1.3.1 Diplomasi**

Diplomasi menurut Oxford English Dictionary merupakan “*The Management of International relations by negotiation; the method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys; the business or art of the diplomat.*” Dengan kata lain diplomasi dapat diartikan sebagai sebuah seni dalam mengelola hubungan internasional menggunakan cara negosiasi, cara yang dilakukan dalam melakukan hubungan itu dilakukan serta diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakilnya seperti atase atau pun, utusan. Diplomasi pun bisa dipahami sebagai sebuah

bisnis ataupun seni dari para diplomat yang merupakan seni dari diplomasi itu sendiri.

Diplomasi di tingkat internasional adalah bentuk *soft power*, yang didefinisikan sebagai cara negara membujuk negara lain untuk melakukan apa yang mereka inginkan untuk dilakukan dalam mendukung kepentingan nasional mereka (Farlin, 2014:10). Dengan kata lain diplomasi bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional suatu bangsa. Sehingga bagi Indonesia diplomasi digunakan untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan dikenal sebagai cita-cita dan tujuan nasional.

Dalam perkembangannya diplomasi juga menunjukkan penyesuaian berdasarkan pola hubungan internasional yang terjadi dalam lingkungan strategis sehingga diplomasi modern muncul dan mencakup makna yang lebih luas dari diplomasi tradisional. Diplomasi modern melibatkan aktor-aktor baru selain negara, seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok bahkan individu (Barston, 2014:7). Diplomasi ekonomi dan diplomasi digital menjadi wujud diplomasi modern yang menjadi kebutuhan strategis menghadapi dinamika lingkungan strategis yang dipenuhi kompetisi ekonomi dan teknologi di era industri 4.0

### **2.1.3.2 Informasi**

Informasi sebagai elemen kekuatan nasional mengacu pada cara suatu negara menggunakan informasi untuk membentuk lingkungan global dalam jangka panjang dalam mendukung kepentingan nasional. Informasi, sering dikaitkan dengan intelijen, adalah sarana yang digunakan oleh negara-negara untuk memahami sifat kompleks hubungan internasional dan domestik (Farlin, 2014: 13). Ahli teori Cina kuno, Sun Tzu mendukung pentingnya mengetahui dan mengendalikan informasi. Dalam *The Art Of War*, Sun Tzu menyatakan, “Kenali musuh dan kenali dirimu sendiri. Maka dalam

seratus pertempuran anda tidak akan pernah berada dalam bahaya. Ketika anda tidak tahu apa-apa tentang musuh tetapi tahu diri anda, peluang anda untuk menang atau kalah adalah sama. Namun, jika anda mengabaikan musuh anda dan diri anda sendiri, maka bisa dipastikan dalam setiap pertempuran anda, anda akan berada dalam bahaya.” (Tzu,1963:84).

Berdasarkan pernyataan dari Master Sun Tzu ini, Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh siapapun yang sedang “berperang”. Misalkan Negara A sedang berperang ataupun berkompetisi dengan Negara B, maka kepemilikan informasi yang lengkap dan rinci mengenai kelemahan negara B merupakan sebuah keuntungan bagi Negara A. Kemudian, Negara A pun harus mampu mengidentifikasi keunggulan dan kelemahannya sendiri dan mampu memperbaiki kelemahan tersebut sebelum diketahui oleh negara B. Dengan bekal informasi kelemahan negara B, Negara A dapat mengalahkan negara B dengan lebih efektif dan efisien. Kepemilikan Informasi ini bisa didapat dengan cara formal (kerjasama pertukaran informasi atau diplomasi) atau bahkan dengan cara yang non-formal (penggunaan *cover intelejen* atau spionase).

### **2.1.3.3 Militer**

Elemen militer dari kekuatan nasional mewakili kekuatan militer suatu negara. Disebut sebagai "*hard power*" karena sifat kinetiknya, komponen militer dari DIME mungkin tampak sebagai langkah terakhir. Namun, hal ini tidak selalu terjadi, karena ancaman kredibilitas *hard power* saja bersama dengan elemen DIME lainnya (kadang-kadang dikenal sebagai "*smart power*") sering kali dapat memungkinkan suatu negara mencapai kepentingannya. (Farlin, 2014:22)

#### **2.1.3.4 Ekonomi**

Instrumen ekonomi kekuatan nasional tidak hanya berurusan dengan ketahanan ekonomi suatu negara, tetapi juga bagaimana ia mencoba menggunakan pengaruh ekonominya pada negara lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika Serikat, perekonomiannya yang kuat beserta aksesnya yang bebas ke pasar dan sumber daya global, menjadi mesin fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mendukung pertahanan nasional mereka. Pada arena internasional kekuatan ekonomi dan jaringan baik dengan negara dan perusahaan membuat sebuah negara dapat memberikan sanksi ekonomi seperti embargo, boikot ataupun penolakan atas komoditi dari sebuah negara. Keadaan tersebut tentu dapat membuat negara tertentu memikirkan tindakan yang akan mereka ambil dalam sebuah perundingan agar kemudian tidak dijatuhi sanksi ekonomi yang berdampak pada pendapatan negara mereka.

Masing-masing dari empat elemen DIME terdiri dari berbagai tingkat yang berbeda dalam kategorinya sendiri. Terkadang diplomasi terlihat seperti motor penggerak utama yang dapat menyelesaikan masalah. Namun diplomasi tidak bisa berdiri sendiri, dukungan elemen lainnya tetap dibutuhkan. Seperti halnya informasi yang selalu dibutuhkan untuk mendukung tiga elemen lainnya. Di lain pihak, interaksi ekonomi terjadi setiap hari antara sebagian besar negara dan dapat digunakan untuk memproyeksikan kekuasaan dengan cara yang berbeda, dan kadang-kadang tindakan militer diperlukan, meskipun ini tidak selalu berarti perang. Negara pada dasarnya sangat bisa menggunakan diplomasi untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan dengan negara lain atau bahkan dapat menggunakan diplomasi untuk menunjukkan ketegangan dalam hubungan dengan negara lainnya. Sedangkan interaksi ekonomi dapat berupa perdagangan dan kerjasama, bantuan pembangunan, atau sanksi.

Dan di sisi lain informasi bersifat *out-going*, dalam bentuk komunikasi, dan yang datang, dalam bentuk kecerdasan.

Pada akhirnya DIME sebagai satu kesatuan kekuatan nasional perlu digalang dan diarahkan untuk terbentuk sebagai aset kekuatan yang dapat digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam strategi yang ditetapkan. Dalam kaitan dengan penelitian ini, elemen DIME akan diuraikan sebagai wujud kekuatan dalam mengimplementasikan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang diarahkan untuk mendukung pertahanan negara, baik pertahanan militer maupun nirmiliter.

#### **2.1.4 Teori Kerja Sama Internasional**

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional sehingga tidak terlepas dari keterkaitan dengan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan juga diarahkan dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain, baik secara bilateral, regional maupun multilateral yang juga ditujukan untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Mekanisme kerja sama internasional menjadi jawaban atas kecenderungan akan kebutuhan peningkatan hubungan antar negara. Hal ini juga didasari pandangan bahwa semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya tanpa menjalin hubungan dengan negara lainnya yang pada akhirnya menumbuhkan saling ketergantungan (*inter-dependensi*).

Menurut Dougherty dan Pflatzgraff (1997:418), kerja sama adalah serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan sah secara hukum dan terjadi karena adanya penyesuaian perilaku para aktor sebagai konsekuensi dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang muncul dan diputuskan oleh aktor lain. Kerja sama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan, namun perundingan juga tidak perlu dilakukan lagi apabila masing-masing pihak telah saling memahami. Sedangkan menurut Holsti (1987: 651), kerja sama atau kolaborasi bermula

karena adanya masalah nasional, regional dan global yang beraneka ragam sehingga perlu dicermati oleh lebih dari satu negara di mana kemudian masing-masing negara dapat saling melakukan pendekatan atau menawarkan opsi penanggulangan masalah, tawar menawar, mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis yang dapat mendukung usulan yang diajukan hingga akhirnya berunding untuk menghasilkan suatu perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan semua pihak.

Kerja sama internasional menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara serta dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan agar kesepakatan dapat diimplementasikan secara baik, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi negara yang menjalin kerja sama. Selanjutnya kerja sama internasional didefinisikan oleh Holsti (1987:652-653) sebagai berikut:

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antara negara untuk memenuhi persetujuan mereka

Kerja sama internasional juga dilakukan dalam rangka pemenuhan kepentingan nasional suatu negara yang tidak dapat terpenuhi di dalam negerinya sendiri. Keuntungan bersama yang diraih melalui kerja sama akan menjadi isu utama yang perlu diprioritaskan dibandingkan mementingkan

tindakan unilateral dan kompetitif. Kerja sama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34). Sementara itu Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya “Órganisasi dan Administrasi Internasional” menyebutkan bahwa kerja sama internasional dapat dipahami sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masyarakat internasional. Kerja sama internasional terjadi karena adanya *national understanding* serta memiliki tujuan yang sama, keinginan yang didukung kondisi yang saling membutuhkan. Kerja sama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara negara-negara, namun kepentingan itu tidak identik (Kartasasmita, 1997:20).

Selanjutnya, menurut Smith dan Hocking (1990:222), kerja sama internasional memiliki tingkatan sebagai berikut:

- a. Konsensus; yaitu tingkatan kerja sama yang ditandai dengan sejumlah ketidakhirauan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi di antara negara-negara yang terlibat.
- b. Kolaborasi; yaitu tingkat kerja sama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai sebagian besar kesamaan tujuan, saling kerja sama aktif antara negara-negara yang menjalin hubungan kerja sama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
- c. Integrasi; yaitu kerja sama yang ditandai adanya kedekatan dan keharmonisan tinggi di antara negara-negara yang terlibat. Karena tingkat keharmonisan ini, sehingga dalam integrasi jarang ditemukan benturan kepentingan di antara negara-negara yang terlibat.

Lingkup aktivitas yang dilaksanakan melalui kerja sama internasional mencakup kerja sama yang multi dimensi, seperti kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan politik. Kerja sama ini umumnya difasilitasi dalam sebuah organisasi internasional yang menjadi wadah untuk memudahkan

anggotanya dalam menjalin kerja sama di berbagai bidang, baik politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya (Plano&Olton, 1979:271).

Menelaah teori-teori kerja sama internasional tersebut, maka dapat disintesis bahwa kerja sama internasional merupakan aktivitas yang menjadi keniscayaan di tengah interdependensi antar negara yang disepakati oleh negara-negara dalam suatu organisasi internasional dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan masing-masing yang dapat dipertemukan dalam perjanjian atau kesepakatan kerja sama. Penelitian ini juga akan menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam kerangka Indo-Pasifik sebagai bagian dari strategi yang perlu dioptimalkan oleh Indonesia dalam mendukung kebijakan pertahanan negara untuk mendukung terwujudnya visi Poros Maritim Dunia.

### **2.1.5 Teori Perang Semesta**

Perang semesta merupakan sebuah konsep sistem pertahanan negara republik Indonesia yang merujuk pada pendayagunaan berbagai hal yang dimiliki oleh bangsa dalam upaya membela dan mempertahankan tanah air dari ancaman serta serangan musuh. Konsep ini juga sering disebut sebagai perang rakyat semesta. Pada tataran sistem pertahanan negara, perang rakyat semesta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertahanan semesta, yang merupakan doktrin pertahanan dan keamanan negara.

Sebagaimana dijelaskan dalam Doktrin Pertahanan Negara (2015:75-6), Sistem Pertahanan Negara Indonesia itu diselenggarakan dalam suatu sistem yang disebut sebagai sistem pertahanan semesta. Di mana bentuk pertahanan yang dikembangkan dalam sistem ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah beserta segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional. Pemerintah mempersiapkan seluruh hal tersebut secara dini dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk kedaulatan

negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa Indonesia dari segala bentuk ancaman. Kesemestaan dalam sistem ini merujuk pada padupadan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam kerangka membangun kekuatan serta kemampuan pertahanan yang disegani berikut dengan kemampuan daya tangkal yang tinggi.

Lebih lanjut Doktrin Pertahanan Negara (2015:76) juga menyatakan bahwa Perang rakyat semesta itu diselenggarakan berdasarkan pada unsur kekuatan, perwujudan kemampuan dan sarana perjuangan. Tatanan unsur kekuatan ini merujuk kepada upaya yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah dibawah satuan komando dan strategi sehingga menjadi satu totalitas perjuangan. Sedangkan perwujudan kemampuan berarti perlawanan bersenjata yang berintikan TNI, yang juga di dukung oleh perlawanan tidak bersenjata yang berintikan kesemestaan untuk menghadapi setiap kekuatan asing yang menyerang dan menduduki sebagian atau bahkan seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, sarana perjuangan bangsa menumpukan diri pada kekuatan rakyat yang dipersenjatai secara psikis dengan semangat perjuangan dan secara fisik dengan kemampuan bela negara.

Persenjataan secara psikis ini merujuk pada usaha pemerintah dalam menanamkan kecintaan rakyat terhadap tanah airnya, sehingga memiliki daya juang serta semangat untuk mempertahankan NKRI. Bentuk berikutnya adalah upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara satu, dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dan bingkai semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Upaya berikutnya adalah membangun kesadaran serta tanggung jawab rakyat akan hak dan kewajiban mereka dalam usaha pembelaan negara. Bahwa seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam usaha pembelaan negara Republik Indonesia. Hal terakhir yang tidak kalah penting dalam usaha pembangunan “senjata

psikis” ini adalah upaya negara dalam melengkapi rakyatnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai wujud dari sistem senjata sosial.

Persenjataan secara fisik merujuk pada upaya negara dalam memberikan bekal keterampilan fisik kepada rakyatnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dasar kemiliteran bagi mereka yang dipersiapkan untuk menjadi Komponen Cadangan. Pelatihan ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan, termasuk dalam penggunaan senjata dan penguasaan taktik serta strategi tempur. Komponen Cadangan akan ditopang pula oleh komponen pendukung sesuai dengan segmen dalam pertahanan negara.

Dalam lintasan sejarah Indonesia, sistem perang semesta atau perang rakyat semesta disandingkan dengan pengertian perang gerilya yang di jabarkan oleh Jenderal A.H. Nasution. Melalui *magnum opus* nya “Pokok-pokok Gerilya” yang telah menjadi buku wajib di berbagai sekolah elit militer dunia, Jenderal A.H Nasution menyatakan sebagai berikut:

Perang Gerilya adalah Perang si kecil/si lemah melawan si besar/si kuat. Perang Gerilya tidak dapat secara sendiri membawa kemenangan terakhir, perang gerilya hanya untuk memeras darah musuh. Kemenangan terakhir hanyalah dapat dengan tentara yg teratur dalam perang biasa, karena hanya tentara demikianlah yang dapat melakukan offensif yg dapat menaklukkan musuh. Perang Gerilya biasanya adalah perang ideologi. **Perang Gerilya adalah perang rakyat semesta. Akan tetapi Perang gerilya tidak berarti bahwa seluruh rakyat bertempur, perang gerilya adalah perang rakyat semesta, perang militer, politik, sosial-ekonomi dan psikologis.** (Pusat Sejarah TNI, 2014)

Secara bernas Jenderal AH Nasution dalam bukunya itu menegaskan bahwa peperangan abad ini merupakan perang rakyat semesta. Peperangan tidak lagi hanya melibatkan angkatan bersenjata dua entitas yang berperang. Peperangan telah meluas dan menjadi lebih dalam karena perkembangan teknologi dan informasi serta kemajuan teknik. Peperangan saat ini dan di

era mendatang menurutnya meminta kesemestaan, di mana seluruh komponen bangsa dapat diolah guna mencapai kemenangan. Bahkan seluruh sumber yang tersedia harus bisa didayagunakan.

Jenderal AH Nasution juga menyatakan bahwa untuk mengalahkan bangsa lawan, yang perlu dilakukan tidak hanya membinasakan angkatan bersenjata lawan saja. Namun juga harus mampu membinasakan semua susunan dan lembaga politik, sosial serta ekonominya. Hal inilah yang kemudian membuat perang di era sekarang tidak hanya bergolak di sektor militer semata, namun juga di sektor politik, psikologis, dan sosial-ekonomis. Dengan demikian sifat serangan adalah serangan semesta. Untuk dapat membendung hal tersebut, pihak yang diserang dengan kesemestaan harus menggunakan pertahanan rakyat semesta.

Penjabaran diatas kurang lebih sejalan dengan yang dinyatakan dalam Doktrin Pertahanan Negara (2015: 77-78). Dalam menghadapi Perang Rakyat Semesta dalam bentuk perang yang berlarut, terdapat lima hal yang harus di bangun dan dijaga yakni terkait dengan sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem teknologi dan juga sistem pertahanan. Pembangunan dan penjagaan sistem politik diarahkan kepada menjaga dan memelihara ideologi bangsa, Pancasila sebagai dasar falsafah seluruh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan juga berbangsa. Termasuk juga ddalamnya menjadikan Pancasila sebagai dasar perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu dalam sistem politik ini hal yang juga penting adalah upaya menjamin keutuhan, persatuan serta kesatuan bangsa dan kelangsungan perjuangan bangsa dalam upaya mencapai cita-cita bangsa yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 serta kepentingan nasional Bangsa Indonesia.

Pembangunan dan penjagaan sistem sosial budaya Indonesia tetap mengacu kepada kehidupan masyarakat yang produktif dan kompetitif. Hal-hal ini dilandasi oleh nilai serta semangat perjuangan, kerja keras untuk

mengejar kemajuan bangsa dan juga kedisiplinan yang tinggi, sehingga kemudian dapat menghasilkan masyarakat Indonesia yang memiliki daya saing mumpuni dan juga tangguh. Sementara itu pembangunan dan penjagaan sistem ekonomi Indonesia lebih diorientasikan supaya mampu menopang perjuangan bangsa secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan membangun struktur ekonomi yang kuat, mandiri serta memiliki daya saing yang tinggi dengan tidak melupakan sistem distribusi yang menjangkau seluruh wilayah tanah air.

Pembangunan dan penjagaan sistem teknologi dilakukan untuk memacu pertumbuhan industri nasional dalam mewujudkan kemandirian yang menghasilkan berbagai produk guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga kebutuhan pertahanan negara. Sedangkan sistem pertahanan dibangun dan dikembangkan untuk dapat menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan negara serta keutuhan wilayah NKRI. Sistem pertahanan memerlukan peran TNI yang profesional dan tangguh dengan dukungan seluruh rakyat dalam sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dan berdaya tangkal tinggi.

Sementara itu Letjen TNI (Purn) J. Suryo Prabowo (2009:19-30) dalam bukunya yang berjudul “Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang Semesta” menyatakan bahwa sesungguhnya Perang Semesta saat ini berada pada lingkup perang generasi keempat (4GW). Menurut Darlis (2019:159-160) perang generasi keempat atau *Fourth Generation Warfare* adalah:

... jenis perang yang menggunakan semua jaringan yang tersedia (politik, ekonomi, sosial, dan militer- untuk meyakinkan pembuat keputusan politik lawan bahwa tujuan strategi mereka tidak dapat dicapai atau terlalu mahal untuk diwujudkan. Hal ini merupakan pengembangan dari bentuk pemberontakan. Berakar pada persepsi fundamental bahwa keinginan politik seorang pemimpin dapat mengalahkan kekuatan militer dan ekonomi yang kuat, menggunakan jaringan masyarakat untuk

menlanjutkan pertempurannya. Tidak seperti peperangan sebelumnya perang ini tidak menjoba untuk mengalahkan pasukan militer musuh, namun melalui jaringan yang secara langsung menyerang pikiran pemimpin lawan untuk menghancurkan keinginan politik musuh. Perang generasi keempat ini merupakan konsep yang sangat berbeda dengan perang yang sangat singkat dan intensif yang direncanakan pemerintah AS dan hal tersebut menjadi terkenal karena dideklarasikannya akhir pertempuran besar pada tanggal 1 Mei 2003. (Darlis, 2009:159-160)

Jenderal Suryo Prabowo menjatakan bahwa perang semesta dikategorikan sebagai perang generasi keempat kerana sifatnya yang asimetris dan non linier. Perang semesta era sekarang juga dipandang lebih bersifat non-konvensional dibandingkan konvensional. Hal ini disebabkan karena perang ini lebih banyak memanfaatkan elemen-elemen non-militer dalam upayanya mencapai kemenangan. Perang semesta ini pun menurut Prabowo tidak bisa disamakan dengan pengertian *total war*.

Menurut Suryo Prabowo (2009:64-5) perang semesta dan *total war* memiliki makna yang berbeda. Perang semesta memiliki lingkup yang lebih besar dari sekadar *total war* yang dapat diartikan sebagai rangkaian pertempuran bersenjata yang masif serta melibatkan banyak negara di dalamnya. Perbedaan berikutnya adalah *total war* memiliki motif politik kemanusiaan, ekonomi dan perbatasan, sementara perang semesta cenderung digerakkan oleh motif kemerdekaan, revolusi, kedaulatan wilayah dan melawan insurjensi.

### **Mobilisasi total**

Karena sifat kesemestaannya, perang semesta memungkinkan adanya mobilisasi total, sebagaimana dijabarkan dalam Doktrin Pertahanan Negara (2015: 79-80). Mobilisasi dalam Pasal 1 ayat (2) UU RI Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi disebutkan sebagai tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya

nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan persiapan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Mobilisasi total di Indonesia selanjutnya diterapkan melalui persiapan seluruh sumber daya nasional melalui pelatihan kader bela negara, baik melalui pelatihan militer maupun berdasarkan profesi masing-masing. Selain itu, seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana juga dimobilisasi dalam menangani ancaman negara. Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan program bela negara berdasarkan bunyi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yakni setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara.

### ***Total Control dan Kepemimpinan***

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Perang Rakyat Semesta diselenggarakan berdasarkan pada tatanan unsur kekuatan dan juga perwujudan kemampuan. Dua hal ini sesungguhnya menegaskan bentuk *total control*. Karena tatanan unsur kekuatan ini merujuk kepada upaya yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan terarah di bawah satuan komando dan strategi sehingga merupakan satu totalitas perjuangan. Sedangkan perwujudan kemampuan berarti perlawanan bersenjata yang berintikan TNI, yang juga didukung oleh perlawanan tidak bersenjata yang berintikan kesemestaan (Doktrin Pertahanan Negara, 2015:76).

Dengan demikian, dapat dipahami pula bahwa *total control* terletak pada kesatuan komando dan strategi yang dijalankan oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya untuk mewujudkan sebuah totalitas perjuangan. TNI menjadi inti perjuangan dan dibantu oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam satu sistem yang bernaung di bawah satu komando tertinggi. Perjuangan yang dilaksanakan terdiversifikasi ke dalam

beberapa bidang sistem (politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pertahanan) namun ditujukan untuk satu tujuan, yakni upaya menjaga persatuan, kesatuan, kedaulatan wilayah NKRI dari berbagai ancaman. Dalam *total control* ini pula terlihat pentingnya kepemimpinan dalam perang rakyat semesta.

Kepemimpinan yang paling penting tidak hanya terletak pada komando tertingginya saja yang memegang strategi kesemestaan. Jiwa kepemimpinan juga dibutuhkan di setiap lini perjuangan pada setiap komponen yang terlibat, baik pada Komponen Utama yang termanifestasi dalam garis komando TNI, maupun Komponen Cadangan serta Komponen Pendukung yang harus terwujud melalui garis komando pada garda bangsa dan kepemimpinan tenaga ahli/profesi yang dibutuhkan.

### **Nasionalisme**

Dalam Perang Rakyat semesta Nasionalisme merupakan salah satu nilai fundamental yang dibangun untuk “mengajak rakyat ikut berperang”. Sebagaimana dijelaskan dalam Doktrin Pertahanan Negara (2015:76-7) bahwa penyelenggaraan Perang Rakyat semesta salah satunya didasarkan pada sarana perjuangan, yang mengandalkan kekuatan rakyat dengan bekal persenjataan secara psikis melalui semangat perjuangan dan secara fisik melalui kemampuan bela negara.

Dipersenjatai secara psikis termanifestasi dalam langkah menanamkan kecintaan kepada tanah air yang bertujuan mempertahankan NKRI, menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penjabaran dari sistem senjata sosial (Doktrin Pertahanan Negara, 2015:77).

Penjabaran mengenai senjata secara psikis ini merujuk pada penumbuhan semangat nasionalisme dan jiwa patriotism dari rakyat sehingga mereka mau berjuang bersama untuk membela negaranya. Hal ini senada dengan upaya pembangunan nasionalisme rakyat melalui penanaman nilai-nilai dasar bela negara, yakni: cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Pada akhirnya seluruh aspek dalam konsep Perang Semesta akan diperlukan dalam implementasi pertahanan militer dan nirmiliter untuk lebih diarahkan dalam prioritas strategi kerja sama Indo-Pasifik guna mendukung pertahanan negara.

### **2.1.5 Konsep Pertahanan Negara**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pada Pasal 1, angka 1 menyatakan bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara 2015-2019, pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan, yang diselenggarakan melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional termasuk sarana prasarana nasional dan dilaksanakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Dalam menghadapi tantangan dan ancaman yang muncul sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis, diperlukan sistem pengelolaan

dan penyelenggaraan pertahanan negara melalui Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta). Sishanta ini melibatkan seluruh sumber daya nasional, warga negara, dan wilayah Indonesia lainnya yang dipersiapkan Pemerintah secara dini dan diselenggarakan secara terpadu, total, terarah serta berlanjut demi keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, menegakkan kedaulatan negara serta menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia. Hal ini senada dengan Lampiran Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa dalam rangka mempersiapkan pertahanan negara yang memiliki kemampuan merespon berbagai ancaman, Presiden selaku penyelenggara fungsi pemerintahan menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara merupakan suatu usaha untuk membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman. Dalam menghadapi ancaman militer, sistem pertahanan negara menempatkan TNI sebagai Komponen Utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Sementara itu dalam menghadapi ancaman non militer, sistem pertahanan negara menempatkan kementerian/ lembaga di luar pertahanan sebagai Unsur Utama yang kemudian juga dibantu oleh Unsur Lain Kekuatan Bangsa.

Strategi Pertahanan Negara (2015:3) menyatakan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara kemudian diformulasikan dalam strategi pertahanan negara berdasarkan kekhasan serta kondisi geografi sebagai negara kepulauan bercirikan nusantara. Berdasarkan rangkaian penjelasan tersebut, maka dapat disintesis pertahanan negara adalah segala usaha guna mempertahankan keselamatan segenap bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan negara dalam menghadapi segala bentuk gangguan dan ancaman. Hal ini dilakukan

dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan, yang secara geografis berada pada posisi persilangan antara dua benua dan dua samudera. Kemudian, pertahanan negara Indonesia dibangun dalam sebuah sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya. Keterlibatan setiap warga negara didasari atas kecintaan kepada tanah airnya yang diorientasikan terhadap cita-cita bersama dalam mewujudkan kepentingan nasional, termasuk kebijakan pemerintah terkait konsep Poros Maritim Dunia yang di dalamnya memuat pertahanan maritim (Buku Putih Pertahanan:2-3).

#### **2.1.6 Konsep Poros Maritim Dunia**

Menurut Limbong (2015:27), poros maritim merupakan suatu konsep yang lahir dari kondisi fisik bangsa Indonesia di mana sebagian besar wilayahnya berupa laut. Poros maritim selalu seiring dan sejalan dengan realitas kondisi geografis, geostrategis, dan geoekonomi bangsa Indonesia yang saling mempengaruhi dinamika di Samudera Hindia dan Pasifik (Indo-Pasifik). Poros maritim berkonsekuensi terhadap pemanfaatan potensi kelautan seperti industri perikanan, eksplorasi sumber daya kelautan, galangan kapal, pembangkit energi, kota-kota dan permukiman nelayan, pariwisata bahari, pusat-pusat penelitian yang selama ini masih belum optimal untuk dikembangkan. Konsep poros maritim mengandung makna sebagai upaya menjadikan sumber daya maritim sebagai titik sentral pertahanan dan ekonomi.

Poros Maritim Dunia (PMD) menjadi kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak terpilih menjadi Presiden ke-7 RI dalam Pemilu 2014. Kebijakan ini berakar dari keinginan dan tekad kuat untuk mengembalikan kejayaan dan jati diri Indonesia sebagai negara maritim dengan menekankan pada pembangunan sektor kemaritiman di berbagai

aspek. Pembangunan di sektor kemaritiman sendiri tidak akan terlepas dari tantangan keamanan maritim yang berimplikasi kuat terhadap pembangunan pertahanan. Perairan Indonesia yang seluas dua pertiga kawasan maritim Asia Tenggara akan menjadi kunci stabilisator kawasan. Situasi keamanan maritim di perairan yurisdiksi Indonesia dapat dijadikan barometer bagi situasi keamanan maritim di Asia Pasifik (Marsetio, 2013:5).

Dalam menjalankan strategi untuk mewujudkan visi PMD, pemerintah perlu menerapkan prinsip menjadi lebih *outward-looking*. Dalam kaitan inilah Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai penyeimbang di antara kekuatan-kekuatan besar lain di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik seperti India, AS, Tiongkok melalui konsep *middle-power* atau kekuatan menengah terkemuka di Indo-Pasifik (Kurlantzick, 2014:17).

Menurut Untung Suropati, Ian Montratama, dan Yohanes Sulaiman (2018: 150) dalam "*Indonesia Inc.: Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*", pada tataran kebijakan publik PMD selayaknya dapat dijadikan sebagai strategi geopolitik Indonesia yang berisikan tujuan, sasaran dan juga cara (*ends, means and ways*). Lebih lanjut, tujuan utamanya dapat diarahkan pada upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang makmur, besar dan disegani. PMD ini kemudian menyasar seluruh kemampuan dan sumber daya yang telah dimiliki dan juga diupayakan untuk dimiliki. Sedangkan cara yang dilakukan adalah melalui serangkaian kebijakan pemerintah.

Pembangunan geostrategi pada PMD difokuskan kepada optimalisasi penguasaan serta pemanfaatan aspek letak geografi Indonesia yang strategis yang kemudian dihadapkan pada jalur perlintasan perdagangan dunia; termasuk juga kelimpahan sumber daya alam di wilayah Indonesia. Lebih lanjut, ketika dua faktor ini telah ditekankan, maka salah satu indikasi penilaian apakah hal tersebut tercapai dengan baik atau tidak adalah dengan terbangunnya *global transshipment port* di wilayah Indonesia yang mampu

bersaing sebagai pelabuhan kelas dunia, setidaknya-tidaknya berada pada urutan ke-30 dunia.

Sementara itu indikasi keberhasilan dalam pendekatan geostrategi PMD pada bidang keamanan bisa dilihat dari kemampuan Indonesia dalam membangun postur pertahanan maritim dengan daya tangkal yang efektif. Untuk mengukur daya tangkal ini, setidaknya-tidaknya Indonesia selayaknya mampu memiliki jumlah armada kapal perang selam terbanyak kesepuluh di dunia, memiliki jumlah armada pesawat tempur terbesar kesepuluh di dunia dan memiliki jumlah armada kapal patroli terbesar kelima di dunia. Standar kelayakan ini mungkin terkesan bombastis, sehingga masih diperlukan kajian lebih lanjut. Namun dalam upaya mengembangkan diri, setidaknya sebuah target telah dipasang dan diupayakan secara bertahap untuk diwujudkan (Suropati et al.,2018:156-157).

## **2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini, peneliti akan merujuk beberapa penelitian terdahulu yang dinilai relevan dengan penelitian ini. Terdapat empat penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini. Penjabaran empat penelitian terdahulu secara lebih rinci, termasuk yang berkaitan dengan persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Penelitian yang dilakukan oleh Ian Monratama pada tahun 2016 dengan judul “Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad Ke-21”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Monratama menggunakan beberapa teori dan konsep dalam penelitian ini antara lain, teori analisa lingkungan strategis, konsep Indo-Pasifik, konsep politik luar negeri Indonesia, dan juga konsep Poros Maritim Dunia. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam *Intermestic, Journal of International Studies*, Vo. 1, No

1, November 2016. Tulisan ini mengulas tentang politik luar negeri dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis abad 21 yang bertitik berat pada kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam konteks ini seharusnya dimainkan Pemerintah Indonesia sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia. Indonesia perlu memanfaatkan *alignment* dengan AS, Cina, dalam ASEAN dan *middle powers*, untuk kepentingan keamanan dan kesejahteraan bangsa. Dengan memiliki kemitraan strategis dengan hegemon, Indonesia akan mendapat banyak manfaat politis.

Penelitian Ian Montratama memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini. Pertama pendekatan penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua tema besar penelitian sama-sama berfokus pada kawasan Indo-Pasifik dengan keadaan lingkungan strategis yang diwarnai kompetisi antar negara-negara besar dalam upaya memperebutkan pengaruh dan hegemoninya. Ketiga penelitian Ian Montratama juga dijadikan rujukan dalam penggunaan teori serta konsep dalam penelitian ini, di antaranya konsep Poros Maritim Dunia serta konsep Indo-Pasifik. Perbedaan mendasar dari penelitian Ian Montratama dengan penelitian ini adalah fokus permasalahan yang diangkat. Ian Montratama menitik beratkan pada rekonstruksi kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia sementara penelitian ini lebih menekankan pada strategi kerjasama Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia untuk mendukung kebijakan pertahanan Negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Poltak Partogi Nainggolan dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI (2015) berjudul Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian bersifat deskriptif-analitis ini meninjau berbagai tanggapan dan reaksi negara-negara lain dalam menyikapi kebijakan Poros Maritim Dunia dan secara spesifik mengulas perspektif politik dan keamanan antar negara. Tiongkok, AS dan Jepang menjadi subyek penting selain ASEAN, karena merupakan pemain

utama dalam hubungan internasional dan perebutan pengaruh (hegemoni) di kawasan dengan persaingan yang semakin sengit sehingga berdampak pada munculnya instabilitas politik dan keamanan. Peneliti akan menggunakan pendekatan yang sama dalam penggunaan metodologinya, yaitu kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Demikian pula pendekatan persepsi lingkungan strategis sebagai salah satu teorinya. Perbedaannya adalah pada objek analisisnya yang lebih spesifik pada tesis ini mengenai strategi kerja sama Indo-Pasifik untuk mendukung pertahanan negara ditinjau dari perspektif Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Joseph Tertia dan Anak Agung Banyu Perwita (2016) berjudul *Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges and Prospects*. Penelitian ini menekankan pentingnya aspek keamanan maritim dalam pembentukan arsitektur keamanan kawasan di Indo-Pasifik. Itulah sebabnya banyak negara yang menggunakan kerangka kerja sama keamanan maritim dalam menerjemahkan pendekatan kekuatannya di kawasan Indo-Pasifik. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa kerja sama komprehensif di bidang keamanan maritim menjadi sebuah kebutuhan bagi kawasan Indo-Pasifik yang kini menjelma sebagai pusat aktivitas ekonomi global. Strategi '*Free and Open Indo-Pacific*' yang tengah diartikulasikan oleh *quadrilateral* Australia, India, Jepang dan AS perlu disikapi dengan seksama mengingat kecenderungan kompetisi kekuatan ke-4 negara tersebut *vis a vis* ekspansi maritim Cina. Penelitian Joseph Tertia dan Banyu Perwita memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini. Pertama pendekatan penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Kedua, tema besar penelitian sama-sama berfokus pada kawasan Indo-Pasifik dengan keadaan lingkungan strategis yang diwarnai kompetisi antar negara-negara besar dalam upaya memperebutkan pengaruh dan hegemoninya. Perbedaan mendasar dari penelitian Joseph Tertia dan Banyu Perwita dengan penelitian ini adalah fokus permasalahan yang diangkat.

Joseph Tertia dan Banyu Perwita menitik beratkan pada analisa kemungkinan tantangan serta prospek dari keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik, sementara penelitian ini menekankan kepada analisis strategi kerjasama Indo-Pasifik untuk mendukung pertahanan negara dari perspektif Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Sony Iriawan (2018) berjudul “Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan”. Hasil Penelitian ini dipublikasikan pada sebuah jurnal, Mandala: Jurnal Hubungan Internasional, Vol 1. No. 2 Juli-Desember 2018. Penelitian ini mengelaborasi beberapa konsep serta teori dalam upayanya menganalisis diskursus Indo-Pasifik, antara lain: teori geopolitik, teori hegemoni, konsep Indo-Pasifik Amerika Serikat, konsep analisa lingkungan strategis, dan konsep *Balance of Power*. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Diakhir penelitian ditemukan simpulan bahwa dibawah inisiatif AS, maka dapat dikatakan agenda utama yang tersimpan dibalik diskursus Indo-Pasifik adalah upaya reformasi serta penguatan kembali hegemoni AS dari Cina dengan mengusung konsep “*Free & Open Indo-Pacific*”. Dalam aspek geopolitik, maka diskursus Indo-Pasifik didalamnya juga tidak akan terlepas dari persaingan strategis, benturan kepentingan hingga perluasan serta penguasaan atas geografis sebagai basis kekuatan AS. Skema *balance of power* tentunya tidak dapat dipisahkan dari transformasi geopolitik Indo-Pasifik.

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pertama adalah kesamaan pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Kedua, adanya kesamaan dalam tema besar penelitian mengenai tantangan yang terdapat di kawasan Indo-Pasifik yang dapat memicu terjadinya transformasi geopolitik di kawasan. Ketiga, penelitian ini dijadikan rujukan dalam penggunaan teori

geopolitik, serta analisa lingkungan strategis serta acuan pembandingan antara konsep Indo-pasifik yang diusung Amerika Serikat melalui *FOIP (Free & Open Indo-Pacific)* dengan konsep *Indo-Pacific Outlook* yang diusulkan Indonesia melalui ASEAN. Sementara itu perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Iriawan dengan penelitian ini adalah pada fokus pembahasan penelitian. Iriawan menitik beratkan pada pembahasan diskursus indo-pasifik yang dihadapkan pada upaya hegemoni Amerika Serikat dan persaingan negara-negara di kawasan sehingga berujung pada transformasi geopolitik kawasan, sementara penelitian ini lebih berfokus kepada analisa strategi kerjasama Indo-Pasifik untuk mendukung pertahanan negara dari perspektif Indonesia.

**Tabel 2.2 Matriks Perbandingan Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ilan Montratama	Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di tengah dinamika lingkungan Strategis Indo-Pasifik abad ke-21	a) Pendekatan penelitian kualitatif b) Fokus Penelitian: mengenai Kawasan Indo Pasifik c) Penggunaan Konsep PMD dan konsep Indo Pasifik	menitik beratkan pada rekonstruksi kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia sementara penelitian ini lebih menekankan pada strategi kerjasama Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia untuk mendukung kebijakan pertahanan Negara.
2	Poltak Partogi Nainggolan	Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasional	a) Pendekatan penelitian kualitatif b) Fokus penelitian: perspektif keamanan kawasan berdasarkan	Fokus penelitian diarahkan pada tanggapan dan reaksi negara-negara lain dalam menyikapi kebijakan Poros Maritim Dunia dan secara spesifik mengulas perspektif politik dan

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		nya.	perkembangan lingkungan strategis	keamanan antar negara
3	Joseph Tertia dan Anak Agung Banyu Perwita	<i>Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges and Prospects</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>b) Fokus Penelitian menitikberatkan tantangan di kawasan Indo-Pasifik yaitu kompetisi negara-negara besar dalam memperebutkan pengaruh dan hegemoninya masing-masing</li> <li>c) Penggunaan konsep Indo-Pasifik.</li> </ul>	Fokus permasalahan yang diangkat menitik beratkan pada analisis kemungkinan tantangan serta prospek dari keamanan maritim di kawasan Indo-Pasifik, sementara penelitian ini lebih menekankan kepada Analisa Strategi kerjasama Indo-Pasifik untuk mendukung pertahanan negara, dari Perspektif Indonesia
4	Sonny Iriawan	Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pendekatan penelitian kualitatif</li> <li>b) Fokus Penelitian menitikberatkan tantangan di kawasan Indo-Pasifik yaitu upaya hegemoni Amerika Serikat dan persaingan strategis negara-negara lain di kawasan yang memicu terjadinya transformasi</li> </ul>	Fokus pembahasan penelitian menitik beratkan pada pembahasan diskursus Indo-Pasifik yang dihadapkan pada upaya hegemoni Amerika Serikat dan persaingan negara-negara di kawasan sehingga berujung pada transformasi geopolitik kawasan, sementara penelitian ini lebih berfokus kepada Analisa Strategi kerjasama Indo-Pasifik untuk mendukung pertahanan negara, dari

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
			geopolitik kawasan c) teori geostrategi serta acuan pembandingan antara konsep Indo-pasifik yang diusung Amerika Serikat melalui <i>FOIP (Free &amp; Open Indo-Pacific)</i> dengan Konsep <i>Indo-Pacific Outlook</i> yang diusulkan Indonesia melalui ASEAN.	Perspektif Indonesia.

Sumber: Diolah oleh peneliti 2019

### 2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori dan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti mewujudkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

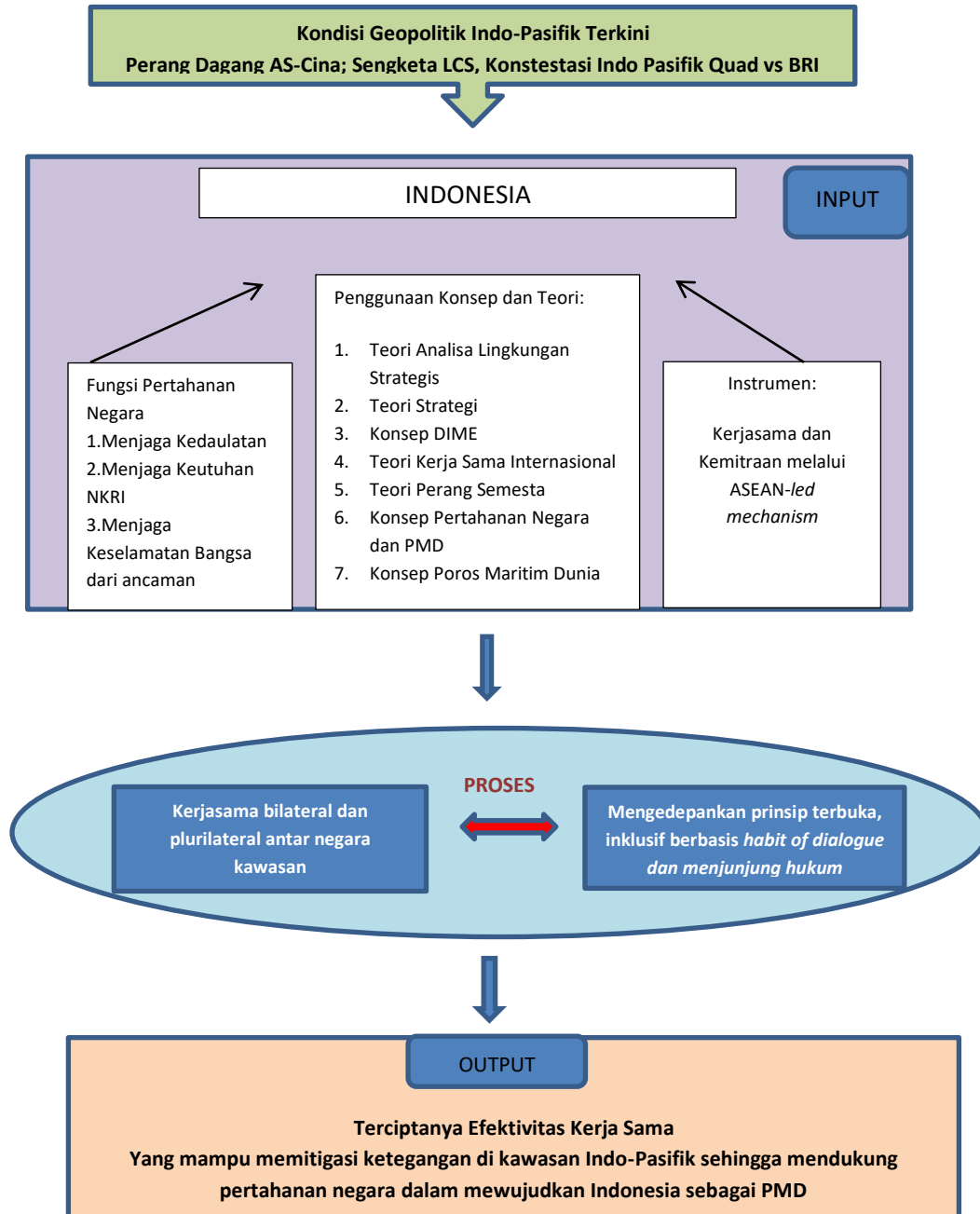
Dinamika lingkungan strategis Indo-Pasifik menuntut sebuah kesiapan dalam memetakan kemungkinan ancaman dalam upaya membentuk pertahanan negara yang mumpuni. Tak dapat dipungkiri bahwa beberapa fenomena telah menjadi sumber dinamika di kawasan Indo-Pasifik ini seperti sengketa Laut Cina Selatan antara Cina dan beberapa negara ASEAN serta perang dagang antara AS dan Cina. Situasi makin tidak kondusif dengan adanya rivalitas yang semakin tajam antara *major powers* dalam upaya mereka memperoleh kuasa pengaruh di kawasan Indo-Pasifik. Terlebih lagi adanya kesan *head to head* antara konsep *Free and Open Indo*

*Pacific* yang diusung oleh Amerika Serikat dan *Quadilateral nya* (AS, India, Australia, Jepang) dengan konsep *Belt and Road Initiatives* dari China juga membawa perseteruan di tataran konseptual.

Menyadari situasi lingkungan strategis yang sedemikian rupa, Indonesia, sebagai negara sentral dalam ASEAN yang juga menjadi poros utama dalam Kawasan Indo-Pasifik, perlu memetakan ancaman, peluang dan tantangan yang muncul di kawasan tersebut. Sehingga penelitian ini bermaksud menitik beratkan kepada strategi kerja sama Indo-Pasifik untuk mendukung kebijakan pertahanan negara dari perspektif Indonesia. Upaya menajamkan fokus ini, peneliti menetapkan dua pertanyaan penelitian yakni: Pertama, bagaimana dampak lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik terhadap pertahanan negara?, Kedua, bagaimana optimalisasi strategi kerja sama Indo-Pasifik untuk mendukung kebijakan pertahanan ditinjau dari perspektif Indonesia? sementara itu, dalam rangka menjalankan penelitian ini pua peneliti telah menentukan sebuah metode penelitian yang mencakup: penetapan sumber data, subyek/objek data, pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara, tata cara analisa data, reduksi data dan juga penyajian data.

Tahapan-tahapan tersebut diharapkan dapat merealisasikan terbentuknya optimalisasi strategi kerja sama Indo-Pasifik yang efektif dalam mendukung pertahanan negara, melalui elaborasi pemikiran dari penelitian-penelitian terdahulu serta konsep dan teori yang dipergunakan. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian antara lain: a). penelitian Ian Montratama berjudul *Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di tengah dinamika lingkungan Strategis Indo-Pasifik abad ke-21*; b). Penelitian Poltak Partogi Nainggolan berjudul *Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya*; c). Penelitian Joseph Tertia & Anak Agung Banyu Perwita berjudul *Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges and Prospects*; dan d). Penelitian Agung Sony

Iriawan berjudul *Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, hingga Transformasi Geopolitik Kawasan*. Sementara itu, konsep dan teori yang dipergunakan antara lain: Teori Analisis lingkungan strategis, Teori Strategi, Konsep DIME, Teori Kerja Sama Internasional, Teori Perang Semesta, Konsep Pertahanan Negara, dan Konsep Poros Maritim Dunia. Sehingga *output* yang diharapkan dari keseluruhan proses penelitian ini adalah terwujudnya kerjasama efektif berbasis strategi Indo-Pasifik yang diusung Indonesia di tingkat ASEAN untuk mendukung pertahanan negara menuju poros maritim dunia. Penggambaran deskripsi kerangka pemikiran ini dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2.1 tentang Alur Kerangka Pemikiran berikut ini.



Gambar 2.1 Alur Pemikiran Penelitian atau Kerangka

Sumber: Hasil olah Peneliti, 2019

## **BAB 3 METODE PENELITIAN**

### **3.1 Metode dan Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung data kuantitatif. Selanjutnya penelitian juga akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang ditampilkan dalam bentuk tabulasi/ tabel. Penelitian kualitatif dapat merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Sutinah, 2011:166).

Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen penting untuk mengelaborasi kemampuannya dalam mewawancarai sekaligus mengamati. Dalam proses ini peneliti akan mengumpulkan data yang khas tentang permasalahan yang ditelitinya. Pendirian dalam metode kualitatif adalah peneliti harus turut melibatkan diri dalam kehidupan subyek. Peneliti tidak boleh turut hanyut dalam arti terpengaruh oleh subyek dan perspektif mereka. Subyek tidak boleh sekali-kali divonis sebagai 'salah', 'benar', 'buruk' dan sebagainya, karena yang dicari peneliti bukan soal kebenaran atau hal yang bersifat moralis, tetapi pemahaman dan pengertian.

Metode deskriptif merupakan penelitian yang memberikan penjelasan atas suatu keadaan secara komprehensif tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Penelitian deskriptif menggunakan survey untuk mengumpulkan data, survey dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk selanjutnya dijadikan sebagai contoh (*sample*). Informasi didapat dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang sudah disiapkan, baik kepada perorangan maupun kelompok (Kountur, 2003:54).

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data-data yang dibutuhkan didapatkan salah satunya melalui wawancara yang merupakan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang kredibel dan kompeten untuk mendapatkan

informasi ataupun keterangan yang di-butuhkan (Achmadi dan Cholid, 2013:62). Selain itu, apabila terjadi kendala dan informan berkenan, wawancara tidak dilakukan tatap muka dengan memanfaatkan sarana komunikasi berupa internet maupun telepon.

Melalui wawancara, peneliti mengharapkan dapat mengumpulkan data-data yang terkait penelitian. Adapun narasumber yang dipilih untuk diwawancarai adalah individu-individu yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang terkait dengan subyek penelitian dalam tesis ini.

### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di beberapa instansi terkait di Jakarta, yaitu di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, akademisi dan peneliti dari lembaga-lembaga *think tank*. Adapun waktu penelitian yang akan dilakukan untuk menyusun tesis ini dimulai sejak Januari-September 2019 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2019							
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt
1	Pembuatan Proposal Penelitian								
2	Proses Bimbingan								
3	Ujian Komprehensif (Pra Proposal)								
4	Seminar Proposal Penelitian								
5	Perbaikan Proposal								

	Penelitian								
6	Pengumpulan Data								
7	Analisis Data								
8	Penyusunan Tesis								
9	Seminar Hasil (Pra Tesis)								
10	Ujian Tesis								
11	Perbaikan Tesis								
12	Penyerahan Tesis								

Sumber Tabel 3.1 Diolah oleh Peneliti 2019

### 3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan melalui kajian pustaka serta wawancara dengan narasumber (responden) yang memiliki kompetensi yang berkaitan dengan berbagai hal yang diteliti dalam penelitian sebagai sumber data primer dan sekunder.

#### 3.3.1 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah *stakeholder* atau narasumber yaitu para pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan serta narasumber dari kalangan akademisi dan *think tank* di bidang pertahanan dan hubungan internasional.

#### 3.3.2 Obyek Penelitian

Obyek Penelitian adalah sifat keadaan dari sesuatu benda, orang, atau keadaan yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian (Juliansyah, 2011: 34). Objek penelitian mengacu pada karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau konsep yang diberi lebih dari satu nilai (Wirartha,

2006:49). Adapun obyek penelitian yang dianalisa adalah strategi kerja sama Indo-Pasifik untuk mendukung pertahanan negara.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2005:62) merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian karena berkaitan dengan data yang diperlukan dalam proses analisis selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data ini dilakukan pada keadaan yang disebut sebagai *natural setting* atau kondisi yang alamiah. Kemudian sumber data primer serta teknik pengumpulan datanya lebih banyak bertumpu pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Menurut Sugiono secara umum teknik pengumpulan data kualitatif ada empat jenis. Pertama adalah observasi. Kedua adalah wawancara atau *interview*. Ketiga adalah dokumentasi. Dan keempat adalah triangulasi. Sugiono (2010:241) mengklasifikasikan triangulasi sebagai bagian dari teknik pengumpulan data. Teknik ini pada prinsipnya adalah menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada proses ini peneliti akan sekaligus melakukan uji kredibilitas data. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan menitik beratkan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan dokumentasi pada studi studi literatur.

#### **3.4.1 Wawancara**

Wawancara menjadi salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Definisi wawancara menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2011:317-321) adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang dalam sebuah pertemuan dengan tujuan bertukar informasi hingga dapat mengonstruksikan makna terkait dengan isu-isu tertentu. Wawancara (*interview*) ini dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) dengan sumber

informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung terhadap sesuatu objek yang diteliti (Muri, 2014:57). Adapun objek yang diteliti adalah strategi kerja sama Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan pertahanan negara.

Teknik wawancara merupakan percakapan interaktif antara pewawancara dengan narasumber (terwawancara) dengan maksud menghimpun informasi. Wawancara menurut Sugiyono (2011:320) terdiri dari 3 macam, yaitu: (1) wawancara terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara; (2) wawancara semi terstruktur, di mana pelaksanaan wawancara lebih bebas dengan tujuan menentukan permasalahan secara lebih terbuka; (3) dan wawancara tak terstruktur, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis, karena hanya menggunakan dasar garis-garis besar permasalahan sebagai bahan pertanyaan.

Wawancara terkait dengan penelitian tesis ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan dilakukan secara mendalam (*in-depth*). Langkah yang disiapkan pada teknik wawancara untuk penelitian kualitatif adalah; (1) Menetapkan subyek yang diwawancarai; (2) Menyiapkan pokok masalah; (3) Mengawali, membuka dan melangsungkan alur wawancara; (4) Mengkonfirmasi ikhtiar hasil wawancara dan mengakhirinya; (6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan; dan (7) Mengidentifikasi lebih lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

Lebih lanjut, teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiono (2010) dalam penelitian kualitatif *purposive sampling* merupakan sebuah teknik untuk menentukan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan agar data yang didapat akan lebih representatif. Sedangkan menurut Notoatmodjo (2010) pengambilan sample dalam *teknik purposive sampling* ini berdasarkan

atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti akan merujuk narasumber-narasumber tertentu yang dipandang memiliki kedalaman pengetahuan dan pengalaman (ahli/kredibel) mengenai hal yang akan dibahas, yakni bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang diusung Indonesia di ASEAN dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Adapun beberapa ahli/pakar yang diajukan guna menjadi narasumber pada penelitian ini di antaranya:

1. Dr. Siswo Pramono,  
Selaku Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri RI;
2. Vedi Kurnia Buana,  
Selaku Plt. Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI;
3. Mayjen TNI Rizerius Eko HS, S.E, S.AP, M.Si,  
Selaku Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI;
4. Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T, M.Sc, D.E.S.D  
Selaku Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Danseskoal)
5. Prof. Purnomo Yusgiantoro,  
Selaku Guru Besar UNHAN dan Mantan Menteri Pertahanan (periode 2009-2014)
6. Laksamana TNI (Purn.) Prof . Dr. Marsetio,  
Selaku Guru Besar UNHAN dan Mantan KSAL (periode 2012-2014);
7. Laksda TNI (Purn.) Robert Mangindaan  
Selaku Tenaga Profesional Bidang HI dan Strategi Lemhanas RI,
8. Connie Rahakundini Bakrie,  
Presiden *Indonesia Institute for Maritime Studies*;

9. Dr. Ian Montratama,

*Geostrategy Analyst* dan Penulis Buku “Indonesia Inc.: Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia”.

Data yang hendak didapatkan melalui wawancara yaitu berbagai informasi tentang instrumen apa saja yang menjadi pertimbangan Indonesia dalam perumusan strategi dan implementasi kerja sama Indo-Pasifik yang dilakukan dengan *ASEAN-led mechanism* khususnya yang diarahkan untuk mendukung pertahanan negara.

### **3.4.2 Studi Pustaka dan Dokumentasi**

Teknik Pengumpulan data pada studi pustaka dan dokumentasi merupakan langkah yang dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan penjelasan dari perspektif subyek lewat dokumen maupun media tertulis lainnya yang ditulis langsung oleh subyek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2015:68). Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan dan mencari data melalui buku-buku, jurnal, tesis, dokumen-dokumen resmi baik internal maupun eksternal yang relevan dengan penelitian ini berupa; transkrip, surat kabar, majalah, makalah seminar, konferensi, lokakarya, Undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, *standard operating procedure* (SOP) dan sebagainya. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung argumentasi teori maupun sebagai pedoman penulisan tesis.

### **3.5 Pemeriksaan Keabsahan Data**

Hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena hal-hal tertentu seperti subyektivitas peneliti sebagai hal dominan dalam penelitian kualitatif. Selain itu, alat penelitian yang berupa wawancara dan observasi juga bisa mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan kurang terkontrol, sehingga pada gilirannya sumber data kualitatif yang kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu,

terdapat beberapa langkah untuk menguji keabsahan data (Sugiyono, 2017:48), yaitu: (1) *Credibility* yang berarti tingkat penerimaan dan kepercayaan atas proses dan hasil penelitian. Untuk dapat diterima atau dipercaya maka peneliti dapat menggunakan triangulasi sumber, teknik dan teori; (2) *Dependability* yang berarti konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan sebagai hasil penelitian; (3) *Confirmability* yang berarti kesesuaian data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan dengan hasil akhir penelitian; dan (4) *Transferability* yang berarti bahwa hasil penelitian ini bersifat adaptif untuk diimplementasikan pada situasi yang lain.

Masalah yang dapat mengancam keabsahan data dari penelitian kualitatif; (1) Rasa percaya antara narasumber dengan peneliti yang kurang; (2) Terdapat ancaman keamanan hubungan antara peneliti dan narasumber; (3) Ketidaknyamanan hubungan antara peneliti dan nara-sumber; dan (4) Terdapat intervensi pemikiran dan sudut pandang peneliti di dalam data (Herdiansyah, 2014:73)

Beberapa teknik untuk menguji keterandalan data, antara lain; (1) Melakukan prosedur cek ulang secara cermat. Dalam prosedur ini terdapat verifikasi dan falsifikasi. Verifikasi adalah mengecek apakah data yang diungkapkan oleh narasumber sesuai dengan situasi yang konkret di lapangan. Falsifikasi adalah suatu prosedur pengecekan untuk mengetahui seberapa jauh data yang ditemukan dapat diuji kebenarannya; (2) Melakukan teknik penggalian data yang bervariasi mengakibatkan penelitian kualitatif sering kali sangat luas, sehingga diperlukan lebih dari satu teknik penggalian data. Misalnya dengan melakukan wawancara, dan jika memungkinkan menggali data dengan wawancara dan observasi; wawancara, observasi dan studi dokumentasi; serta lainnya sebanyak mungkin hingga keterandalan data mudah didapatkan; dan (3) Menambah jumlah subjek dan informan

penelitian. Jumlah subyek yang cukup dapat memberikan banyak data dan perspektif sehingga memperkaya hasil temuan lapangan dan analisisnya. Untuk memperkuat data, tidak hanya berasal dari narasumber semata melainkan juga dari dukungan data dokumentasi lain yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Data-data tersebut digunakan sebagai data sekunder atau pendukung yang mampu meningkatkan keterandalan data.

Teknik Triangulasi juga menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2010:330). Dalam teknik ini, peneliti dapat memeriksa kredibilitas data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi dapat dilakukan melalui penggunaan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi digunakan untuk memeriksa kebenaran data, dan mengkonfirmasi validitas tafsiran peneliti terhadap data. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Adapun triangulasi yang dilakukan berupa triangulasi data serta sumber literatur di mana peneliti melakukan pengecekan silang atas data wawancara yang diperoleh dari satu narasumber dengan narasumber lainnya. Sementara itu peneliti juga melakukan pengecekan silang antara sumber literatur yang diperoleh dengan data lapangan ataupun sumber literatur lainnya. Dalam proses ini peneliti juga menggunakan teknik verifikasi serta falsifikasi secara bersamaan dengan teknik triangulasi.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Salah satu proses penting dalam penelitian adalah analisis data. Kegiatan ini dilakukan setelah semua data telah diperoleh secara lengkap. Data yang sudah lengkap terhimpun akan diperlukan sebagai alat analisis

terhadap objek penelitian. Kegiatan analisis data yang berperan signifikan dalam proses penelitian memerlukan ketajaman dan ketepatan untuk menentukan akurasi pengambilan kesimpulan. Kegiatan analisis terdiri dari tiga tahap kegiatan yang dilakukan bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi selain pengumpulan data. Ketiga tahap tersebut menjadi satu kesatuan proses yang saling terjalin baik pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar sehingga membangun wawasan umum yang disebut “analisis”(Silalahi, 2012:61). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data inilah kemudian dapat ditarik kesimpulan.

### **3.6.1 Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2007:15), reduksi data merupakan analisis data yang dilakukan dengan menyaring hal-hal yang utama dengan fokus pada isu-isu penting yang terkait untuk kemudian didapatkan tema serta polanya. Reduksi data akan berlangsung secara kontinyu selama berlangsungnya proyeksi penelitian. Data-data yang telah didapatkan akan dilaksanakan pemilihan serta pemilahan disesuaikan dengan fokus yang menjadi penelitian, yaitu variabel-variabel penting data hasil analisis strategi kerja sama Indo-Pasifik sehingga dengan data tersebut peneliti dapat menjawab permasalahan.

### **3.6.2 Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data menjadi kegiatan terpenting selanjutnya setelah analisis data. Penyajian data mengacu pada keseluruhan informasi yang telah terhimpun untuk memberi kemungkinan dan kemudahan dalam menarik kesimpulan serta mengambil tindakan yang diperlukan selanjutnya. Jika pada masa lalu penyajian data pada penelitian

kualitatif lebih kepada bentuk teks naratif dengan jumlah puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan halaman, maka penyajian data di masa sekarang cenderung dilakukan dengan lebih selektif. Dengan demikian penyederhanaan informasi yang luas dan kompleks menjadi konfigurasi yang lebih mudah dipahami kini menjadi tren penyajian data yang lebih efektif.

Terkait dengan penelitian ini maka penyajian data di fokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat didalam rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang diusung Indonesia di ASEAN dalam rangka memperkuat pertahanan negara. Data-data yang diperoleh dalam wawancara namun dipandang tidak memiliki signifikansi dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan permasalahan ini akan direduksi dan tidak disajikan sebagai bagian dari hasil penelitian.

### **3.6.3 Verifikasi Data**

Kegiatan analisis selanjutnya adalah verifikasi data, data yang telah diperoleh dan terkumpul, selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan yang di angkat sehingga dapat memahami permasalahan secara lebih komprehensif, serta dihubungkan dengan teori dan akan diuji secara empiris sehingga validitas, reliabilitas, dan obyektivitas data teruji. Sehubungan dengan penelitian ini, kegiatan verifikasi data dilakukan setelah data-data yang terkumpul melalui hasil wawancara mendalam dan juga studi literatur terkumpul kemudian dihadapkan dengan keberadaan teori yang disampaikan pada bagian tinjauan pustaka. Sehingga ditemukan korelasi yang memberikan penjelasan terhadap validitas, reliabilitas serta obyektivitas data di lapangan dengan teori yang sudah ada. Keterkaitan inilah yang kemudian diinterpretasikan pada tahapan selanjutnya guna menjawab rumusan masalah bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan strategi kerja sama

Indo-Pasifik yang diusung Indonesia di ASEAN dalam rangka memperkuat pertahanan negara.

#### **3.6.4 Interpretasi Data**

Interpretasi data diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Menurut L.R Gray (1996), interpretasi data merupakan usaha untuk menemukan arti atau jawaban dari data. Interpretasi data bersama dengan analisis data digunakan untuk memberikan masukan bagi perbaikan kegiatan penelitian. Selanjutnya hasil yang didapat akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Teknik interpretasi data dilakukan dengan; (1) menghubungkan hasil analisis dengan teori pada bab sebelumnya; (2) Meninjau teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti; (3) Memperluas hasil analisis melalui pengajuan pertanyaan yang berkenaan dengan hasil analisis, penyebab dan implikasi dari hasil analisis sebelumnya; (4) Menghubungkan temuan dengan pengalaman pribadi; (5) Memberikan pandangan kritis atas hasil analisis yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, interpretasi data dilakukan setelah benang merah antara data yang diperoleh di lapangan maupun hasil dokumentasi dan studi literatur dibedah menggunakan teori yang telah di sampaikan dalam bagian tinjauan pustaka. Pemberian interpretasi ini merujuk pada adanya kesesuaian ataupun anomali terhadap keadaan dilapangan dengan keadaan yang seharusnya jika ditelaah dengan teori terkait. Selanjutnya akan dihasilkan jawaban dari rumusan masalah bagaimana Indonesia dapat mengoptimalkan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang diusung Indonesia di ASEAN dalam rangka memperkuat pertahanan negara serta saran-saran terkait yang dapat dijadikan solusi kedepannya.

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

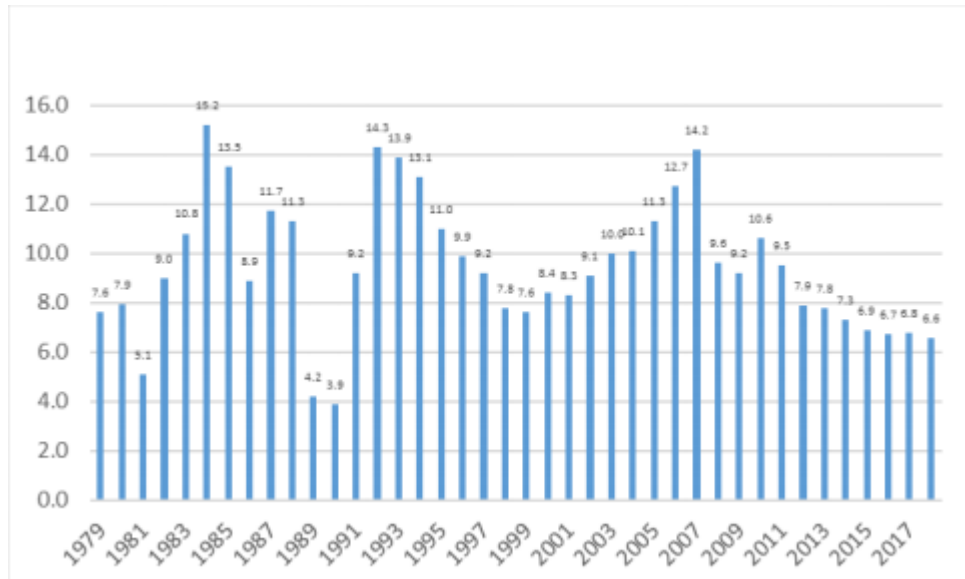
##### 4.1.1 Gambaran Perkembangan Lingkungan Strategis Terkini: Abad Asia dan Narasi Indo-Pasifik

Abad 21 adalah momentum kebangkitan Asia. Banyak ahli dunia telah memproyeksikan Abad 21 sebagai Abad Asia, yang salah satunya ditandai dengan kebangkitan Cina. Dua abad silam ahli strategi perang Perancis, Napoleon Bonaparte telah meramalkan Cina akan bangkit sebagai kekuatan dunia. Melalui kutipannya yang populer “*let her sleep, for when she wakes, she will shake the world*”, Bonaparte secara prediktif menganalogikan Cina sebagai raksasa yang tertidur dan suatu saat akan terbangun menjadi kekuatan yang berpengaruh besar dalam tatanan politik dan ekonomi global.

Satu abad kemudian, di tahun 1924, seorang Jenderal Karl Haushofer dari Jerman meramalkan bahwa dunia akan menyongsong sebuah era “*Pacific Age*” yang juga merujuk pada kawasan Asia Pasifik. Meskipun dipahami bahwa Asia lebih dari sekedar negara-negara di lingkaran Pasifik karena secara geografis Asia terbentang dari Laut Mediterania dan Laut Merah di sepanjang benua Eurasia hingga Samudera Pasifik yang terdiri dari 53 negara dengan hampir 5 miliar jumlah penduduk – di mana 1,5 miliar di antaranya adalah Cina (Khanna, 2019:2).

Kini realita membuktikan bahwa Cina telah melangkah ke panggung dunia sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia. Sebuah laporan berjudul *China’s Economic Rise: History, Trends, Challenges and Implication for the United States* (2019) menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam 40 tahun terakhir sangat spektakuler. Sejak reformasi ekonomi dimulai pada tahun 1979 hingga 2017, rata-rata pertumbuhan ekonomi Cina setiap

tahunnya berkisar 9,5%, sebagaimana tergambar pada Gambar 4.1 di bawah.



**Gambar 4.1 Grafik Chinese Annual Real GDP Growth 1979 – 2018 (percentage)**

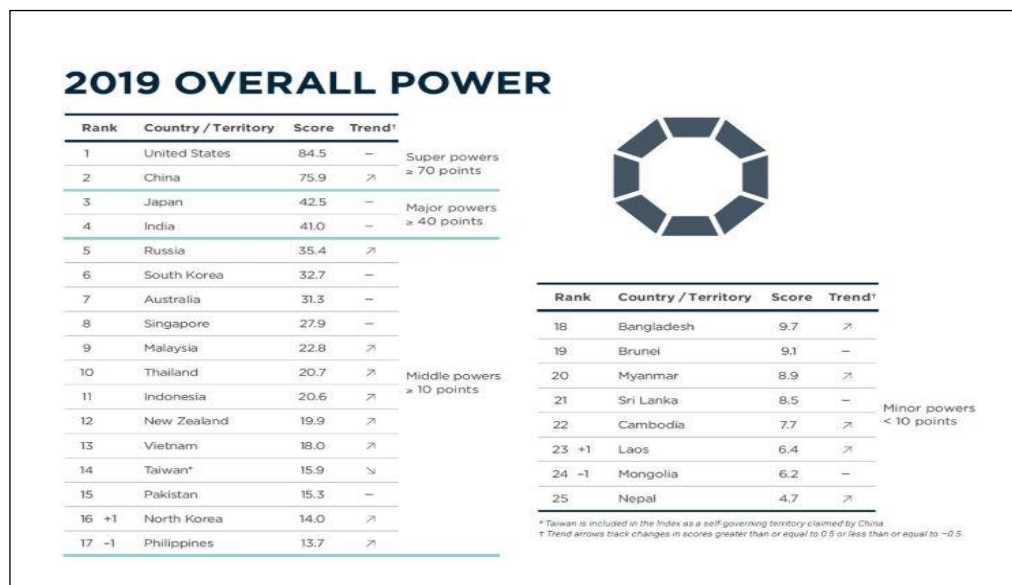
Sumber:  
IMF dan *Chinese National Bureau of Statistic*

Grafik tersebut menunjukkan bahwa Cina berhasil melipatgandakan pertumbuhannya setiap 8 tahun, meskipun sempat terjadi perlambatan ekonomi global di beberapa periode awal dan akhir tahun 90-an serta tahun 2008. Dengan kemajuan yang sangat pesat Cina pun melesat menjadi negara yang layak berada pada peringkat *super power* sebagaimana AS. Kajian *Lowy Institute* tahun 2019 tentang *Asia Power Index* yang dirilis Mei 2019, menyebutkan status '*super power*' kini disandang oleh AS bersama dengan Cina, serta Jepang dan India sebagai '*great power*'. Kajian ini menggunakan beberapa acuan seperti sumber daya ekonomi, kapabilitas militer, pengaruh diplomatik, dan jejaring pertahanan untuk menilai '*power*' sebuah negara.

Sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1, hasil kuantifikasi kajian *Lowy*

*Institute* menunjukkan bahwa skor AS 84,5 masih di posisi tertinggi sebagai negara *super power* diikuti Cina di peringkat kedua dengan skor 75,9. Asumsinya, negara *super power* harus mencapai penilaian lebih atau sama dengan 70. Sedangkan Jepang dan India secara berturut-turut meraih skor 42,5 dan 41 sehingga termasuk dalam kategori *great power*. Selibhnya adalah *middle power* (termasuk Indonesia) dan *minor power*. Kajian tersebut menggunakan 126 indikator dalam 8 tematik pengukuran *power*

**Tabel 4.1 Distribusi Kekuatan Negara berdasarkan Kuantifikasi Sumber Daya dan Pengaruh**

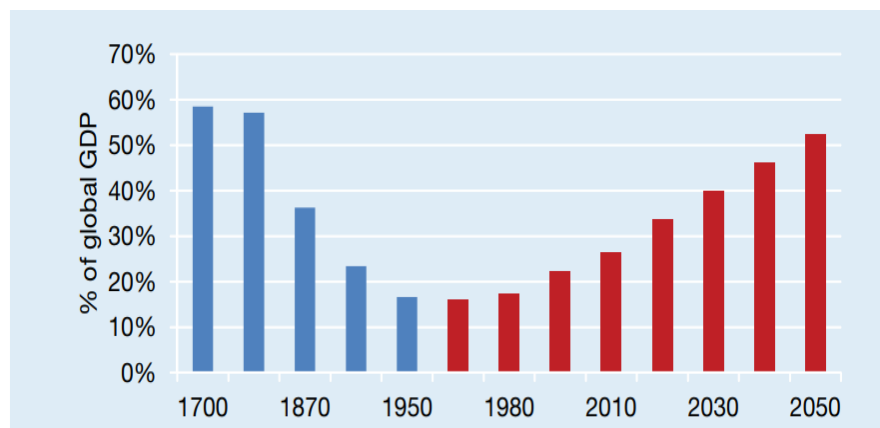


Sumber: Lowy Institute, 2019

Beberapa temuan penting kajian *Asia Power Index* di atas di antaranya adalah AS tetap menjadi negara adidaya teratas di dunia tetapi semakin dibayang-bayangi oleh Cina karena poin yang diakumulasikan Cina hanya terpaut 8,6 dengan nilai AS dibandingkan pengukuran tahun sebelumnya yang terpaut 10 poin. Di sisi lain, Jepang dan India merupakan negara kunci dalam situasi memudarnya dominasi hegemonik AS dan laju

ambisi Cina dalam hal perimbangan kekuatan. Hal ini menunjukkan bahwa AS-Cina menjadi dua pemain utama yang saling berebut pengaruh di tataran konstelasi global namun diimbangi pula dengan kehadiran aktor-aktor lain yang memiliki keunggulan kompetitif masing-masing.

Sementara itu menurut Laporan *Asian Development Bank* (ADB) yang bertajuk *Asia 2050: Realizing the Asian Century* terdapat beberapa negara kunci lainnya yang akan berperan besar dalam realisasi Abad Asia. Selain Cina, India, dan Jepang disebutkan pula Korea Selatan, Indonesia, Thailand dan Malaysia yang berpotensi memainkan andil penting dalam skenario Abad Asia. Dari sisi populasi ketujuh negara tersebut berkontribusi 75% dari total penduduk di Asia dan 90% GDP dari total pertumbuhan ekonomi Asia pada tahun 2050. Dari rentang 2010-2050, ketujuh negara tersebut diperkirakan akan menyumbangkan sekitar 52% dari total GDP global (ADB, 2011:5). Karena itulah negara-negara tersebut diyakini akan menjadi mesin penggerak ekonomi, tidak hanya di Asia tetapi juga di tingkat global.



**Gambar 4.2 Grafik Asia's Share of Global GDP 1700-2050**

Sumber: Maddison (1700-1950) (2007); Centennial Group International Estimates (1951-2050) (2011)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2050 Asia diperkirakan akan mampu meningkatkan pendapatan per kapitanya hingga mencapai level Eropa di masa sekarang. Bahkan dengan mencapai GDP senilai 52% dari total GDP global, maka Asia akan merengkuh kembali kejayaannya sebelum revolusi industri, sekitar 300 tahun lalu. Proyeksi senada lain juga mengemuka dari bank investasi global, Goldman Sachs, yang mengestimasi tiga perekonomian terbesar dunia pada tahun 2050 adalah Cina, AS dan India. Jika spekulasi ini menjadi nyata, maka dalam tiga dasawarsa ke depan, dunia akan tampil dengan konstelasi yang berbeda dan menjadi hal di luar ekspektasi AS yang tidak hanya menganggap dirinya sebagai satu-satunya adi kuasa, tetapi juga beritikad menggerakkan peran global baru yang mencerminkan keunggulannya, terutama setelah tragedi 9/11 pada tahun 2001 (Jacques, 2009:4)

Prediksi dan realitas tentang Abad Asia cukup berbanding lurus. Dinamika di kawasan yang berciri kebangkitan Cina sebagai adidaya baru mengimbangi dominasi AS, baik di bidang ekonomi, politik dan militer ini pada akhirnya juga telah melahirkan geopolitik baru. Kedigdayaan ekonomi Cina cukup signifikan dalam hubungan internasional mengingat ekonomi (bersama dengan militer) merupakan kekuatan fundamental dalam politik dunia. Apabila dalam 20 abad terakhir perluasan wilayah dan persaingan militer adalah hal krusial dalam membangun kekuatan negara, maka memasuki abad 21 ini perdagangan menjadi alat politik yang berfungsi sebagai instrumen dalam memperkuat aliansi sekaligus menyampaikan sinyal kepada kompetitor untuk menahan meluasnya pengaruh kekuatan-kekuatan baru (Froman, 2014: 1). Dalam hal inilah kesejahteraan sebuah negara menjadi indikator untuk mengukur kekuatannya.

Korelasi antara ekonomi dan politik juga telah dikaji oleh Paul Kennedy dalam buku *The Rise and Fall of the Great Power* (1987) dan meramalkan mudurnya pamor AS dalam hal penetrasi pengaruh di

kawasan. Kegagalan kebijakan militer AS di Irak dan Afghanistan pasca 9/11 menjadi salah satu stimulan kebangkrutan AS yang menderita kerugian besar, khususnya dari sisi pengeluaran program perang melawan terorisme tersebut. Berdasarkan laporan tahunan *the Cost of War* dari *Brown University's Watson Institute*, total pembiayaan perang tersebut akan mencapai 5,9 triliun Dolar AS pada tahun fiskal 2019. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis Kennedy bahwa besarnya biaya yang harus ditanggung negara-negara adikuasa untuk mempertahankan kepentingannya di seluruh dunia justru akan menjadi bumerang. Hal yang sedang dialami AS ini juga pernah menimpa Inggris, Spanyol, dan Perancis yang kewalahan memikul beban keuangan sebagai dampak pengeluaran untuk biaya operasi militer mereka (Atmaja, 2012).

AS di bawah administrasi Presiden Obama akhirnya mencoba merevitalisasi kebijakan melalui agenda *Pivot to the Pacific* atau *Rebalancing towards Asia* pada tahun 2011. Agenda tersebut merepresentasikan pergeseran orientasi pengaruh AS ke Asia Pasifik sekaligus merespon gaung Cina yang menjadi kekuatan baru di Asia Pasifik. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Oktober 2013, Cina mencanangkan ambisi geopolitiknya yang cukup fenomenal, yaitu inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) yang kemudian berganti titel menjadi *Belt and Road Initiative (BRI)* pada tahun 2017. Dengan motivasi membangkitkan kembali kejayaan Jalur Sutra pada masa Dinasti Han (110) dan Dinasti Ming (1403-1433), Cina mengalokasikan investasi senilai 40 milyar Dolar AS untuk membangun sarana dan prasarana transportasi laut dari Cina melintasi Asia Tenggara ke Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa dan Afrika.

## China's Belt and Road Initiative (BRI)



**Gambar 4.3 Skema BRI**

Sumber: *Geopolitical Intelligence Service*

Perkembangan BRI semakin menegaskan ambisi besar Cina yang ditengarai mempersulit strategi *rebalancing* AS. Apalagi setelah Donald Trump yang terpilih sebagai Presiden AS menggantikan Obama di akhir tahun 2016 justru memutuskan menarik diri dari *Trans-Pacific Partnership* (TPP) dan menandatangani pengunduran diri AS dari pakta perdagangan tersebut pada tanggal 23 Januari 2017. Perubahan ini nyatanya justru memperkuat posisi Cina di kancah regional karena memberikan kesempatan bagi Cina untuk lebih mudah merangkul minat negara lain dalam perjanjian perdagangan dengan Cina seperti peluang kerja sama dalam rancangan *Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP* (Trump Tolak TPP...,2017).

Tantangan AS dalam upaya menancapkan pengaruhnya di Asia Pasifik juga semakin kompleks akibat agresivitas Cina dewasa ini di antaranya kompleksitas permasalahan teritorial maritim LCS dan isu nuklir di Semenanjung Korea yang turut berimplikasi pada kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik (Al Syahrin, 2015:24-26). Tak pelak, rivalitas AS-Cina

pun berujung pada isu keamanan di kawasan. Hal tersebut turut dipicu atas keunggulan ekonomi Cina yang serta merta mendorong pengembangan dan modernisasi kekuatan pertahanan Cina. Pada tanggal 5 Maret 2019, PM Cina Li Keqiang mengumumkan di depan parlemen Cina bahwa anggaran pertahanan Cina pada tahun mendatang akan mencapai 1,19 triliun yuan atau 175,4 milyar Dolar AS.



**Gambar 4.4 Grafik Anggaran Pertahanan Cina berdasarkan *share* GDP (%)**  
 Sumber: IISS Military Balance+ (2019)

Kenaikan belanja pertahanan Cina tahun 2019 sebagaimana grafik pada Gambar 4.4 di atas adalah sebesar 7,5 % dari anggaran tahun 2018. Peningkatan ini memang tidak dramatis jika dibandingkan kenaikan anggaran pertahanan Cina tahun 2018 sebesar 8,1 %. Hal ini sehubungan dengan terkoreksinya target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,0 - 6,5%. Namun demikian, PM Li Keqiang menegaskan kepada parlemen Cina bahwa di bawah pemerintahannya Cina akan terus mengakselerasikan strategi militer di era baru, memperkuat pelatihan militer di bawah kondisi pertempuran, melindungi kedaulatan, keamanan dan kepentingan pembangunan Cina (Six

*Key Takeaways...*,2019). Langkah yang akan dilakukan di antaranya adalah dengan lebih mengimplementasikan strategi integrasi militer-sipil dan mempercepat upaya inovasi di bidang sains dan teknologi yang berkaitan dengan pertahanan.

Selanjutnya *White Paper* bertajuk *China's National Defense in the New Era* yang terbit pada 24 Juli 2019 menekankan bahwa *People Liberation Army* (PLA) akan fokus untuk mendukung pertahanan nasional dan reformasi militer serta meningkatkan pertahanan nasional dan modernisasi militer secara komprehensif. Publikasi dokumen strategis tersebut dipandang tidak cukup transparan sehingga rencana pengembangan kekuatan militer Cina banyak dikaitkan dengan kekhawatiran Cina pada ancaman terhadap klaim teritorialnya di LCS. Kontrol atas wilayah maritim yang masih menjadi sumber sengketa ini memang telah menyebabkan adanya peningkatan ketegangan dengan AS (Bendini, 2016:17-18)

Perubahan lingkungan strategis yang sedemikian dinamis telah membuat posisi hegemoni AS dalam geopolitik dan geostrategi global makin terkikis. Cina memang semakin menggentarkan AS sehingga di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump, AS memperkenalkan Strategi Keamanan Nasional baru yang menyebutkan bahwa Cina bersama dengan Rusia diidentifikasi sebagai pesaing strategis dan dikategorikan sebagai ancaman yang lebih diperhitungkan dibandingkan isu teorisme atau perubahan iklim. Hal tersebut jelas termaktub dalam *National Defense Strategy of the US 2018: Sharpening the American Military's Competitive Edge*.

Dalam dokumen itu Cina disebut sebagai predator ekonomi yang sangat intimidatif terhadap negara-negara di sekitarnya sembari terus melancarkan militerisasi di LCS. Sedangkan Rusia dipandang AS telah banyak melanggar kedaulatan teritorial wilayah negara lainnya demi meningkatkan kredensial dan otoritas kekuatannya, khususnya terkait isu

Ukraina dan Suriah. Bahkan kasus Rusia vs Ukraina yang berujung pada aneksasi Krimea pada tahun 2014, telah menjadikan Rusia semakin mengalami ketegangan hubungan dengan Uni Eropa. Rusia pun mendapatkan sanksi bertubi-tubi dari AS dan negara Barat lainnya. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa Cina dan Rusia ibarat rekan senasib-sepenanggungan dalam menghadapi situasi keamanan yang kompleks dan turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik kedua negara. Tak heran Rusia mulai nampak menunjukkan keberpihakan terhadap Cina menanggapi Perang Dagang AS-Cina dengan terus meningkatkan hubungan dan kerja sama perdagangan ke tingkat yang lebih strategis. Pada Forum Ekonomi Internasional di Rusia bulan Juni 2019, Presiden Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat meningkatkan perdagangan bilateral kedua negara dari 107 miliar Dolar AS pada tahun 2018 menjadi 200 miliar Dolar AS per tahun.

Sementara di bidang militer, Rusia dan Cina belum lama ini mencatatkan sejarah dengan menggelar latihan militer bersama, Vostok 2018, yang secara epik melibatkan 300.000 pasukan, 36.000 kendaraan militer, 1000 pesawat, helikopter, *drone* hingga pengerahan 80 kapal perang. Vostok 2018 yang digelar pada 12-15 September 2018 disebut sebagai latihan militer terbesar yang dilakukan Rusia setelah Zapad *exercise* yang dilakukan pada masa Uni Soviet tahun 1981. Bagi Rusia, keterlibatan 300 ribu personil militer dalam Vostok 2018 juga mencatat rekor tersendiri sejak latihan militer di tahun 2013-2014 yang mengerahkan pasukan hingga 160.000 personil (Lihat Gambar 4.5)



**Gambar 4.5 Grafik Jumlah keterlibatan pasukan dalam Latihan Militer Bersama yang diikuti Rusia (2013-2018)**

Sumber: *Source Atlantic*, 2018

Cina dan Rusia tampak memiliki kepentingan dalam menghadapi tingginya tekanan AS. Keduanya menjadi mitra alternatif dengan memandang pentingnya jalinan kerja sama di tengah hegemoni AS. Dalam nuansa *containment policy* inilah narasi Indo-Pasifik mulai berkembang. AS yang selama ini dikenal sebagai *established super power* tidak menginginkan terjadinya ketimpangan pengaruh sehingga berupaya melakukan reorientasi kebijakan geopolitiknya. Melalui strategi *rebalancing*, AS berupaya menghadang perluasan pengaruh Cina di Asia Pasifik hingga melahirkan konsep Indo-Pasifik. Indo-Pasifik sebagai terminologi geopolitik saat ini sedang menjadi sorotan dan sasaran kajian strategis dalam konstelasi hubungan internasional. Wilayah Indo-Pasifik sendiri mengacu pada zona maritim yang dikelilingi Samudera Hindia dan Pasifik beserta semua negara yang berada dalam spektrum kawasan tersebut (Rivai Ras, 2019). Penyertaan Samudera Hindia mencerminkan arti penting India sebagai pemain utama di kawasan tersebut bersama negara-negara dan entitas kunci

lainnya, seperti Cina, Australia, Jepang dan ASEAN yang selama ini berada di wilayah Asia Pasifik.



**Gambar 4.6 Perbedaan Cakupan Wilayah Asia-Pasifik dan Indo-Pasifik**  
Sumber: IISS, Asia Pacific Regional Security Assessment, 2018

Meskipun sudah lebih dari satu dasawarsa narasi Indo-Pasifik dalam konteks geopolitik mengemuka, namun Indo-Pasifik lebih mencuri perhatian sejak Presiden Trump menggulirkan skema dan rencana strategis di balik konsepsi Indo-Pasifik. Adalah “*Free and Indo-Pacific*” (FOIP) yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Trump pada KTT CEO APEC pada tanggal 10 November 2017 di Viet Nam (Palit&Sano, 2018:1-6). FOIP menjadi indikasi kuat keinginan AS untuk lebih terlibat dalam kancah geopolitik di wilayah Indo-Pasifik. Dalam FOIP, ‘*free*’ dimaknai bahwa tiap negara dapat berdaulat dan memiliki pemerintahan yang baik, sedangkan ‘*open*’ merujuk pada terbukanya jalur udara, jalur komunikasi laut, infrastruktur logistic, investasi dan perdagangan (Pompeo, 2018).

Tidak lama berselang, pada 11 November 2017 AS bersama India, Australia, dan Jepang yang bergabung dalam *grouping Quadrilateral Security Dialogue* (QSD) bertemu di sela-sela EAS Summit di Manila. Pertemuan *the Quad* tersebut sekaligus menandai revitalisasi forum QSD sejak diinisiasi tahun 2007. Pada kesempatan tersebut, *the Quad* juga mengangkat Indo-Pasifik sebagai istilah baru yang tidak hanya dimaksudkan untuk menggantikan penyebutan Asia Pasifik tetapi juga bermakna pergeseran cakupan geografis serta perluasan aktor, *power* dan struktur di kawasan (Iriawan, 2017).

David Dodwell (2017:4) mengungkapkan bahwa tujuan *the Quads* membangun ikatan yang lebih solid antara AS, Jepang, India dan Australia akan cenderung meningkatkan intensitas dan eskalasi kehadiran militernya. Karena itu, konsepsi Indo-Pasifik juga akan diarahkan untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama militer di antara keempat negara tersebut. Dalih yang akan digunakan adalah membendung pengaruh Cina di Asia Pasifik dan menjadi “penyeimbang kekuatan” terhadap Cina yang semakin agresif dan ambisius dalam program BRI.

Sedemikian strategisnya konsep Indo-Pasifik ini hingga AS bahkan harus merespon perkembangan lingkungan strategis ini dengan mengubah komando pertahanan tertua dan terbesar yaitu Komando Pasifik AS (*US Pacific Command/USPACOM*) yang mengawasi pantai barat AS sampai bagian barat India dan Antartika sampai Kutub Utara. USPACOM yang mewakili 20 persen kekuatan militer AS dengan 375.000 personel militer serta mencakup 36 negara berganti nama menjadi Komando Indo-Pasifik AS (*US Indo-Pacific Command/USINDOPACOM*) pada bulan Mei 2018 (Marsetio, 2019: 8-9). Menurut Marsetio, langkah AS untuk mengganti nama USPACOM menjadi USINDOPACOM juga menjadi langkah simbolik besar yang mengkonfirmasi signifikansi keikutsertaan India dalam manuver geostrategi AS (Wawancara tanggal 7 Agustus 2019). Hal tersebut juga untuk

menegaskan komitmen AS sebagai penyedia payung keamanan bagi negara-negara di kawasan dengan prinsip *collective security* (Wawancara dengan Dirjen Strahan, Kemhan, Mayjen TNI Rizerius Eko Handisancoko, 10 Agustus 2018).



**Gambar 4.7 Area of Responsibility US INDOPACOM**

Sumber: <https://www.pacom.mil/About-USINDOPACOM>, 2018

Bagi AS, India adalah mitra krusial terkait visi FOIP di bawah pemerintahan Presiden Trump. Apalagi jika dikaitkan dengan *stand point* India terhadap Cina. Menurut *the Statesman* (2017), India secara terbuka menyatakan keberatan atas proyek OBOR Cina bahkan memboikot KTT OBOR pada bulan Mei 2017 di Cina. India memprotes bahwa proyek unggulan OBOR di Pakistan, yaitu *China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)* berjalan melalui Kashmir, wilayah sengketa antara India dan Pakistan. Bagi India, hal tersebut adalah pelanggaran atas kedaulatan India di wilayah Kashmir Selatan dan akses BRI melalui Kashmir dianggap sebagai bentuk dukungan Cina kepada Pakistan dalam sengketa tersebut (Baruah, 2018:15).

Dengan demikian, semakin jelas bahwa pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia memang telah mengalami pergeseran di Asia hingga menstimulasi konsep dan strategi geopolitik baru bernama Indo-Pasifik. Berkembangnya narasi Indo-Pasifik telah merubah lanskap geopolitik di Asia. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong dikategorikan Laksamana (2019:7-10) dalam empat elemen berikut ini:

- a. Keputusan Presiden Trump untuk menarik diri dari kerja sama *Trans-Pacific Partnership (TPP)* pada tahun 2017 yang mengubah peta kekuatan di Asia Pasifik. Akibatnya kekuatan regional di kawasan “dipaksa” mencari alternatif arah kerja sama multilateral lain yang lebih menguntungkan di samping Samudera Pasifik dan menjadikan optimalisasi Samudera India menjadi opsi rasional.
- b. Faktor Cina sebagai penguasa kawasan Asia Pasifik yang dinilai hanya intensif dalam kerja sama ekonomi namun kurang proaktif dalam menjalin kerja sama pertahanan. Sebagai konsekuensinya, stabilitas kawasan melemah, khususnya dalam kaitan dengan isu LCS yang masih menjadi pertarungan relasi ASEAN-Cina. Kondisi ini ditangkap AS sebagai celah untuk mempertegas terminologi Indo-Pasifik alih-alih Asia Pasifik.
- c. Kebangkitan kekuatan India, Jepang dan Australia sebagai tiga negara arsitek utama poros ini dianggap berpotensi besar menjadi kekuatan penyaing Cina. Kerja sama ketiga negara tersebut makin kentara setelah diplomasi trilateral (quadrilateral bersama AS) pada tahun 2017.
- d. Adanya peningkatan kebutuhan untuk menggunakan jalur maritim Samudera India dalam berbagai aktivitas ekonomi. Akibatnya, kebutuhan keamanan laut dari berbagai jenis ancaman pun diperlukan dan karena itulah “menghidupkan” organisasi di Indo-Pasifik menjadi kebutuhan mendasar negara-negara di sekelilingnya.

Dinamika hubungan AS-Cina selanjutnya menjadi kata kunci dalam memahami perubahan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Rivalitas keduanya saling berkelindan di berbagai lini, khususnya ekonomi dan pertahanan (militer). Di bidang ekonomi, Cina hadir sebagai kekuatan ekonomi besar yang mengancam supremasi AS selama ini. Laporan PDB *Annual Growth 2018* menyebutkan bahwa Cina lebih stabil dalam hal ekonomi dengan rata-rata GDP mencapai 6,75% berkembang pesat dibanding GDP AS yang mencapai angka 4,2 % per Juli 2018 (*Economy Trading, 2018*). Hal ini turut memicu kewaspadaan AS terhadap Cina hingga manuver Presiden Trump dalam memproteksi perekonomian AS menjadi kontroversial, salah satunya adalah perang dagang. Tidak berhenti sampai di situ, intimidasi dan provokasi militer pun mewarnai suasana persaingan geopolitis kedua negara di wilayah perairan yang paling strategis bagi perdagangan dunia dan menjadi sumber sengketa maritim, yaitu Laut Cina Selatan (LCS).

Perang dagang antara AS dan Cina serta ketegangan yang terus meningkat di LCS menjadi *flashpoint* penting yang turut memperkeruh dinamika lingkungan strategis di Indo-Pasifik. Perang dagang yang berimbas signifikan pada penurunan ekonomi Cina menjadikan Cina menjadi lebih agresif mengambil langkah-langkah *use of force*. Data terbaru IMF menyebutkan bahwa implikasi perang dagang menjadikan pertumbuhan ekonomi AS meningkat dari 2,3 persen menjadi 2,6 persen pada tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Cina di tahun yang sama justru terkoreksi dari 6,3 persen menjadi 6,2 persen. Menurut *the Guardian* (2018) melemahnya ekonomi Cina turut memberikan dorongan bagi Presiden Xi untuk mengambil langkah-langkah militer dalam menyelesaikan pertikaian di kawasan. Berikut ini adalah tinjauan atas kedua *flashpoint* kunci dalam dinamika geopolitik Indo-Pasifik

#### 4.1.1.1 Ketegangan di Laut Cina Selatan

Klaim tumpang tindih wilayah perairan LCS dalam sebuah sengketa yang melibatkan Cina dengan beberapa negara ASEAN masih menjadi isu panas di kawasan. Meskipun sengketa wilayah perairan LCS hanya melibatkan 5 negara lainnya di Asia Tenggara, tetapi pejabat-pejabat penting AS seperti John Kerry dan Rex Tillerson (keduanya mantan Menlu AS) pernah menyampaikan pandangannya bahwa kebijakan Cina di LCS merupakan sumber utama instabilitas dan ketegangan di kawasan. Hal tersebut tertulis dalam publikasi *Cato Institute* berjudul “*a Balanced Threat Assesment of China’s South China Sea Policy*” (2017). Tidak seperti klaim negara *claimants* lainnya, klaim Cina atas kedaulatan wilayah dan yurisdiksi maritimnya di LCS berkisar antara 62-90 persen dari keseluruhan wilayah perairan tersebut (*Council on Foreign Relations, 2017*). Klaim Cina menggunakan dasar *historical rights* yang ditandai dengan *nine-dash line* atau sembilan garis putus-putus yang mengacu pada peta awal dengan bentuk U yang terdiri dari 11 garis segmen. Peta tersebut diterbitkan Cina secara unilateral pada tahun 1947. Garis segmen tersebut kemudian dikurangi dua atas permintaan PM Cina Zhou Enlai pada tanggal 1 Desember 1947 (Liu Zhen, 2016:4).

Dalam perkembangannya klaim *nine-dash line* tidak diakui berdasarkan keputusan Pengadilan Arbitrase (PCA) di Den Haag, Belanda pada 12 Juli 2016 dalam sengketa Filipina *versus* Cina yang dipicu friksi antara kedua negara atas salah satu fitur di LCS, yaitu *Scarborough Shoal*. PCA menyimpulkan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut hak sejarah dan ekonomi terhadap kawasan perairan LCS (*press release PCA, 2016*). Nilai strategis LCS memang memang berpotensi untuk meningkatkan *power* suatu negara. LCS menjadi rute tersibuk di dunia dengan lebih dari setengah perdagangan dan pelayaran yang melalui LCS.

Nilai perdagangan di kawasan ini mencapai 5 trilyun dolar AS per tahun. LCS juga diperkirakan memiliki kandungan minyak bumi 213 milyar barel (10 kali lebih banyak dari persediaan minyak AS) dan gas alam yang jumlahnya ditaksir sama dengan cadangan gas alam milik Qatar sebagai negara ke-3 yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia (SM. Noor, 2015:200). Selain itu, perairan LCS ini juga mengandung sumber daya perikanan yang melimpah. Tak heran, sengketa wilayah di LCS juga didasarkan pada perebutan sumber daya untuk kepentingan *energy and food security*.



**Gambar 4.8 Wilayah Sengketa LCS**

Sumber: Aliza Grant based on Asia Maritime Transparency Initiative, 2017

Pasca keputusan PCA, Cina justru semakin menunjukkan perilaku asertif dan agresif di LCS dengan berbagai kegiatan militerisasi, termasuk upaya membangun pulau-pulau buatan (*hybrid island*) di wilayah sengketa tersebut. Menurut Dansesko AL, Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, tindakan Cina tersebut menjadi salah satu pemicu makin rumitnya sengketa LCS dan justru menambah ketegangan di kawasan (Wawancara, 17 Juli 2019). Selain digunakan untuk membangun instalasi militer, pulau-pulau buatan Cina mulai dikhawatirkan akan digunakan sebagai *base point* untuk menarik garis

pangkal. Padahal pasal 60 angka (8) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa pulau buatan tidak memiliki status pulau dan laut teritorial serta ZEE-nya sendiri. Dengan demikian pulau buatan tersebut tidak bisa menjadi *base point* untuk menarik garis pangkal sebagai upaya menegakkan klaim *nine-dash line*. Sikap Cina tersebut juga melanggar pasal 88 UNCLOS 1982 yang menetapkan laut bebas ditujukan untuk maksud damai. Jika Cina terus bersikeras dengan pendirian unilateral semacam itu tentu akan berdampak pada perdamaian kawasan dan bukan tidak mungkin berujung pada konflik terbuka antar negara *claimant* lainnya.

Pengerahan kekuatan militer atau militerisasi juga kerap dilakukan Cina di LCS yang pada akhirnya memicu respon AS. Pada tahun 2016, misalnya, AS mengerahkan kapal perang dalam radius 12 mil dari Kepulauan Paracel yang termasuk diklaim Cina sebagai wilayahnya. Namun AS menyebutkan bahwa wilayah tersebut adalah perairan internasional. Cina pun melakukan tindakan balasan dengan menempatkan sistem pertahanan udara di Pulau Woody. Bahkan Cina juga mengerahkan jet tempur J-11 dan J-7 di pulau yang menjadi obyek sengketa tersebut (CSIS, 2016).

Sejak tahun 2010, AS yang mulai mengembangkan strategi *rebalancing* ke wilayah Asia Pasifik, mulai menggertak Cina karena dinilai terlalu dominan menguasai perairan LCS. Presiden Obama yang mencetuskan kebijakan *Pivot to Asia* juga secara terang-terangan menyampaikan penolakan terhadap klaim Cina atas LCS. Langkah koersif masih terus dilakukan AS sepanjang tahun 2016 seperti pengiriman kapal induk USS John Stennis dan pengerahan kapal perang Angkatan Laut AS di area 12 mil laut di kawasan pulau karang *Fiery Cross Reef*. Aktivitas tersebut dilakukan sebagai wujud operasi kebebasan navigasi (*freedom of navigation/FONOP*).

Hingga memasuki tahun 2019, Angkatan Laut AS telah memutuskan untuk melakukan FONOPs melintasi LCS secara regular (Andika, 2019).

Bahkan AS telah meminta para sekutunya seperti Inggris, Jepang, Australia untuk turut serta meningkatkan operasi kebebasan navigasi di wilayah tersebut. AS juga menggandeng beberapa negara di Asia yang termasuk dalam jaring aliansinya, yaitu Jepang, India dan Filipina melakukan latihan FONOP bersama untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Mei 2019. Penerapan FONOP sebenarnya juga mencerminkan kesewenang-wenangan AS, apalagi AS hingga sekarang belum meratifikasi UNCLOS 1982 (bukan negara pihak).

Tensi yang semakin meningkat akibat aksi AS-Cina memang makin memperpanas situasi dan berpengaruh pada kekhawatiran negara-negara di sekitarnya, khususnya ASEAN. Secara konsisten dan konstruktif, ASEAN terus menekankan pendekatan CBMs dalam kesepakatan *Declaration on the Conduct of Parties in South China Sea* (DOC) yang disepakati Cina dan ASEAN tahun 2002. Perkembangan di meja perundingan memang cukup progresif, meskipun tidak berbanding lurus dengan situasi di lapangan mengingat insiden-insiden militerisasi masih berulang kali terjadi. Namun setidaknya itikad baik yang kini sedang dikembangkan sudah menuju ke arah tercapainya finalisasi *Code of Conduct* (COC) menyusul tercapainya *single draft* teks COC pada KTT ke-33 ASEAN pada bulan November 2018.

Menurut Prof. Purnomo Yusgiantoro, isu LCS menjadi krusial dalam upaya melindungi kedaulatan wilayah NKRI. Walaupun Indonesia tidak menjadi salah satu negara *claimant* dalam sengketa LCS, namun dari tinjauan posisi geografis Indonesia rentan terkena imbas dari konflik yang terjadi (Wawancara tanggal 5 Agustus 2019). Apalagi klaim wilayah berdasarkan *nine-dash line* Cina juga bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen Indonesia di Kepulauan Natuna. Karena itulah Indonesia berkepentingan mengambil peran dalam upaya memitigasi konflik di LCS. Diplomasi menjadi jalan terdepan yang ditempuh Indonesia, khususnya di tingkat ASEAN, untuk tetap aktif mengupayakan perdamaian

dan stabilitas di wilayah LCS dengan mendorong seluruh pihak untuk tetap mematuhi peraturan hukum internasional dan menghindari kegiatan militerisasi (non-militerisasi).

#### 4.1.1.2 Perang Dagang AS vs Cina

Perang dagang yang terjadi antara AS dan Cina sejak awal tahun 2018 masih terus berkejolak secara fluktuatif. Sempat mereda di akhir tahun 2018 dengan itikad mengadakan pertemuan untuk mendapatkan solusi terbaik mengenai tarif impor, namun tidak tercapainya kata sepakat mengakibatkan eskalasi perang dagang antar kedua negara berlanjut. Setelah pertemuan KTT G-20 di Osaka pada akhir bulan Juni 2019, AS menunjukkan kembali peluang untuk melanjutkan negosiasi. Namun pertemuan kedua negara di Shanghai pada akhir Juli 2019 pun lagi-lagi belum mendapatkan kemajuan yang berarti. Hingga ketegangan perang dagang AS-Cina kembali meningkat dramatis di bulan Agustus 2019. Trump mengumumkan kenaikan tarif 10 persen untuk tarif impor Cina senilai 300 miliar dolar AS dan efektif berlaku mulai 1 September 2019. Sebelumnya tarif ini sudah dinaikkan 25 persen. (Lihat Tabel 4.2)

**Tabel 4.2 Lini Waktu Perang Dagang AS-Cina 2018-2019**

22 Januari '18	AS menerapkan tarif terhadap produk impor Cina seperti panel surya dan mesin cuci
8 Maret '18	AS kembali menerapkan tarif impor baja dan aluminium tetapi berlaku untuk semua negara
2 April '18	Cina membalas dengan menetapkan tarif impor barang senilai 3 miliar dolar AS
17 April '18	Cina mulai memberlakukan anti-dumping tepung impor dari AS yang mencapai 1 miliar dolar AS
25 Mei '18	AS mengumumkan sanksi untuk perusahaan teknologi Cina, ZTE senilai 1,3 miliar dolar AS
15 Juni '18	AS kembali mengumumkan tarif 50 miliar dolar AS untuk barang impor yang diproduksi antara Juli dan Agustus 2018 dan dibalas dengan aksi resiprokal dengan menetapkan tarif senada yaitu 50 miliar dolar AS bagi barang yang diproduksi antara Juli-

	Agustus 2018
6 Juli '18	AS mengumumkan kenaikan tarif barang 25 persen senilai 34 miliar dolar AS dan dibalas dengan penumuman yang sama yaitu pemberlakuan tarif meningkat 25 persen
23 Agustus '18	AS mengumumkan tarif 16 miliar dolar AS dan dibalas oleh Cina dengan penetapan tari yang sama
24 September '18	AS mengumumkan tarif 10 persen pada tarif ekspor Cina senilai 200 miliar dolar AS yang diberlakukan hingga akhir tahun 2018. Sebaliknya, Cina menetapkan tarif 5-10 persen pada barang senilai 60 miliar dolar AS
1 Desember '18	AS dan Cina setuju untuk melakukan pertemuan membahas tarif baru
1 Maret '19	Trump menambah 90 hari batas pertemuan dagang dengan Cina
10 Mei '19	AS tingkatkan tarif hingga 25 persen untuk barang Cina senilai 200 miliar dolar AS dan dibalas oleh Cina dengan menetapkan tarif yang sama untuk barang AS senilai 60 miliar dolar AS yang diberlakukan mulai 1 Juni 2019
1 Agustus '19	AS menambah tarif 10 persen pada barang Cina periode 1 September 2019

**\*Diolah dari berbagai sumber**

Kebijakan saling meningkatkan tarif impor kedua belah pihak menjadi komponen pertikaian yang paling menonjol, selain kebijakan *non-tariff barrier* dalam perang dagang AS-Cina. Contoh terpopuler untuk kebijakan hambatan non-tarif yang diterapkan AS terhadap barang Cina adalah dimasukkannya produk teknologi Cina, Huawei, ke daftar hitam. Perang dagang yang sudah mencapai titik keseriusan sedemikian rupa tentu beresiko bagi perlambatan ekonomi global. Negara-negara berkembang akan menghadapi resiko nilai tukar dan melebarnya defisit neraca perdagangan serta melemahnya pertumbuhan ekonomi (Winarno, 2019).

Negosiasi perang dagang AS-Cina yang masih belum mendapatkan titik temu semakin memperbesar kekhawatiran dan keraguan akan masa depan konektivitas ekonomi global. ASEAN diproyeksikan mengalami *collateral damage* mengingat setiap kali pengurangan ekspor Cina ke AS

mencapai angka 10 persen maka akan mengurangi setidaknya 1,1 persen pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN (*Political Insight, 2018*). Perang dagang AS-Cina juga berpotensi merugikan ASEAN sebagai institusi karena tersendatnya finalisasi ASEAN *Economic Community Blueprint 2025*. Meskipun ada pula pandangan yang meyakini bahwa ketidakpastian global saat ini dapat menjadi peluang besar bagi ekonomi ASEAN jika dikaitkan dengan siasat relokasi industri Cina ke wilayah lain di ASEAN.

Bagaimanapun juga ketegangan AS-Cina dalam hal perdagangan juga berpotensi menjadi sumbu konflik yang berekses pada stabilitas keamanan kawasan. Bahkan beberapa kajian telah menganalisa mengenai keterkaitan perang dagang dengan meningkatnya eskalasi konflik di LCS. Seperti analisa yang dilakukan oleh Trinh Le (2018), yang menyebutkan bahwa manuver berdasarkan pesimisme yang dilakukan beberapa investor terbesar Cina yaitu *Morgan Stanley, Jefferies Group* dan *JPMorgan*, telah mengurangi kepemilikan saham mereka di Cina akibat kekhawatiran skenario perang dagang yang lebih besar. Jika situasi tersebut berlanjut, sangat memungkinkan jika Cina mengambil opsi memainkan kartu nasionalismenya dengan berperilaku lebih agresif dalam sengketa maritimnya di LCS. Situasi ini pada akhirnya menjustifikasi kutipan dari pernyataan seorang petualang Inggris *Sir Walter Reigh*: "*siapa saja yang menguasai laut (akan) menguasai perdagangan; barang siapa menguasai perdagangan dunia (niscaya akan) menguasai kekayaan dunia, dan pada akhirnya (menguasai dunia itu sendiri)*". Ini artinya perdagangan dan lautan selalu menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjuangan memenangkan supremasi global (Trinh Le, 2018).

#### **4.1.2 Konsep Indo-Pasifik dari Perspektif Indonesia sebagai Cikal Bakal ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)***

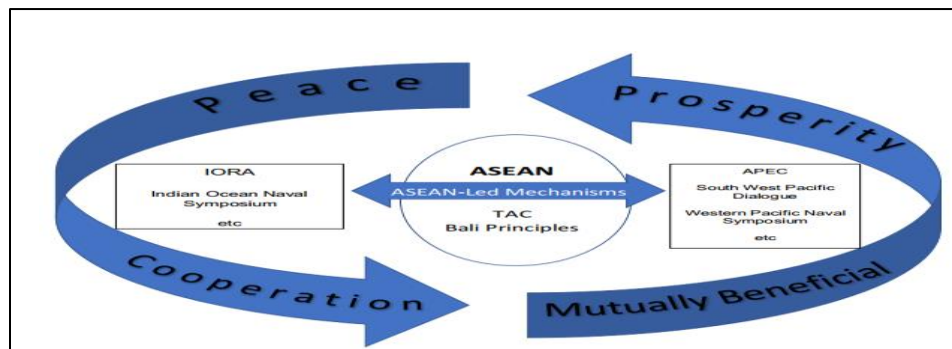
Peluncuran strategi “*Free and Open Indo-Pacific*” (FOIP) oleh Presiden Trump turut menjadi katalisator serangkaian reaksi dari negara-negara di kawasan. Beberapa diantaranya telah mengajukan konsep Indo-Pasifik dan memperkuat upaya untuk mengembangkannya. Indonesia termasuk salah satu diantaranya. Indonesia yang memiliki kedudukan geografi strategis di Asia Tenggara, berada tepat di pusat konvergensi antara Samudera India dan Pasifik. Beberapa tahun sebelum FOIP diluncurkan, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyarankan visi Indo-Pasifik di *EAS Summit*. Pendekatan yang saat itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa adalah menyodorkan prospek *Indo-Pacific Treaty* namun belum cukup mendapat sambutan baik.

Konsep eksplisit Indo-Pasifik belum diartikulasikan secara resmi di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menandai pergantian rezim RI. Namun pada akhir tahun 2014, penasihat kebijakan luar negeri Rizal Sukma menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri Presiden Jokowi akan lebih fokus dalam menjalin hubungan dengan wilayah selain Asia Pasifik dan menyinggung keterkaitan konsep Poros Maritim Dunia dengan hubungan antara Samudera India dan Pasifik, yang ia sebut dengan PACINDO (Parameswaran, 2014:7).

Hingga pada akhirnya perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai peningkatan rivalitas hegemoni AS dan Cina bercirikan pertentangan BRI vs FOIP mendesak Indonesia untuk mengambil sikap. Meninjau realitas persaingan politik internasional yang sedemikian dinamis membuat Indonesia perlu bergerak untuk tetap mengawal kepentingan nasional sedemikian hingga Indonesia beserta entitas regionalnya, ASEAN, terhindar dari perebutan pengaruh kekuatan-kekuatan besar. Indonesia juga

memandang revitalisasi *the Quad* berpotensi menjadi koalisi strategis kekuatan eksternal yang tidak melibatkan ASEAN (Acharya, 2019:3). Untuk itulah Indonesia bersikap tanggap dengan mengusulkan sebuah konsep Indo-Pasifik yang berpusat di ASEAN dengan menekankan prinsip-prinsip yang lebih inklusif.

Sosialisasi gagasan Indonesia mengenai konsep Indo-Pasifik yang akan didorong di tingkat ASEAN telah dilakukan sejak awal tahun 2018, tepatnya saat Kemlu RI menggelar Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM 2018). Pada kesempatan tersebut, Menlu Retno menyatakan perlunya memperkuat arsitektur kawasan sehingga ekosistem perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan tidak hanya terbangun di ASEAN, tetapi juga di Lingkar Samudera Hindia dan Samudra Pasifik, yaitu kawasan Indo-Pasifik (Kemlu, 2018). Untuk itu Menlu Retno menekankan bahwa Indonesia akan terus berkontribusi bersama ASEAN dalam mendorong kerja sama yang inklusif dan bukan kerja sama yang dilandasi kecurigaan atau bahkan persepsi ancaman. Di tahun 2018 inilah Indonesia gencar melancarkan diplomasinya di tingkat ASEAN, mengusung konsep Indo-Pasifik yang pertama diperkenalkan dengan *“an Indo-Pacific Framework for Mutually Beneficial Cooperation”*



**Gambar 4.9** *an Indo-Pacific Framework for Mutually Beneficial Cooperation*

Sumber: Dit. Kerja Sama Polkam ASEAN-Kemlu RI, 2018

Gagasan Indonesia tersebut menghendaki terbangunnya arsitektur kawasan yang dapat lebih memupuk rasa saling percaya (*confidence-building*) dan menumbuhkembangkan dialog (*habit of dialogue*). Penguatan arsitektur kawasan ini akan senantiasa berpegang pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan menghormati hukum internasional yang berlaku. Indonesia mengusulkan konsep ini akan menjadi dasar kerja sama melalui pendekatan *building block* baik secara bilateral dan plurilateral dengan memanfaatkan mekanisme yang sudah ada seperti IORA dan ASEAN *led-mechanism* sehingga tercipta *linkage* antara arsitektur di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia.

Selanjutnya, konsep tersebut secara intensif diperjuangkan di berbagai *proper meetings* ASEAN sepanjang tahun 2018 hingga pada 9 Agustus 2018, Menlu Retno secara formal memaparkan konsep kerja sama Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia pada pertemuan tingkat Menteri *EAS Summit* ke-8. Menlu Retno menyampaikan bahwa EAS akan menjadi *platform* ideal untuk menavigasi kerja sama di kawasan Indo-Pasifik dengan kekuatannya yang 'unik' (Weatherbee, 2019:12). Pada pertemuan di tingkat yang lebih tinggi beberapa bulan selanjutnya, yaitu pada *EAS Summit* ke-13, 15 November 2018 di Singapura, Presiden Jokowi menegaskan usulan pengembangan kerjasama Indo-Pasifik Indonesia. Kerjasama yang dimaksud akan difokuskan pada tiga bidang yaitu kerja sama maritim, termasuk dalam menanggulangi kejahatan di laut, kerja sama konektivitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kerja sama mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) secara inklusif (Kantor Staf Presiden, 2018). Langkah ke depan yang diusulkan Presiden Jokowi kepada ASEAN adalah melanjutkan proses konsultasi dengan negara mitra di EAS. Dalam hal ini, kerja sama yang penting untuk dijabaki adalah memperkuat CBMs seperti kerja sama dalam

pengembangan rezim perikanan yang berkelanjutan (*sustainable fisheries regime*) dan memerangi sampah plastik di laut (*marine plastic debris*).

Namun bukan hal yang mudah untuk meyakinkan ASEAN dengan berbagai orientasi kepentingannya masing-masing. Indonesia benar-benar bekerja keras untuk mendorong konsensus ASEAN atas pengajuan konsep Indo-Pasifik perspektif Indonesia, di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus bergulir. Penandatanganan *Asia Reassurance Initiative Act (ARIA)* oleh Presiden Trump pada 31 Desember 2018 yang semakin menegaskan komitmen FOIP sebagai kepentingan AS juga menjadi tantangan bagi Indonesia dalam memajukan konsep Indo-Pasifiknya. ARIA yang berupa alokasi dana senilai 15 Milyar Dolar AS untuk memperluas kerja sama pertahanan dan keamanan bagi mitra dan sekutunya. Beberapa hari setelah penandatanganan ARIA, yaitu pada tanggal 9 Januari 2019, Menlu Retno kembali menekankan arti penting Indo-Pasifik dalam agenda PPTM 2019. Sebagai teater geostrategis tunggal, Indo-Pasifik harus dihindarkan dari ajang perebutan sumber daya, konflik teritorial dan kedaulatan maritim. Dalam konteks ini, Indonesia mengajak ASEAN untuk proaktif merespon perubahan strategis di kawasan.

Kampanye Indonesia untuk Indo-Pasifik terus dilakukan. Selanjutnya, Jakarta menjadi tuan rumah penyelenggaraan *High-Level Dialogue (HLD) on Indo-Pacific Cooperation* pada tanggal 20 Maret 2019. HLD ini dihadiri para Menteri Luar Negeri atau deputy yang mewakili negara-negara ASEAN dan 8 mitra wicara ASEAN yang juga anggota EAS. Kegiatan bertema "*Towards a Peaceful, Prosperous and Inclusive Region*" ini menjadi bentuk lain upaya Menlu Retno untuk "menjual" konsep Indo-Pasifik Indonesia yang membutuhkan nilai sentralitas ASEAN. Perjuangan diplomasi Indonesia membuahkan hasil dengan disepakatinya konsep Indo-Pasifik yang ditawarkan Indonesia dengan mengakomodasi berbagai masukan dari negara ASEAN lainnya ke dalam sebuah *final text 'ASEAN Indo-Pacific*

*Outlook*'. Dokumen tersebut disepakati pada pertemuan ASEAN *Senior Officials' Meeting* (SOM) di Chiang Rai, Thailand pada 8 Maret 2019 (ASEAN, 2019). Dan puncaknya, dokumen tersebut disahkan sebagai '*ASEAN Outlook in the Indo-Pacific*' (AOIP) pada KTT ke-34 ASEAN tanggal 23 Juni 2009.

Bermodalkan sentralitas ASEAN, *outlook* ini juga dimaksudkan untuk memperkuat proses pembangunan Komunitas ASEAN dan memberikan momentum bagi *ASEAN-led mechanism*, terutama EAS yang akan menjadi *platform* utama untuk pelaksanaan dialog dan implementasi kerjasama Indo-Pasifik lebih lanjut (Saha, 2019:4). Terdapat 4 area kerja sama yang dituangkan dalam *outlook* tersebut, yaitu: (1) kerja sama maritim; (2) konektivitas; (3) UN SDGs 2030; dan (4) kerja sama di bidang ekonomi dan potensi kerja sama di bidang terkait lainnya, seperti pengembangan UMKM, sains dan riset teknologi, dan ekonomi digital.

Sebagai dokumen yang sudah disepakati bersama, AOIP diharapkan akan semakin menguatkan komitmen terhadap sentralitas ASEAN. Sentralitas ASEAN merupakan prinsip yang ditekankan dalam Piagam ASEAN dan beberapa dokumen kunci ASEAN lainnya seperti *ASEAN Community Vision: 2025 Forging Ahead Together*. Prinsip sentralitas harus terus dipertahankan ASEAN dalam setiap proses regional di dalam ASEAN sendiri dan dalam interaksinya dengan pihak eksternal. Karena itulah sentralitas ASEAN akan memberikan pijakan kuat bagi ASEAN dalam memainkan perannya di sepanjang proses pembangunan arsitektur kawasan serta menyikapi berbagai kepentingan kekuatan eksternal di luar ASEAN (Teodoro, 2016). Sentralitas ASEAN tentu juga harus didukung dengan kesatuan (*unity*). Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP. Marsudi dalam sesi Plenary ASEAN *Ministerial Meeting* ke 49<sup>th</sup> di Vientiane Laos. Menlu menjelaskan bahwa kesatuan dan sentralitas ASEAN merupakan hal yang penting dalam menghadapi tantangan regional, dinamika kawasan yang berkembang saat ini serta dalam menggali potensi

kerjasama demi mewujudkan Komunitas ASEAN dan Visi ASEAN 2025 (Wadrianto, 2016).

Kredibilitas ASEAN yang telah mencapai usia lebih dari setengah abad telah banyak diakui dalam tatanan internasional. Berbagai tantangan dalam merealisasikan integrasi regional tidak menggoyahkan komitmen ASEAN. Beragam perbedaan dari berbagai sisi kehidupan negara anggotanya yang berada pada satu kawasan yang sama tidak menyurutkan cita-cita ASEAN untuk hidup damai berdampingan. Kishore Mahbubani dan Jeffrey Sng dalam bukunya *the ASEAN Miracle: a Catalyst for Peace* (2017) menyebutkan bahwa pencapaian utama ASEAN di usianya yang menginjak 50 tahun adalah keberhasilan menciptakan iklim perdamaian, stabilitas dan kemakmuran. Terbukti dengan ekosistem perdamaian dan stabilitas yang diciptakan ASEAN, pertumbuhan ekonomi negara anggota mejadi lebih baik daripada rata-rata pertumbuhan dunia, sebagaimana yang diindikasikan dari data IMF tahun 2017. Data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan menyebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Filipina 6 persen, Kamboja 7,1 persen, Laos 7 persen, Myanmar 8,2 persen, dan Vietnam 5,9 persen, di atas rata-rata dunia sebesar 3,1 persen (IMF, 2017).

Keberhasilan yang telah diraih ASEAN inilah yang juga menjadi motivasi Indonesia untuk 'menularkan' stabilitas dan perdamaian di ranah yang lebih luas dan sedang menjadi pusat perhatian dunia, yaitu kawasan Indo-Pasifik (Wawancara dengan Dirjen/Kepala BPPK Kemlu, Dr Siswo Pramono, 15 Agustus 2019). Berbekal mekanisme kerjasama dalam organisasi yang sudah berjalan dengan baik, beberapa di antaranya melibatkan negara-negara di luar kawasan, ASEAN telah memiliki pijakan kuat untuk menjadikan mekanisme yang sudah ada sebagai *platform* kerja sama Indo-Pasifik. Dengan demikian ASEAN dapat terus berkomitmen mendorong kerja sama dan dialog sebagai modalitas untuk memperkuat

arsitektur kawasan yang telah terbangun dalam kerangka *ASEAN-led mechanism*. AOIP yang mengedepankan dialog dan kerja sama, bukan persaingan, dan menekankan pada kerja sama maritim sangat relevan dengan kebijakan pembangunan pertahanan. Salah satu sasaran Kebijakan Pertahanan Negara adalah terwujudnya kerja sama internasional bidang pertahanan dengan menganut kebijakan politik luar negeri bebas-aktif dan mengedepankan prinsip memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan sehingga pengelolaan keamanan regional untuk kepentingan bersama lebih terarah (Wawancara dengan Dirjen Strahan, Kemhan, Mayjen TNI Rizerius Eko Handisancoko, 10 Agustus 2019).

Dengan disepakati dan disahkannya AOIP, 10 negara anggota ASEAN harus menunjukkan komitmen dalam mematangkan tiap-tiap butir di dalam AOIP yang menjadi garis panduan untuk menetapkan strategi dan kebijakan di dalam pemerintahan masing-masing. Indonesia sebagai negara penggagas dan inisiator penting AOIP juga harus memanfaatkan dan memberdayakan hasil perjuangan diplomasinya ini sebagai modalitas penting dalam mengawal tujuan dan kepentingan nasional. Berdasarkan kepentingan nasional, khususnya dalam hal menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa yang merupakan esensi dari pertahanan negara.

#### **4.1.3 Pertahanan Negara dan Relevansi Poros Maritim Dunia**

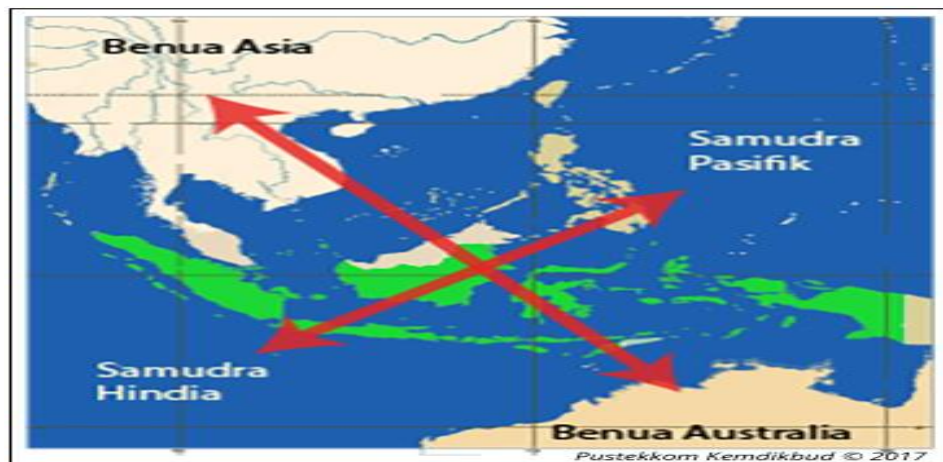
Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan dua pertiga wilayah lautan yang lebih luas dibandingkan daratan. Berdasarkan Rujukan Nasional Data Kewilayahan yang diluncurkan Badan Informasi dan Geospasial (BIG) pada 10 Agustus 2018, total luas wilayah NKRI mencapai 8,3 juta kilometer persegi mencakup wilayah darat seluas 1,9 juta kilometer persegi dan wilayah perairan seluas 6,4 kilometer persegi sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.3. Ini artinya luas wilayah perairan Indonesia mencapai 77 % dari total luas wilayah NKRI.

Tabel 4.3 Tabel Wilayah NKRI

Luas Daratan	1.900.000 Km <sup>2</sup>
<b>Luas Wilayah Kedaulatan:</b>	
• Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan	3.110.000 Km <sup>2</sup>
• Laut Teritorial	290.000 Km <sup>2</sup>
<b>Luas Wilayah Berdaulat:</b>	
• Zona Tambahan	270.000 Km <sup>2</sup>
• Zona Ekonomi Eksklusif	3.000.000 Km <sup>2</sup>
• Landas Kontinen	2.800.000 Km <sup>2</sup>
Luas Perairan Indonesia	6.400.000 Km <sup>2</sup>
<b>LUAS NKRI (DARAT + PERAIRAN)</b>	<b>8.300.000 Km<sup>2</sup></b>
Panjang Garis Pantai	108.000 Km
Jumlah Pulau	17.504 Sudah di submisi ke PBB sejumlah 16.671 (2018)

Sumber: BIG, 2018

Konstelasi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas semakin strategis dengan posisinya yang berada pada jalur perlintasan perdagangan dan transportasi internasional (lihat Gambar 4.10).



Gambar 4.10 Posisi Silang Wilayah Indonesia

Sumber: Kemdikbud, 2017

Posisi silang Indonesia ini berimplikasi pada peluang dan tantangan dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Menyadari kondisi tersebut, para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah merumuskan dan mengajukan Deklarasi Juanda pada tahun 1957, sebagai acuan bagi dunia internasional untuk mengakui wilayah kedaulatan maritim Indonesia. Deklarasi Juanda yang mengandung konsepsi “Negara Maritim Nusantara” menjadi landasan struktural dan legalitas bagi proses integrasi nasional Indonesia, sebagai negara maritim (Setiadji, 2017:3). Melalui Deklarasi Juanda pula, dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, laut bukan lagi dimaknai sebagai pemisah melainkan sebagai penghubung dan pemersatu wilayah kedaulatan.

Deklarasi Juanda menjadi penting mengingat produk hukum untuk mengatur wilayah laut setelah Indonesia merdeka masih menggunakan peninggalan kolonial, yaitu *Territoriale Zeeen Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 atau Ordonansi 1939 (Mauna, 2005:368-369), yang menetapkan batas laut teritorial 3 mil laut dari garis pantai. Sedangkan perairan antar pulau pada saat itu adalah wilayah internasional sehingga berimplikasi pada celah-celah perairan antar pulau di Indonesia yang berdampak pada masalah pertahanan keamanan dan ekonomi yang serius (Notohamijoyo, 2019:7). Pada kurun waktu 1949-1957, Indonesia harus menghadapi pemberontakan dari berbagai daerah yang ditunggangi oleh asing, seperti Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) dan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI/PERMESTA) yang melakukan *dropping* senjata di pantai-pantai yang tidak terpantau (Notohamijoyo, 2019: 8-9). Pihak asing yang terlibat sangat leluasa menyusup dan melarikan diri ke perairan selepas 3 mil yang diasumsikan sebagai perairan internasional, sehingga TNI mengalami kesulitan dalam menjaga kedaulatan negara. Deklarasi Juanda yang awalnya banyak ditentang negara lain karena dinilai bersifat unilateral pada akhirnya dapat diterima internasional dan selaras dengan penetapan resmi Konvensi

Hukum Laut Internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982. Indonesia selanjutnya meratifikasi UNCLOS melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS dan ditetapkan sebagai hukum positif internasional sejak 16 November 1994 yang berarti mengakui hak Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Wahyono, 2007:89).

Dalam kaitannya dengan pertahanan negara, ini berarti Indonesia harus senantiasa menitikberatkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakter kemaritiman yang kuat. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 angka 2 UU No. 3 Tahun 2001 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan “pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan”. Terlebih lagi letak strategis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran *Sea Lanes of Communication (SLOC)* dan lintas perdagangan *Sea Lanes of Trade (SLOT)*. Indonesia juga memiliki tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan wilayah perairan internasional di Utara dan Selatan sebagai konsekuensi diakuinya Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Itulah sebabnya eksistensi Indonesia dinilai penting, khususnya bagi negara lain yang membutuhkan pasokan energi dari Timur Tengah melalui Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Natuna dan perairan Sulawesi (Marsetio, 2018:6). Mengingat 4 *chokepoints* dari 9 *chokepoints* strategis dunia terdapat di Indonesia, maka Indonesia pun memiliki peran strategis sebagai stabilisator kawasan Asia Tenggara, khususnya dari perspektif keamanan maritim.

Selain itu dari sisi sumber daya kelautan, Indonesia sebagai negara maritim memiliki peluang untuk berdaulat secara ekonomi mengingat potensi kekayaan laut yang luar biasa. Kajian LIPI “Riset untuk Optimalisasi Potensi Hayati dan Ekonomi Laut Indonesia” yang diterbitkan pada 23 April 2019 menyebutkan bahwa potensi laut Indonesia sampai Maret 2019 berkisar 1.772 triliun Rupiah (LIPI, 2019). Angka ini senilai dengan 93% total

pendapatan APBN di Indonesia tahun 2018. Jumlah kekayaan laut Indonesia yang dikalkulasi secara kasar tersebut diambil dari nilai mentah potensi kekayaan Indonesia yang mencakup perikanan (312 triliun), lamun (4 triliun), terumbu karang (45 triliun), mangrove (21 triliun), potensi kekayaan pesisir (560 triliun), bioteknologi (400 triliun), minyak bumi (210 triliun) dan transportasi laut (200 triliun). Namun sayangnya dalam sebuah ajang kompetisi *start-up 'Thinkubator'* di Jakarta pada 28 Maret 2019, Menko Bidang Kemaritiman menyatakan bahwa potensi sektor maritim Indonesia baru dieksplorasi 8-9 persen saja (*Kompas,2019*).

Dari konsideran *security and prosperity* di atas, paradigma Indonesia sebagai negara maritim memang harus lebih ditegakkan. Melalui visi Poros Maritim Dunia (PMD) pemerintahan Presiden Jokowi bertekad membangun kembali kejayaan maritim Indonesia yang bermuara dari jejak-jejak sejarah Nusantara (era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit) dan momentum lahirnya Deklarasi Juanda di era pasca kemerdekaan. Gagasan PMD menjadi agenda baru yang diumumkan Presiden Jokowi di forum internasional pada KTT EAS ke-9 di Myanmar, pada 13 November 2014. Sebagai langkah awal implementasi visi PMD, Presiden Jokowi merancang lima pilar PMD sebagai agenda nasional yang harus turut diimplementasikan oleh seluruh kalangan, baik pemerintah maupun rakyat, tanpa terkecuali. *Pertama*, membangun kembali budaya maritim Indonesia yang artinya identitas serta kemakmuran dan masa depan bangsa diindikasikan kuat dari upaya dan kebijakannya dalam mengelola laut. *Kedua*, bangsa Indonesia harus mengelola sumber daya laut sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan. *Ketiga*, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim yang di antaranya dilakukan dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, industri perkapalan, dan pengembangan pariwisata maritim. *Keempat*, melaksanakan diplomasi maritim. *Kelima*, membangun kekuatan pertahanan maritim.

PMD sejatinya adalah sebuah tekad dan cita-cita pemerintahan RI di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri dan kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia demi kepentingan nasional (Sambodo, 2019). Langkah mewujudkan PMD tentu berkorelasi erat dengan pembangunan pertahanan negara. Dengan cita-cita membangun kesejahteraan rakyat dari pengembangan sumber daya maritim sebagai tulang punggung perekonomian, maka Indonesia perlu membangun sistem pertahanan dan keamanan yang kuat dan tangguh sehingga dapat menopang pemanfaatan “*domain*” yang dibangun menjadi kekuatan strategis secara geoekonomi dan geopolitik (Bappenas, 2015:8). Namun demikian, Indonesia masih menghadapi kendala dalam mewujudkan pertahanan yang tangguh mengingat anggaran pertahanan yang dinilai jauh dari ideal. Tahun 2019 ini alokasi anggaran untuk Kemhan adalah senilai Rp 108,36 triliun. Nilai tersebut setara dengan 0,73 persen PDB jika mengacu Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa PDB Indonesia di tahun 2018 sebesar Rp 14.837,4 triliun. Menurut pengamat pertahanan Connie Rahakundinie Bakrie, anggaran tersebut sangat tidak sesuai dengan besarnya mimpi untuk mewujudkan PMD (Wawancara 13 Agustus 2019). Menurut Connie, Indonesia hendaknya meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan sehingga bisa kembali menunjukkan taringnya dalam menangkal segala ancaman bagi pertahanan sebagaimana di era Presiden Soekarno yang mencatatkan anggaran pertahanan hingga 29 persen dari PDB. Jika Indonesia belum mampu meningkatkan anggaran pertahanan, maka memperdalam kerja sama pertahanan dengan negara lain menjadi opsi strategis, khususnya kerja sama di bidang keamanan maritim dengan memfokuskan pada peningkatan penguasaan industri dan teknologi pertahanan.

Sementara itu, menurut Laksdya Tni (Purn) Robert Mangindaan, konsep PMD yang berpengaruh besar pada perencanaan pengelolaan potensi maritim untuk kemakmuran rakyat juga tidak boleh menafikkan faktor intelijen sebagai penyedia informasi (Wawancara 12 Agustus 2019). Dalam hal ini intelijen maritim akan menjadi kebutuhan penting dalam mengelola ancaman. Pada tataran ini, intelijen tidak lagi sebatas *military objectives*. Domain maritim yang kian luas telah menjadikan PMD harus berada pada aras *national objective* sehingga pihak yang terlibat pun lebih luas, tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI AL maupun Kementerian Pertahanan semata. Dalam konteks inilah *domain maritime awareness* menjadi keharusan seiring pembangunan pertahanan yang diimplementasikan untuk mendukung terwujudnya PMD.

Strategi pertahanan yang ditujukan untuk menciptakan kekuatan pertahanan terpadu selanjutnya perlu dirumuskan dan dibangun sehingga memiliki andil penting dalam realisasi Indonesia sebagai PMD. Hal ini pun ditegaskan dalam beberapa dokumen strategis pertahanan, seperti Buku Putih (2015:101) yang menyebutkan “postur pertahanan negara diwujudkan melalui pembangunan kekuatan pertahanan negara yang tidak terlepas dari visi, misi, Nawacita dan kebijakan PMD...” dan tersurat pula dalam Lampiran Permenhan RI No. 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 pada butir Pembangunan Postur Pertahanan Negara, yaitu bahwa: “pembangunan postur pertahanan negara diarahkan untuk mewujudkan postur pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dengan prinsip defensif aktif dalam rangka mendukung PMD”.

Sehubungan dengan PMD pula, Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen Indonesia yang secara langsung berkepentingan untuk berperan menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudera Hindia (Indo-Pasifik) sehingga kawasan tersebut tetap aman dan damai bagi perdagangan dunia, bukan menjadi ajang perebutan sumber daya alam, pertikaian wilayah

dan persaingan supremasi maritim (Marsetio, 2018:17). Ini artinya konsep kerjasama Indo-Pasifik yang digagas Indonesia dan diterima sebagai *outlook ASEAN* sangat selaras dengan PMD. Hal ini juga dikonfirmasi Menlu RI, Retno Marsudi pada saat memberikan sambutan dalam pembukaan *High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation* di Jakarta pada 20 Maret 2019. Pada kesempatan tersebut Menlu Retno menyampaikan bahwa kerangka kerjasama Indo-Pasifik yang inklusif dan transparan akan selaras dengan visi Indonesia sebagai PMD.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Pengaruh Lingkungan Strategis di Indo-Pasifik bagi Pertahanan Negara: Ancaman dan Peluang**

Dinamika lingkungan strategis telah banyak menunjukkan transformasi di kawasan, khususnya dalam hal pergeseran hegemoni AS yang secara gradual tereduksi oleh pesatnya kebangkitan Cina. Sebagai bagian dari langkah *containment policy*-nya, AS telah mengembangkan konsep geostrategi Indo-Pasifik. Indo-Pasifik pada prinsipnya merupakan perluasan semantik geopolitik dari sekedar Asia-Pasifik yang diindikasikan dengan penyertaan negara-negara di lingkaran Samudera Hindia, khususnya India.

Dalam mencermati perubahan di kawasan berdasarkan kajian teoritis analisis lingkungan strategis, maka rivalitas AS-Cina yang semakin tajam dan menimbulkan dilema keamanan merupakan faktor lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan Indonesia dalam langkah-langkah pembangunan pertahanan negara dalam sebuah strategi yang lebih komprehensif. Analisis lingkungan strategis selanjutnya akan menjadi dasar untuk memetakan peluang dan ancaman yang menjadi bagian inheren lingkungan strategis (Yarger, 2006:2).

Berdasarkan analisis lingkungan eksternal, perlu dilakukan

identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi suatu negara terhadap perubahan tersebut sehingga dapat dirumuskan strategi untuk mengambil manfaat dari berbagai peluang yang muncul dan menghindari atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial yang muncul.

Dari hasil penelitian pada sub bab sebelumnya telah dikaji bahwa rivalitas AS-Cina saat ini semakin memuncak dalam wujud *flashpoint* yang semakin mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan, yaitu ketegangan di Laut Cina Selatan dan Perang Dagang AS-Cina. Ancaman dan peluang yang perlu diidentifikasi dalam kedua *flashpoint* tersebut adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1.1 Ketegangan di Laut Cina Selatan**

Kompetisi strategis AS-Cina saat ini sedemikian kompleks hingga banyak pihak kini memunculkan spekulasi akan kemungkinan konflik yang lebih luas dan terbuka. Salah satu yang menjadi mandalanya adalah Laut Cina Selatan (LCS) yang menjadi salah satu indikator lingkungan strategis. Berdasarkan teori analisa lingkungan strategis menurut Yarger (2006:17), lingkungan strategis mencakup konteks internal dan eksternal di mana peluang dan ancaman perlu dipetakan dari lingkungan eksternal karena akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan sebuah negara dalam menjalin relasi dengan tatanan dunia, dalam hal ini negara-negara dan berbagai aktor.

Sifat (*nature*) dari lingkungan strategis yang dirangkum *US Army War College* dalam sebuah akronim VUCA, menggambarkan tatanan dunia yang dipenuhi dengan ancaman yang penuh ketidakpastian sehingga menyebabkan konflik menjadi sulit diprediksi (Yarger, 2006: 17-18). VUCA yang mencakup *volatility* (ketidakstabilan, penuh gejolak bercirikan kekerasan), *uncertainty* (ketidakpastian akibat munculnya masalah baru), *complexity* (kompleksitas, rumitnya bagian-bagian dari permasalahan), dan *ambiguity* (ketidakjelasan/ambiguitas dalam menafsirkan masalah sehingga

muncul berbagai konklusi dan solusi baik yang positif maupun negatif) tercermin jelas dalam situasi LCS yang terus mengalami peningkatan ketegangan.

*Volatility* pada LCS dapat dijelaskan dari situasi yang penuh gejolak akibat ketegangan yang diwarnai tindak militerisasi baik oleh AS dan Sekutunya maupun Cina. *Uncertainty* pada sengketa wilayah LCS nampak pada tindakan Cina untuk membangun pulau-pulau *hybrid* sebagai sebuah isu baru yang menjadi kontroversi. *Complexity* dalam isu LCS mengacu pada kerumitan pada tumpang tindih sengketa wilayah yang melibatkan 6 negara dan belum terselesaikan. Eskalasi kehadiran militer AS-Cina, dan berbagai ancaman non-tradisional yang turut berproliferasi dalam konteks keamanan maritim dengan segala dimensinya menambah kompleksitas permasalahan di LCS. Sedangkan ambiguitas tercermin dari persistensi Cina untuk menegakkan klaim wilayah di perairan LCS berdasarkan *nine-dash line*, padahal hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan hukum internasional, UNCLOS 1982. Negara *claimants* lainnya merasa keberatan dengan parameter sembilan garis imajiner tersebut sehingga memunculkan bibit konflik. Seperti gugatan yang diajukan Filipina atas klaim Cina tersebut ke pengadilan internasional (PCA) dan pada tahun 2016, PCA telah memutuskan bahwa *nine-dash line* tidak memiliki dasar hukum. AS pun memunculkan ambiguitas melalui sikapnya yang terus meningkatkan operasi kebebasan navigasi (FONOP) di LCS sedangkan AS sendiri belum meratifikasi UNCLOS 1982. Situasi tersebut telah mengusik Cina yang berkeyakinan bahwa klaimnya terhadap beberapa pulau di LCS adalah sah sehingga FONOP yang dilakukan AS diperhitungkan sebagai ancaman bagi keamanan nasional Cina.

Di sisi lain, perebutan pengaruh melalui penguasaan laut di LCS juga sejalan dengan teori Mahan yang mengkaji kecenderungan kekuatan besar maritim seperti AS dan Cina untuk menggunakan laut sebagai sarana

pemenuhan kebutuhan dan kepentingan negaranya. Kekuatan laut selanjutnya akan menjadi bagian dari upaya pertahanan untuk menjaga fungsi laut dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Ancaman dan peluang yang kemudian dapat dipetakan berdasarkan analisis lingkungan strategis di atas, adalah sebagai berikut:

a. **Ancaman**

- 1) Instabilitas kawasan akibat aksi saling provokasi dalam bentuk-bentuk militerisasi dan agenda *power projection* lainnya. Instabilitas ini berpotensi membangkitkan polarisasi konstelasi global yang bersifat bipolar yang dikhawatirkan merebak menjadi Perang Dingin jilid ke-2
- 2) Tantangan bagi isu keamanan maritim yang di antaranya termanifestasi dalam ancaman non-tradisional seperti *illegal fishing*, perompakan dan *human and drugs trafficking*.

b. **Peluang**

- 1) Negara-negara di kawasan masih berpeluang untuk memitigasi ketegangan dengan yang terjadi di LCS dengan mengembangkan kerja sama yang berlandaskan CBMs. Setelah tercapainya kesepakatan DOC antara ASEAN-Cina pada tahun 2002, kini ASEAN-Cina sudah mencapai kemajuan berarti dalam proses negosiasi COC yang akan menjadi tata perilaku dalam menyikapi insiden yang terjadi di lapangan;
- 2) Kerja sama maritim yang dikembangkan di bawah payung DOC turut memberikan kesempatan bagi peningkatan kapasitas negara-negara pesertanya seperti *Workshop on Safety of Navigation and Communication at Sea* yang diselenggarakan di Manado pada bulan Desember 2018 sebagai realisasi rencana aksi yang ditetapkan oleh ASEAN-China *Joint Working Group* on DOC. Contoh lainnya adalah

kerja sama latihan Angkatan Laut yang pertama kali dilakukan antara militer ASEAN-Cina pada 22 Oktober 2018 di lepas pantai Provinsi Guandong, Cina. Kerja sama yang dimaksudkan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menghindari terjadinya konfrontasi militer ini relevan dengan teori kerja sama menurut Holsti. Kerja sama yang bermula dari adanya masalah di tingkat regional dan global menjadi hasil dari pendekatan, proses tawar menawar, diskusi dan negosiasi hingga akhirnya berunding untuk mengajukan suatu perjanjian yang memuaskan semua pihak.

Berdasarkan ancaman dan peluang tersebut di atas, maka pemerintah perlu lebih intensif memastikan efektivitas kerja sama yang menjadi peluang bagi memajukan kepentingan nasional, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pertahanan. Kerja sama yang ditujukan untuk menghadapi ancaman bersama di kawasan dengan mengedepankan CBMs pada akhirnya akan menciptakan *peaceful environment* untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat.

#### **4.2.1.2 Perang Dagang AS vs Cina**

Perang Dagang antara AS dan Cina turut mewarnai dinamika lingkungan strategis global yang menonjol di Abad 21. Perang ini dipicu oleh ambisi Presiden Trump yang menghendaki peningkatan kinerja perekonomian dengan lebih menerapkan proteksionisme. Adanya ketimpangan nilai kerja sama perdagangan antara AS-Cina di mana Cina menguasai pangsa impor AS senilai 21,6 persen sedangkan AS hanya mengakses 8,4 persen pasar impor Cina, menjadikan Trump ambisius untuk menyeimbangkan nilai perdagangan antara keduanya. Langkah yang kemudian diambil oleh Presiden Trump adalah menaikkan tarif impor

(pengenaan tarif tinggi bagi barang Cina yang masuk ke AS) dan direspon dengan aksi retaliasi secara resiprokal oleh Cina.

Selain menerapkan hambatan tarif, AS juga berupaya memanfaatkan kekuatan hegemoninya di berbagai negara untuk melakukan aksi unilateral yang ditujukan untuk menekan Cina. Dalam kasus Huawei, misalnya, pihak berwajib Kanada melakukan penangkapan terhadap *Chief Financial Officer Huawei*, Meng Wanzhou, pada bulan Desember 2018. Pemerintah AS lah yang menginstruksikan hal tersebut dengan dalih pelanggaran yang dilakukan Huawei yaitu menjual komputer tertentu kepada Iran (yang dijatuhi embargo oleh AS).

Tindakan AS sebagai sebuah strategi berkorelasi dengan pemikiran teori Gray bahwa "*strategy is the bridge that relates military power to political purpose*" yang berarti juga bahwa strategi tidak hanya mengandalkan kekuatan militer atau *hard power* untuk mencapai tujuan kemenangan, dalam hal ini keunggulan ekonomi. Strategi semacam ini juga diungkapkan Clausewitz mengenai perang yang menjadi perpanjangan dari politik, sehingga dalam melaksanakan peperangan tidak berarti harus melakukan pertempuran yang menggunakan kekuatan senjata atau militer. Menurut Gray (1999:17), hal ini disebabkan karena peperangan itu bisa terjadi dengan waktu, tujuan serta tempat tertentu sesuai dengan kebijakan politik dari negara yang bersangkutan.

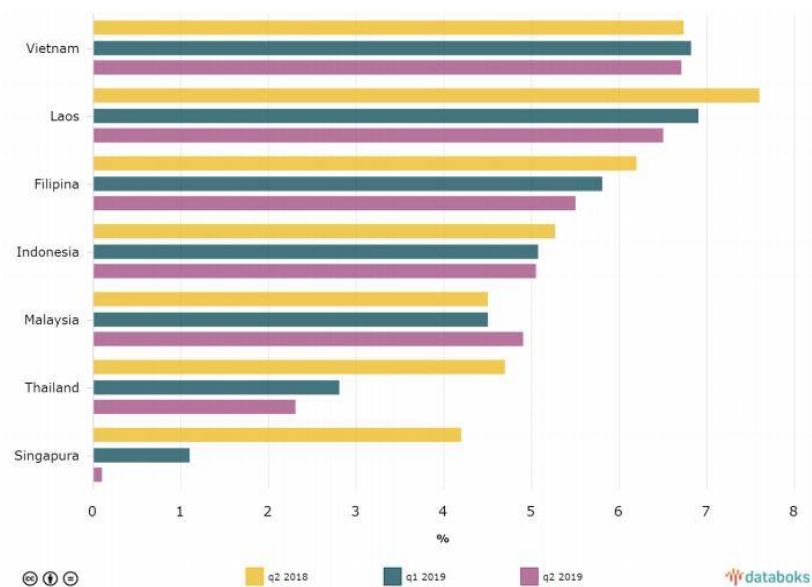
Dengan menggunakan paradigma analisis lingkungan strategis yang mendasarkan pada aspek VUCA, maka *volatility* perang dagang tercermin pada gejolak dan gangguan pertumbuhan ekonomi berpotensi menjadi konflik dan pengerahan kekuatan militer. Kajian Trinh Le (2018) sebagaimana telah diulas pada hasil penelitian sub bab 4.1.1.2, mengungkapkan bahwa perang dagang yang berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Cina menjadikan Cina memilih opsi untuk lebih agresif dalam sengketa maritim di LCS dengan mendasarkan pada argumentasi nasionalisme bahwa AS telah

mengganggu kedaulatan Cina atas nama kebebasan navigasi. Isu perang dagang juga menyiratkan *uncertainty* akibat belum tercapainya keberhasilan negosiasi untuk menyelesaikan hambatan tarif maupun non-tarif yang diberlakukan. Yang terjadi justru peningkatan eskalasi perang dagang dalam babak baru yang lebih dramatis. Terakhir AS menambahkan lagi beban tarif senilai 10 persen pada barang Cina per September 2019, setelah sebelumnya sudah meningkatkan tarif hingga 25 persen untuk barang Cina senilai 200 miliar Dolar AS pada Mei 2019. *Complexity* diindikasikan dari adanya sisi-sisi lain dari Perang Dagang AS-Cina seperti isu hak kekayaan intelektual dan unsur kompetisi teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang dalam jaringan akses internet 5G. Akibatnya AS juga menerapkan hambatan non-tarif dengan melarang masuknya perusahaan teknologi asal Cina, Huawei, ke AS karena alasan keamanan siber. Pada akhirnya Perang Dagang AS-Cina telah menghadirkan ambiguitas akan makna dan motif di balik perang dagang. Beberapa pihak menilai perang dagang hanya semata-mata bagian dari motif kampanye politik Trump yang mengusung jargon anti-imigran dan anti-impor. Namun di sisi lain, gendang Perang Dagang AS-Cina juga dirasa makin nyata. Ekses Perang Dagang pada resiko perlambatan perdagangan global salah satunya dinyatakan oleh Lembaga Riset ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office (AMRO)*. Skenario terburuk eskalasi perang dagang akan berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi kawasan sebanyak 40 basis poin (AMRO, 2019).

Situasi lingkungan strategis semacam ini perlu terus dicermati, khususnya dalam konteks tinjauan peluang dan ancaman. Melalui pendekatan VUCA di atas, setidaknya Perang Dagang AS-Cina berpotensi memunculkan ancaman dan peluang sebagai berikut:

### a. Ancaman

Ekskalasi Perang Dagang AS-Cina yang belum mereda berpotensi menjadi ancaman nyata bagi pertumbuhan ekonomi global, termasuk Asia Tenggara. Bahkan berdasarkan data *Trading Economics*, negara ASEAN dengan perekonomian yang maju seperti Singapura pun terancam resesi. Singapura telah memangkas pertumbuhan ekonomi tahun 2019, yang sebelumnya di kisaran 1,5-2,5 persen menjadi 0-1 persen. Pertumbuhan ekonomi di Thailand juga melambat 0,5 persen dari 2,8 persen pada kuartal I 2019 menjadi 2,3 persen pada kuartal II 2019. Indonesia juga tidak luput dari perlambatan ekonomi sebagai dampak perang dagang. Pada kuartal II 2019, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,05 persen, merosot dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya pada angka 5,27 persen. (Lihat Gambar 4.11).



**Gambar 4.11 Dampak Perang Dagang terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN**

Sumber: *Trading Economics*, 2019

- 1) Ancaman resesi global menjadi spekulasi banyak pengamat ekonomi terkait eskalasi perang dagang. Resesi yang terjadi

dapat mengakibatkan penurunan secara simultan seluruh aktivitas ekonomi, seperti lapangan kerja, investasi dan keuntungan perusahaan. Kondisi semacam ini tentu dapat menimbulkan dampak *spillover* permasalahan sosial dan politik keamanan. Menurunnya kesejahteraan rakyat tentu akan menimbulkan gejolak sosial hingga akhirnya timbul ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atas nama demokrasi dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan. Apabila pemerintah lambat merespon dan mengelola stabilitas politik di ambang krisis ekonomi, ancaman *chaos* sebagaimana pernah terjadi pada krisis moneter 1997-1998 bukan mustahil terjadi.

- 2) Perang Dagang juga diwarnai ancaman keamanan siber akibat kompetisi teknologi yang berpotensi digunakan sebagai alat *spionase* sebagaimana terjadi pada kasus Huawei.

**b. Peluang**

- 1) Akibat dampak Perang Dagang AS-Cina terhadap perlambatan ekonomi beberapa negara lainnya tentu menjadikan negara-negara di kawasan harus mampu menangkap peluang untuk terus mempererat kerja sama ekonomi perdagangan.
  - a) Di tingkat ASEAN, momentum perang dagang sudah seharusnya menjadi pendorong penyelesaian perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.
  - b) Secara internal, Indonesia juga perlu aktif mendorong investasi melalui partisipasi yang selama ini sudah berjalan dengan AS dalam kerangka *Trade Investment Framework Agreement*.
  - c) Dalam ranah ekonomi domestik, pemerintah juga perlu terus memperkuat infrastruktur ekonomi kerakyatan yang

dapat menjadi penyelamat perekonomian nasional di saat mengalami dampak sistemik dari sebuah krisis global. Koperasi-koperasi dan usaha kecil menengah akan menjadi kunci revitalisasi ekonomi kerakyatan. Langkah yang dapat dilakukan di antaranya adalah diversifikasi produk ekspor yang diiringi pengembangan kemudahan bisnis dan peningkatan daya saing produk domestik. Pemberdayaan otonomi daerah juga semakin penting untuk menginventarisasi produk unggulan daerah yang potensial untuk memacu ekspor dari UMKM. Hal ini menjadi urgensi dalam menciptakan ketahanan ekonomi mengingat efek krisis global yang diperparah dengan lemahnya struktur perekonomian kerakyatan dapat berpotensi memicu perpecahan dan konflik. Dalam hal ini pemerintah perlu memfasilitasi kiprah produk domestik dalam perdagangan internasional melalui mekanisme kerja sama.

- 2) Terkait ancaman isu keamanan siber, Indonesia juga berpeluang untuk meningkatkan pertahanan siber yang akan berperan signifikan dalam fungsi perlindungan data, antisipasi *cyberterrorism*, dan perlindungan bagi obyek-obyek vital negara yang strategis dari kejahatan siber

Identifikasi peluang dan ancaman terhadap dua *flashpoint* kunci di kawasan Indo-Pasifik di atas merupakan komponen analisis *scanning* sebagaimana disampaikan Bandoro dalam Pedrason (2019:7-8). Komponen ini akan memberikan andil dalam pertimbangan menentukan langkah berikutnya menuju tercapainya suatu strategi. Tahap berikutnya dalam komponen analisis setelah *scanning* adalah *monitoring*, *forecasting*, dan

*assesment* (dalam hal ini mengamati dan mengikuti pola persaingan AS-Cina) hingga mencapai pada tahap *policy measures*. Berangkat dari serangkaian aktivitas analisis tersebut, maka Indonesia semestinya merespon dinamika lingkungan strategis dengan segala *flashpoint* yang ditimbulkan dengan tetap bersandar pada politik luar negeri bebas aktif, khususnya dalam menyikapi hubungan bilateralnya dengan AS maupun Cina.

Langkah kebijakan yang diambil tentu juga didasari pada kepentingan nasional. Dengan AS, Indonesia perlu terus mengembangkan kemitraan strategis yang selama ini telah berjalan dalam kerja sama politik dan pertahanan. AS yang memiliki reputasi sebagai penyedia "payung" keamanan di kawasan Indo-Pasifik harus tetap dirangkul untuk mendukung peningkatan *deterrence* dalam konteks kekuatan pertahanan Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga perlu memanfaatkan kemitraan dengan Cina yang sudah menjejak pada tahap *strategic comprehensive partnership* untuk kepentingan di bidang ekonomi, khususnya dalam hal investasi infrastruktur.

Hal ini juga menjadi pembahasan dalam penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini yang menyimpulkan bahwa Indonesia harus memanfaatkan *alignment* dari berbagai lini secara berimbang, termasuk dengan AS dan Cina. Namun demikian *alignment* yang dikembangkan dengan Cina tidak boleh diarahkan dalam bentuk aliansi pertahanan sehingga Indonesia juga tetap bebas dan aktif untuk tetap menjalin *alignment* dengan lawan politik Cina, yaitu AS (Montratama, 2016:9). Selain itu, Indonesia juga harus tetap mengarusutamakan ASEAN sebagai *cornerstone* politik luar negeri Indonesia dalam mendukung aspirasi negara-negara ASEAN, khususnya yang terlibat dalam sengketa wilayah di LCS.

Dengan demikian Indonesia tetap bisa menjaga kredibilitasnya sebagai *natural leader* sekaligus *honest broker* di tengah hingar bingar proyeksi kekuatan yang dilakukan negara-negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Dalam konteks inilah Indonesia telah tampil untuk menawarkan

sebuah konsep Indo-Pasifik yang lebih inklusif dengan tujuan untuk memitigasi ketegangan yang masih terus berkembang seiring diskursus Indo-Pasifik. Melalui proses perundingan di tingkat ASEAN, konsep ini telah disepakati menjadi sebuah *outlook*, yaitu *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang diharapkan akan terus mengedepankan kerja sama guna memperkuat arsitektur kawasan sehingga tercipta suatu lingkungan yang stabil dan penuh perdamaian (*peaceful environment*) sebagai prasyarat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

#### **4.2.2 Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara**

Diplomasi Indonesia telah sukses memajukan konsep Indo-Pasifik di tingkat ASEAN hingga *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) yang bermuara dari perspektif Indonesia kini diterima sebagai *outlook* kolektif dan disahkan pada KTT ke-34 ASEAN, pada 23 Juni 2019. AOIP tentu memiliki makna strategis dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang didominasi oleh pertarungan hegemoni AS-Cina serta berbagai *flashpoint* di kawasan yang akan menghadirkan tantangan bagi pertahanan negara.

Dokumen tersebut memuat garis kebijakan ASEAN mengenai ruang lingkup, tujuan, prinsip, area kerja sama dan mekanisme yang akan digunakan. Dokumen ini akan menjadi cara pandang atau wawasan bagi ASEAN dalam melihat Indo-Pasifik sebagai sebuah kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi, mengedepankan dialog dan kerjasama, menitikberatkan pembangunan untuk kesejahteraan dan menjadikan aspek maritim sebagai elemen tata kawasan. Dalam AOIP disebutkan bahwa mekanisme inti yang akan memfasilitasi berbagai kerja sama nantinya adalah *East Asia Summit* (EAS). Selain memberdayakan forum EAS, pembahasan yang lebih strategis dan kerja sama yang lebih praktis juga dapat menggunakan mekanisme *ASEAN Plus One*, *ASEAN Regional Forum* (ARF),

dan *ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) Plus*. Adapun lingkup kerja sama AOIP yang tersurat pada butir V no.13 – 20 mengenai *Areas of Cooperation* (Lihat Lampiran 2), mencakup kerja sama sebagai berikut:

**a. Kerjasama Maritim**

Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang muncul terkait isu-isu maritim seperti, sengketa wilayah maritim, eksploitasi sumber daya maritim, dan problem lingkungan hidup di wilayah maritim. Dengan menekankan pada prinsip universal hukum internasional, termasuk diantaranya adalah UNCLOS 1982, kerja sama di bidang maritim juga dapat diarahkan untuk memperkuat penyelesaian terkait keamanan maritim, penyelundupan narkoba, perompakan di laut, perdagangan manusia, dan berbagai kejahatan transnasional lainnya.

**b. Kerjasama Konektivitas**

Kerjasama ini akan mengeksplorasi area kerjasama yang akan memperkuat *Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025*, dengan tujuan untuk lebih membangun infrastruktur untuk tujuan integrasi antar wilayah sehingga lebih mendukung laju pertumbuhan ekonomi, termasuk memberikan kontribusi bagi penguatan konektivitas *people-to-people*

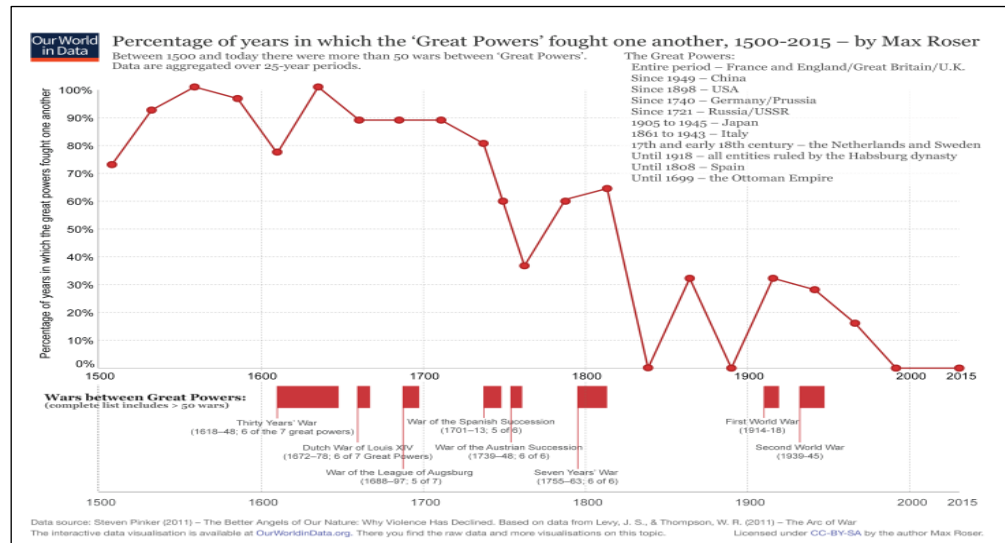
**c. Kerjasama untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (UN Sustainable Development Goals-SDGs 2030)**

Target SDGs 2030 yang dianggap sejalan dengan *ASEAN Community Vision 2025* dan visi EAS secara lebih luas akan menjadi tujuan di dalam memajukan kerja sama dalam kerangka AOIP. Hal ini di antaranya dapat dilakukan melalui kerjasama penggunaan ekonomi digital dan meningkatkan kerjasama ASEAN *Center for Sustainable Development Studies and Dialogue* dengan institusi relevan lainnya

**d. Kerjasama Ekonomi dan Potensi Kerjasama di Bidang Terkait lainnya**

Area kerjasama ini meliputi kerjasama UMKM, sains, riset dan pengembangan teknologi, manajemen bencana dan perubahan iklim, persiapan menghadapi revolusi industri 4.0, ekonomi digital, dan lain sebagainya.

Menilik lingkup area kerja sama yang dituangkan dalam AOIP, dapat disimpulkan bahwa *heavy* (titik berat) kerja sama AOIP memang lebih ke arah ekonomi, tetapi beberapa kerja sama lainnya tetap dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertahanan negara. Dalam hal ini pemetaan ancaman menjadi dasar penting untuk menjajaki kerja sama dalam konteks pertahanan. Dari tinjauan ancaman belum nyata, persaingan antara negara-negara besar seperti AS *versus* Cina memang dikhawatirkan berpotensi memantik konflik terbuka dengan pengerahan kekuatan militer yang berimplikasi pada stabilitas keamanan negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Banyak spekulasi bermunculan terkait kemungkinan pecahnya rivalitas AS-Cina menjadi sebuah perang terbuka. Spekulasi ini juga dikaitkan dengan prediksi jebakan *Thucydides* yang menjelaskan fenomena tentang kebangkitan suatu negara sebagai kekuatan baru yang mengancam hegemoni penguasa dunia lama hingga berujung pada perang. Ramalan tersebut kini dikaitkan dengan rivalitas AS-Cina dan menjadi obyek kajian akademis. Dari perspektif realis, prediksi jebakan *Thucydides* bisa saja diproyeksikan mendekati kenyataan. Namun sebenarnya optimisme dunia untuk terhindar dari perang antar negara besar juga perlu dikembangkan berdasarkan data yang menunjukkan bahwa tren pecahnya konflik bersenjata atau perang antara negara-negara besar telah menurun drastis sejak berakhirnya era Perang Dingin (Lihat Gambar 4.12)



**Gambar 4.12 Tren Penurunan Perang antara Great Powers 1946-2016**  
 Sumber: Max Roser, *ourworldindata.org*, 2016

Hal ini juga selaras dengan kategorisasi ancaman menurut Kementerian Pertahanan di mana ancaman agresi atau invasi yang bersifat linier dengan menggunakan persenjataan secara terbuka berpeluang kecil untuk terjadi (ancaman belum nyata). Di sisi lain, faktor globalisasi yang ditopang kemajuan teknologi telah menjadikan karakteristik perang beralih lebih asimetris. Perang semacam ini sudah memasuki generasi yang keempat (*fourth generation warfare-4GW*). Dalam 4GW, konsep yang digunakan untuk berperang bersifat transnasional (tidak mengenal batas wilayah), menggunakan sistem jaringan dan berbasis informasi dengan tujuan menghancurkan kemauan musuh untuk bertempur. Wajah peperangan dalam bentuk baru ini terlihat dalam perang di ruang siber dan terorisme yang tidak lagi hanya melibatkan peran-peran negara sebagai aktor utama tetapi juga aktor-aktor non-negara. Sehingga tidak terbantahkan lagi bahwa keterpaduan seluruh komponen bangsa (militer dan nirmiliter) dalam suatu sishanta menjadi keniscayaan bagi Indonesia dalam membangun pertahanan negara yang diarahkan untuk melindungi kepentingan nasional. Dalam

kaitannya dengan kepentingan nasional, bangsa Indonesia harus memiliki dan mengembangkan kesadaran mengenai posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan di antara perlintasan dan pertemuan kepentingan berbagai negara sehingga ancaman perang 4GW sangat rentan bagi pertahanan negara.

Dari analisis tersebut, maka terlepas dari ancaman pecahnya perang antara AS-Cina, negara-negara di kawasan harus lebih positif mengelola isu tersebut dengan upaya mitigasi. Alih-alih ikut serta mempertajam dilema keamanan, Indonesia melalui AOIP lebih menghendaki peningkatan efektivitas kerja sama dalam menghadapi ancaman nyata yang jelas-jelas menjadi ancaman bersama di kawasan, seperti kerjasama melawan terorisme, kerjasama di bidang pertahanan siber, kerjasama manajemen bencana alam, kerjasama memberantas kejahatan transnasional dan kerjasama di bidang keamanan maritim (kerjasama mengatasi ancaman non-tradisional). Lebih dari sekedar upaya CBMs yang efektif untuk memitigasi ketegangan antar negara, langkah-langkah kerjasama tersebut juga dapat diarahkan untuk lebih memperkuat kemampuan pertahanan negara baik, pertahanan militer maupun nirmiliter, dengan perspektif yang lebih *outward looking* sehingga Indonesia juga mampu berkontribusi pada perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan pada alenia ke 4 Pembukaan UUD '45.

Lahirnya AOIP telah melalui proses negosiasi yang cukup panjang. Sejak awal tahun 2018, Indonesia sebagai negara pemrakarsa telah berjuang menggulirkan konsep Indo-Pasifik yang menekankan prinsip keterbukaan, inklusivitas dan penghormatan terhadap hukum internasional (Wawancara Dirjen/Kepala BPPK Kemlu, Dr Siswo Pramono, 15 Agustus 2019). Negosiasi yang tidak singkat ini mencerminkan tantangan dalam menciptakan konsensus karena adanya berbagai pertimbangan terkait kebijakan dan kepentingan yang berbeda-beda di negara-negara anggota ASEAN.

Sebagai hasil dari proses negosiasi, dokumen AOIP memang merupakan dokumen politis. Artinya AOIP hanya menekankan aspek kebijakan sebagai panduan dan tidak memuat hal-hal yang bersifat teknis. Sebagai kebijakan di tingkat regional, AOIP disusun berdasarkan hasil konsensus yang tercapai dengan mempertimbangkan kepentingan bersama secara kolektif. Sedangkan pada tingkat nasional, pemerintah suatu negara dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat independen dan terfokus pada kepentingan nasionalnya sendiri. Dengan demikian AOIP bukanlah tujuan akhir. ASEAN harus konsisten mempromosikan AOIP sebagai mekanisme paling inklusif sehingga lebih efektif membangun rasa saling percaya antar negara. Tantangan berikutnya adalah mengimplementasikan panduan tersebut ke level teknis, khususnya dari perspektif kepentingan nasional. Dalam hal ini, Kemhan juga siap bersinergi dengan Kemlu untuk melakukan sosialisasi dan arahan implementasi AOIP dengan inter-kementerian terkait, sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan efektif dan bermanfaat bagi kepentingan nasional (Wawancara dengan Dirjen Strahan, Kemhan, Mayjen TNI Rizerius Eko Hadisancoko, 10 Agustus 2019).

Mengingat AOIP juga berangkat dari perspektif yang digagas Indonesia, maka Indonesia pun perlu menjadikan dokumen *outlook* tersebut sebagai dasar untuk menyusun strategi kerja sama yang diprioritaskan dalam mendukung pertahanan negara. Mengingat konsep Indo-Pasifik mencurahkan perhatian yang lebih luas pada dimensi maritim, maka korelasi strategi pertahanan juga perlu dititikberatkan pada strategi pertahanan maritim. Hal ini dapat ditinjau kembali secara teoritis dari perspektif strategi menurut Mahan dan Gray yang menekankan urgensi geostrategi pada pertimbangan kondisi dan wilayah geografis suatu negara. Artinya, kebijakan pertahanan yang perlu dibangun untuk negara kepulauan yang disatukan oleh lautan seperti Indonesia sudah semestinya berorientasi pada kemampuan untuk mengendalikan laut (*sea control*) serta mencegah pihak

lain untuk menggunakan sehingga laut dengan segala aspeknya mampu menjadi kekuatan politik dan ekonomi bagi Indonesia.

Mengacu pada penelitian terdahulu, yaitu kajian tentang Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik Abad ke-21 (Montratama, 2016:3), laut memiliki nilai strategis untuk memproyeksikan kekuatan militer secara masif, selain media utama bagi perdagangan lintas negara. Untuk itulah laut semakin vital secara dimensi geografis, khususnya dari sudut pandang keamanan dan kesejahteraan. Relevansi ini pun menuai ide besar untuk membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sejalan dengan perubahan lingkungan strategis yang bertendensi ke domain maritim. Penelitian relevan lainnya yang ditulis Nainggolan (2015:6) juga menyimpulkan bahwa penetapan PMD harus dapat menjadikannya sebagai sumber kekuatan negara di abad 21. Hal ini seiring dengan pergeseran tatanan dunia ke arah multipolar dengan menguatnya peran aktor negara dan tersingkirnya konsep *balance of power*.

Apabila Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berkomitmen kuat dan konsisten dengan visi Poros Maritim Dunia (PMD), maka strategi maritim adalah keniscayaan dalam membangun pertahanan negara, khususnya kekuatan pertahanan maritim yang menjadi salah satu pilar PMD. Pertahanan maritim tentu juga akan mencakup aspek militer dan nirmiliter mengingat strategi pertahanan negara menurut Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) didesain untuk dapat menangkal ancaman yang bersifat militer maupun non militer. Oleh karena itu strategi kerja sama dalam kerangka AOIP juga perlu diarahkan pada penguatan pertahanan militer dan nirmiliter yang didominasi dimensi kemaritiman sesuai dengan area kerja sama AOIP.

Strategi kerja sama untuk memperkuat pertahanan militer dalam dimensi kemaritiman perlu mengedepankan kerja sama yang akan semakin mendorong kemajuan sumber daya pertahanan militer, baik itu sumber daya

militer yang bersifat material (sarana-prasarana dan teknologi) maupun non material (sumber daya manusia pertahanan). Sementara itu strategi kerja sama yang diarahkan untuk penguatan strategi pertahanan nirmiliter untuk mengatasi ancaman nyata yang bersifat non-militer. Keterpaduan strategi pertahanan militer dan nirmiliter yang turut didukung dari efektivitas kerja sama Indo-Pasifik harus diimplementasikan secara konsisten dan simultan demi terciptanya pertahanan yang bersifat semesta dan paripurna. Strategi yang dapat mendukung Indonesia untuk memperkuat pertahanan militer dan nirmiliter dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **4.2.2.1 Pertahanan Militer**

##### **a. Penguatan Postur Pertahanan untuk Mengatasi Ancaman Nyata**

Dengan mendasarkan kembali pada kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan dengan wilayah perairan yang sangat luas dan strategis, Indonesia harus berupaya menjamin stabilitas perdamaian dan keamanan di wilayah perairan yurisdiksinya terhadap kemungkinan timbulnya konflik dan ancaman. Untuk dapat mewujudkan stabilitas keamanan di laut dalam rangka menjamin integritas wilayah maupun kepentingan nasional, Indonesia perlu memperkuat pertahanan negara yang bersifat lebih terpadu, tidak hanya mengandalkan pada matra laut saja. Untuk itu strategi pertahanan Indonesia perlu menekankan integrasi karakteristik kekuatan masing-masing kekuatan pertahanan, baik darat, laut dan udara, tanpa adanya dominasi matra. Dalam kaitan ini, perumusan strategi pertahanan menciptakan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan sebagai satu kesatuan postur pertahanan demi menegakkan kedaulatan dan menjaga keamanan di wilayah perairan yang menjadi halaman terdepan NKRI.

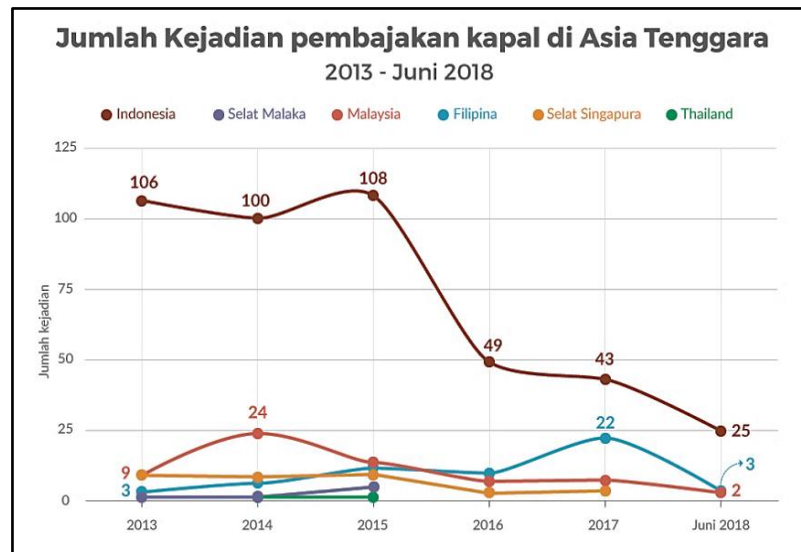
Postur pertahanan yang lebih terpadu akan semakin menemukan relevansinya apabila dikaitkan dengan tren ancaman asimetris. Konsep

*joint pattern* dalam implementasi postur pertahanan perlu diurusutamakan mengingat Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dalam skala yang lebih luas yang berprinsip *outward looking* dan berpedoman pada kebijakan luar negeri bebas aktif, langkah menuju keterpaduan matra dapat semakin diasah melalui kerja sama Indo-Pasifik, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu keamanan maritim dan isu keamanan non-tradisional lainnya.

Indonesia akan menemui kesulitan apabila menghadapi ancaman non-tradisional dengan langkah unilateral atau secara sendiri, mengingat sifat ancaman yang semakin menembus lintas batas negara dan semakin kuatnya interdependensi dalam hubungan antar negara. Berdasarkan teori kerja sama internasional, adanya kepentingan bersama di antara negara-negara akan mengerucut pada terbentuknya kehendak yang didukung kondisi saling membutuhkan dengan tujuan yang sama. Jika negara-negara tersebut mencapai titik temu untuk menyatukan aspirasi masing-masing maka mereka akan menyepakati suatu bentuk kerja sama yang biasanya ditetapkan dalam suatu perjanjian kerja sama. Contohnya adalah kerja sama trilateral yang disepakati Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk menjaga dan mengawasi Laut Sulu dalam bentuk *coordinated* patrol dan latihan bersama.

Gambar 4.13 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan angka kejadian pembajakan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dengan demikian secara tidak langsung hal ini membuktikan bahwa kerja sama di bidang militer memiliki dampak positif terhadap upaya untuk mengatasi ancaman non-tradisional seperti pembajakan/ *maritime terrorism* yang terjadi di kawasan. Selain bermanfaat untuk menekan ruang gerak kejahatan di laut, kerja sama ini juga akan semakin mengasah kapabilitas

militer Indonesia. Untuk itu kerja sama semacam ini perlu diprioritaskan dalam kerja sama Indo-Pasifik.



**Gambar 4.13 : Jumlah kejadian pembajakan di Asia Tenggara tahun 2013-2018**

Sumber: International Bureau Maritime

Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang relevan yang menyebutkan bahwa fenomena Indo-Pasifik yang menitikberatkan dimensi maritim tentu juga memiliki korelasi dengan pembahasan keamanan maritim (Iriawan, 2018:15). Begitu pula dalam kajian *Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges and Prospects* (Perwita&Tertia, 2018:17) yang menyebutkan bahwa Indo-Pasifik telah menjadi sentra aktivitas ekonomi global, geopolitik dan dinamika keamanan, sehingga negara-negara di kawasan tersebut perlu melakukan kerja sama keamanan maritim secara komprehensif. Kerja sama regional di bidang keamanan maritim diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi perdagangan di wilayah laut dan menjaga stabilitas jalur perdagangan. Ini artinya kerja sama keamanan maritim yang tercantum dalam salah satu butir area kerja sama AOIP perlu menjadi

prioritas yang perlu ditindaklanjuti dalam kerja sama untuk memperkuat kapabilitas pertahanan militer Indonesia dalam menghadapi ancaman non tradisional, khususnya dalam isu keamanan maritim, termasuk diantaranya yang berkaitan dengan pencurian ikan, perompakan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan aktivitas ilegal lainnya yang dilakukan di wilayah perairan Indo-Pasifik.

#### **b. Penguatan Diplomasi Pertahanan**

Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015) menyatakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi asas demokrasi yang mengutamakan kesetaraan dan kebersamaan, termasuk dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Hal ini dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah melalui kesepakatan bersama, sebagai bagian dari diplomasi pertahanan, dengan berpedoman pada upaya untuk memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan dalam rangka meredam konflik.

Untuk itu kerja sama internasional Indonesia dikembangkan sebagai salah satu instrumen diplomasi pertahanan dalam mewujudkan kepentingan nasional di bidang pertahanan. Langkah kerja sama tersebut harus memastikan efektivitas yang dicapai untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan. Karena itulah kerja sama internasional di bidang pertahanan harus dapat diarahkan untuk menjembatani terwujudnya stabilitas keamanan kawasan sebagai kepentingan bersama yang menguntungkan satu sama lain.

Diplomasi Pertahanan sendiri bukanlah sebuah hal yang baru. Diplomasi pertahanan di pandang sebagai sebuah fusi strategi yang saling menguntungkan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana dinyatakan oleh John. F. Kennedy bahwa “ *diplomacy and defense are not substitute for one another. Either alone would fail*”. Maka

diplomasi dan pertahanan merupakan satu kesatuan utuh yang saling membutuhkan, bukan saling menggantikan satu sama lain.

Menurut Cottey dan Foster (2004:7), diplomasi pertahanan ditujukan untuk tiga hal, yaitu meningkatkan rasa saling percaya (CBM), meningkatkan kapabilitas pertahanan dan pembangunan industri pertahanan. Banyak cendikiawan yang telah membuat daftar kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh sebuah negara dalam upayanya menjalankan diplomasi pertahanan negara tersebut. Hal tersebut dijabarkan oleh Andrew Cottey dan Anthony Foster (2004) dalam tabel 4.10. Bagi Indonesia, diplomasi pertahanan secara esensial dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme TNI melalui kerja sama seperti dialog strategis, pertukaran perwira siswa, dan latihan bersama (Sukadis, 2016).

**Tabel 4.4 Aktivitas Diplomasi Pertahanan**

✚	Bilateral and multilateral contacts between civilian defence officials and senior military officers
✚	Appointment of defence attachés to foreign countries
✚	Bilateral defence cooperation agreements
✚	Training of foreign civilian and military personnel
✚	Provision of advice and expertise on democratic civilian control over the armed forces, defence management and military technical areas
✚	Contacts and exchanges between military personnel and units, port calls
✚	Placement of liaisons officers in defence and military establishment of partner countries
✚	Deployment of training teams
✚	Provision of military equipment and other material assistance
✚	Bilateral or multilateral military exercise or training

Source: Andrew Cottey and Anthony Foster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, Adelphi Paper No. 365 (London: IISS, 2004), p. 7.

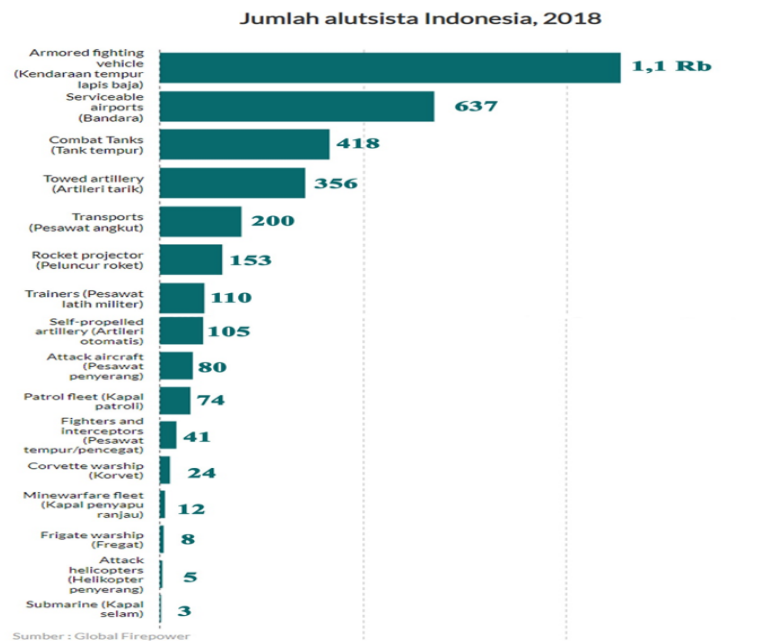
Secara operasional, kegiatan di atas meliputi langkah-langkah membangun kepercayaan dan keamanan, bantuan terhadap negara-negara (materil maupun non-materil), dan pengontrolan senjata (*arms*

*control*). Sebagai bagian dari sebuah strategi besar, diplomasi Indonesia selayaknya memberikan penekanan kepada beberapa hal yang krusial untuk di prioritaskan oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang hendak dijadikan pasar potensial di kawasan Indo-Pasifik. Letak geografis, populasi Indonesia dan juga posisi Indonesia sebagai natural leader ASEAN selayaknya mampu menjadi sebuah *bargaining position* bagi Indonesia di meja perundingan baik itu bilateral antar negara, regional kawasan ASEAN maupun multiregional di Indo-Pasifik. Untuk memastikan AOIP dapat mendukung pertahanan negara, maka bentuk-bentuk kerja sama diplomasi pertahanan Indonesia perlu yang diarahkan bagi akselerasi kemandirian industri pertahanan nasional serta dukungan bagi *capacity building* SDM militer Indonesia.

### **1) Dukungan bagi Kemandirian Industri Pertahanan**

Dukungan bagi kemandirian Industri Pertahanan melalui diplomasi pertahanan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Karena sebuah negara membutuhkan keamanan dan pertahanan, oleh karena itu, sebuah negara harus memiliki angkatan bersenjata. Negara harus selalu siap dan mandiri, berdiri diatas kemampuannya sendiri atas teknologinya sendiri, disamping melakukan kerjasama dengan negara-negara lain (Roosyana, 2019).

Tabel di bawah ini menunjukkan kepemilikan alutsista Indonesia. Menurut informasi yang dirilis oleh *Beritagar.id*, kekuatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia termasuk cukup baik. Berdasarkan data yang diolah Lokadata *Beritagar.id*, Indonesia berada pada peringkat 15 dari 136 negara di dunia per 2018. Skor Indeks Kekuatan Militer per 2018 adalah 0,3266 atau meningkat dari tahun sebelumnya 0,335 (skor 0,000 sangat kuat).



**Gambar 4.14 Alutsista Indonesia 2018**

Sumber: beritagar.id

Kendaraan tempur lapis baja (*armored fighting vehicle*) termasuk alutsista yang paling banyak dipunya Indonesia, ada 1.131 buah. Kemudian, disusul bandara yang beroperasi (673 buah), tank tempur (418 buah), dan artileri tarik (356 buah). Keadaan ini mungkin cukup menggembarakan, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa keadaan ini sesungguhnya bisa dikatakan masih cukup jauh dari *Minimum Essential Forces* yang ditetapkan oleh Indonesia. Karena itu diplomasi pertahanan tetap diperlukan dalam upaya mengembangkan industri pertahanan negara.

Saat ini upaya pengembangan industri pertahanan negara melalui corong diplomasi pertahanan sesungguhnya sudah membuahkan hasil yang cukup baik, meski tetap harus lebih di gencarkan lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu bahwa rekapitulasi penjualan produk industri pertahanan atau ekspor ke sejumlah negara mencapai 284,1 juta dolar

AS, atau Rp 4,5 triliun, selama tahun 2015 hingga 2018. Angka penjualan sebesar 161 juta dolar dilakukan PT. Dirgantara Indonesia. Adapun rincian produknya meliputi CN-235 sebanyak dua unit ke Senegal, tiga unit NC-212 ke Vietnam, dan dua unit NC-212 ke Thailand. Kemudian, melalui PT. PAL sebesar 86,9 juta dolar ke Filipina dengan produk berupa dua unit kapal *Strategic Sealift Vessel* (SSV). Selain itu, ekspor PT. Pindad dengan produk panser Anoa, kendaraan tempur, senjata dan amunisi untuk memenuhi kebutuhan sejumlah negara di Asia Tenggara, Afrika, Uni Emirat Arab, Korea Selatan, Nigeria, serta Timor Leste. Selain itu, PT. Lundin juga melakukan ekspor ke Rusia dan Swedia dengan produk berupa kapal *Sea Rider* senilai 3,6 juta dolar (Roosyana, 2019).

Selain itu dukungan kemandirian industri pertahanan melalui diplomasi pertahanan lainnya dapat dilihat dari kerjasama Indonesia dengan Korea Selatan dalam program pengembangan pesawat tempur KFX/IFX. Pesawat tempur ini didesain dengan karakteristik pesawat tempur generasi 4,5. Kemampuan pesawat tempur generasi 4,5 dibandingkan dengan generasi sebelumnya adalah kemampuan fleksibilitas terhadap segala misi yang ditunjang dengan berbagai kelebihan seperti sulit dideteksi oleh radar, kemampuan *supercruise* (terbang dengan kecepatan supersonik) (PT. DI, 2018). Kemampuan manuver di semua kecepatan dan kemampuan tempur visual yang baik.

Program KFX/IFX menghasilkan dua persetujuan utama dalam pelaksanaannya. Persetujuan tersebut yakni *Cost Sharing* dan *Work Sharing*. Pihak yang terlibat antara kedua negara dalam *cost sharing* adalah Kemhan dan *Korean Aerospace Industry(KAI)*. Terdapat perbedaan level interaksi, dikarenakan Kemhan sebagai pihak pemerintah Indonesia harus berinteraksi dengan pihak swasta.

Sehingga JPMO berperan dalam melaksanakan operasionalisasi kerja sama antar kedua pihak tersebut. Kemudian untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan teknis, KAI dan PT. DI berinteraksi untuk menjalankan kesepakatan *work sharing*. Jika berjalan lancar, kerja sama program KFX/IFX dicanangkan untuk selesai pada tahun 2026 dengan ditandai adanya produksi *prototype* IFX oleh PT. DI selaku *Industry Participant* dari Indonesia. Secara spesifik, dalam target 16 tahun durasi kerja sama, pengembangan program KFX/IFX terbagi menjadi 4 fase yakni TDP yang direncanakan selesai 4 tahun dimulai pada tahun 2010 hingga 2014, kemudian dilanjutkan oleh fase EMDP selama kurang lebih 12 tahun diikuti fase produksi pada tahun 2016 dan fase terakhir yakni MP atau produksi massal terhadap jet tempur KFX/IFX (Sumarlan, 2019).

Secara keseluruhan proses diplomasi Indonesia dapat dikategorikan ke dalam dua fase. Fase pertama yakni fase inisiasi kerja sama sampai disepakati untuk porsi CSA dan WAA sebesar 80:20, serta lisensi penggunaan data-data intelektual. Setelah adanya kendala anggaran dan evaluasi program KFX/IFX oleh pemangku kebijakan pada tahun 2017, fase kedua diplomasi pertahanan dimulai dengan tujuan kembali melancarkan kerja sama program KFX/IFX dengan catatan ada renegotiasi beberapa aspek kerja sama.

Peran diplomasi pertahanan dalam kerja sama program KFX/IFX secara garis besar terbagi menjadi dua jenis peran, yakni peran tertutup (*Covert Role*) dan peran terbuka (*Overt Role*). Sedangkan subjek yang menjadi aktor dalam menjalankan diplomasi pertahanan Indonesia dalam program ini adalah Tim Renegosiasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

## 2) Dukungan bagi *Capacity Building*

Dukungan *capacity building* melalui diplomasi pertahanan menysasar kepada upaya Indonesia melakukan negosiasi kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain yang tujuan akhirnya adalah meningkatnya kemampuan SDM Militer Indonesia. secara garis besar sesungguhnya berbagai kegiatan diplomasi pertahanan berada pada kerangka yang sangat memungkinkan dalam upaya pengembangan *capacity building* SDM Militer Indonesia. Keikutsertaan SDM militer Indonesia dalam berbagai perundingan di bawah ADMM, ARF dan berbagai perundingan pertahanan lainnya secara tidak langsung telah melatih kemampuan dan kecakapan pengetahuan serta pengalaman mereka dalam negosiasi terkait pertahanan. Hal inilah yang kemudian bisa di jadikan dasar bekal dalam melakukan perundingan-perundingan lainnya.

Selain itu *capacity building* juga bisa diarahkan kepada berbagai program kerja sama pertahanan bersama yang bertujuan untuk membangun kemampuan SDM militer beberapa negara sekaligus, yakni melalui program kerjasama yang disebut sebagai *joint training* ataupun *coordinated joint patrol*. Kisah sukses peningkatan *capacity building* terlihat tidak hanya dari adanya interoperabilitas teknologi pertahanan antar dua negara, namun juga kemampuan kerjasama antar SDM Militer beberapa negara yang terlibat ini dan bukti kesuksesan berupa menurunnya ancaman bersama yang dijadikan target operasi. Contoh nyata adalah penanggulangan terorisme maritim /perompakan yang terjadi baik di Selat Malaka maupun di Laut Sulu. Menteri pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan dengan tegas bahwa dua proyek yang digagas dengan beberapa negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Malaysia untuk Selat Malaka,

serta Malaysia dan Filipina untuk Laut Sulu merupakan kesuksesan bentuk diplomasi pertahanan Indonesia.

Peningkatan *capacity building* terhadap SDM militer Indonesia yang merupakan bagian dari hasil upaya diplomasi pertahanan adalah adanya kerjasama pertahanan antara Indonesia dan beberapa negara lain yang memberikan beasiswa belajar kepada perwira TNI. Pemberian beasiswa, *short course*, dan berbagai pelatihan ini tentu dapat meningkatkan *skill* TNI sebagai SDM militer Indonesia. Beberapa negara secara konsisten dan berkelanjutan memberikan beasiswa bagi perwira TNI seperti Australia, India, Amerika Serikat, Korea Selatan, dll.

Uraian di atas mengidentifikasi area kerja sama di bidang pertahanan yang dapat semakin meningkatkan kapasitas kemampuan pertahanan militer melalui kerja sama dengan berbagai pendekatan *building block*. Sebagai bagian dari strategi kerja sama Indo-Pasifik, maka pemerintah melalui K/L terkait perlu mengagendakan program kerja sama tersebut di atas sebagai prioritas untuk mendukung pembangunan pertahanan negara.

#### **4.2.2.2 Pertahanan Nirmiliter**

##### **a. Penguatan Pertahanan Siber**

Ancaman siber menjadi salah satu ancaman laten yang perlu diwaspadai saat ini. Secara global, kejahatan siber menimbulkan kerugian sekitar 3 triliun dolar AS setahun (*Digital Microsoft Asia, 2015*). Risiko potensial untuk jatuhnya lebih banyak korban semakin bertambah seiring meningkatnya jumlah pengguna. Di Indo-Pasifik, misalnya, pertumbuhan pengguna internet mencapai 4,7 miliar pengguna internet pada tahun 2025, dengan hampir setengahnya mendapatkan akses antara tahun 2012 dan 2025 (*Model Microsoft Cyber 2025*).

Saat ini spektrum ancaman di ruang siber semakin beragam, meliputi kejahatan siber, spionase, *cyberterrorism*, *ransomware* dan masih banyak lagi sehingga seluruh negara harus mewaspadainya sebagai sebuah ancaman bagi keamanan. Resiko ini telah membuat ASEAN makin terdesak untuk menyediakan *platform* kerja sama dalam menciptakan ruang siber yang aman dan tangguh yang memungkinkan kemajuan ekonomi dan standar kehidupan yang lebih baik. Pada April 2017 *ASEAN Cyber Capacity Program* (ACCP) diluncurkan untuk menjawab tantangan kerja sama di bidang siber. Tujuan utamanya meliputi peningkatan kesadaran dan mendorong diskusi regional yang terkait norma siber, meningkatkan koordinasi regional mengenai peningkatan kemampuan dan respon insiden dengan mengembangkan matrik untuk menilai efektivitas di bidang-bidang ini, membangun kemampuan regional dalam pengembangan strategi dan legislasi siber, serta berkontribusi terhadap upaya global untuk mengembangkan serangkaian standar keamanan siber untuk *internet of things*.

Dalam kaitan ini, Indonesia juga perlu memasukkan kerja sama siber sebagai prioritas untuk memperkuat pertahanan siber melalui mekanisme yang sudah ada di dalam kerangka AOIP. Selain ACCP, Indonesia juga dapat terus mendorong kerja sama bilateral dengan negara-negara maju di kawasan Indo-Pasifik untuk kemajuan pertahanan siber dan intelijen sehingga semakin mendukung kemampuan pertahanan negara.

#### **b. Penguatan Diplomasi Ekonomi untuk Menjaga Ketahanan Ekonomi dari Ekses Ketidakpastian Ekonomi Global**

Aspek ekonomi memiliki peran vital dalam kerangka pertahanan negara, mengingat ekonomi merupakan penggerak aspek-aspek lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan di bidang strategis lainnya, termasuk pertahanan negara.

Ekonomi akan berperan krusial bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang berimbang pada kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi menjadi sebuah wujud pertahanan nirmiliter di tengah situasi lingkungan strategis ekonomi global yang tidak menentu. Sebagaimana telah dibahas dalam sub bab sebelumnya, dunia tengah menghadapi ancaman resesi global sebagai dampak dari konfrontasi ekonomi kekuatan-kekuatan besar. Salah satu *flashpoint* yang nyata menghadirkan ancaman tersebut adalah Perang Dagang AS-Cina. Dengan kemampuan menerjemahkan berbagai peluang di tengah ancaman tersebut, Indonesia akan mampu mempersiapkan daya tangkal dalam menghadapi ancaman non-militer ini. Kekuatan nasional yang dapat digunakan untuk menyusun strategi pertahanan nirmiliter sebagaimana konsep DIME adalah diplomasi, termasuk diplomasi modern yang termanifestasi dalam diplomasi ekonomi dan diplomasi digital guna mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks kerja sama Indo-Pasifik maka Indonesia dapat mengarahkan diplomasi ekonomi dan diplomasi digital untuk menjadi media optimisasi kerja sama ekonomi antarnegara, bahkan menebarkan pesan perdamaian. Salah satu *benchmark* forum regional di bidang diplomasi digital untuk ekonomi dan perdamaian adalah *Regional Conference on Digital Diplomacy* yang digelar di Jakarta pada 10 September 2019. Forum tersebut digagas Indonesia dan dihadiri oleh 16 negara di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu Indonesia juga perlu memajukan proses negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang berpotensi mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri dan meningkatkan intensitas Indonesia sebagai bagian dari jaringan produksi global (*global supply chain*)

### **c. Penguatan Diplomasi untuk Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI**

Selanjutnya merujuk kembali pada Bhakti (2004:13), dalam menyusun strategi berdasarkan pengamatan lingkungan strategis, maka negara harus meningkatkan pula kemampuan diplomasinya sebagai bagian dari pertemuan antara politik luar negeri dan kebijakan pertahanan negara. Diplomasi akan menjadi langkah *soft power* untuk mendukung tercapainya kepentingan nasional, karena itulah diplomasi menjadi elemen penting dalam konsep DIME menurut Farlin (2014). Menurut Buku Putih Pertahanan (2015:75) Usaha-usaha diplomasi berintikan peran pertahanan nirmiliter yang dilakukan melalui pendekatan politik dan ekonomi. Keberhasilan usaha diplomasi sangat bergantung pada kualitas dan kemampuan komunikasi politik yang dijalankan oleh unsur-unsur pertahanan nirmiliter, dalam hal ini pengemban politik luar negeri. Selain itu peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan keutuhan NKRI, serta melakukan langkah-langkah pencegahan.

Ancaman disintegrasi masih menjadi isu krusial bagi keutuhan NKRI yang merupakan bagian dari aspek pertahanan negara. Isu pemisahan Papua dari NKRI masih terus menjadi sorotan hingga saat ini dan menjadi perhatian utama TNI/Polri. Dalam satu tahun terakhir, isu Papua kembali mencuat, khususnya dengan munculnya kasus penembakan terhadap 30-an pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua pada Desember 2018. Organisasi Papua Merdeka diduga kuat berada di balik peristiwa tersebut. Selanjutnya pada Agustus 2019 berawal dari unjuk rasa kelompok mahasiswa Papua di berbagai daerah yang mengaku mengalami tindakan diskriminatif dan rasisme berakhir menjadi kerusuhan di beberapa daerah di Papua, seperti Manokwari, Sentani, Jayapura, beberapa daerah di Jawa, yaitu Malang, Bandung dan

daerah lainnya. Aksi demonstrasi tersebut terindikasi dimanfaatkan oleh kelompok separatis Papua yang menuntut pemisahan diri dari NKRI.

Dalam konteks ini, langkah diplomasi Indonesia tidak pernah sekalipun memberikan kesempatan kepada pihak eksternal untuk menawarkan mediasi atau melakukan intervensi melalui internasionalisasi isu Papua. Permasalahan Papua menjadi semakin genting dengan munculnya indikasi baru mengenai kelompok yang terafiliasi dengan ISIS mencoba menyerukan jihad di Papua dan dikhawatirkan bergabung dengan kelompok separatis Papua. Ryamizard Ryacudu menyampaikan hal tersebut dalam sebuah rapat dengan Komisi I DPR pada 5 September 2019. Situasi ini tentu menambah kerumitan dimensi ancaman bagi pertahanan negara. Sejauh ini diplomasi Indonesia untuk menggalang dukungan bagi kedaulatan dan keutuhan NKRI telah berjalan dengan cukup baik. Yang terkini, Sekjen PBB Antonio Guterres telah menegaskan bahwa PBB mendukung kedaulatan dan integritas wilayah NKRI saat bertemu dengan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Dian Triansyah Djani, pada 10 September 2019 di New York, AS. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam *NY Agreement 1962*, *Act of Free Choice 1969* dan Resolusi GA PBB 2504 (XXIV) 1969 terkait status final Papua di dalam Indonesia berdasarkan *uti possideti iuris*. Namun demikian tantangan yang akan muncul akan tetap ada dan Indonesia tetap harus mengukuhkan diplomasi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Berbagai peluang untuk memperkuat diplomasi harus dimaksimalkan, termasuk pencalonan diri Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Dalam pemilihan yang akan dilaksanakan pada 16 Oktober 2019 di Markas PBB ini, Indonesia memperebutkan kursi untuk perwakilan di kawasan Asia Pasifik. Keberhasilan Indonesia dalam kontestasi keanggotaan Dewan HAM PBB tentu akan menambah

kredensial Indonesia dalam mempertahankan Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI, mengingat gejolak separatisme Papua senantiasa dikaitkan dengan isu pelanggaran HAM.

Untuk lebih menggalang dukungan internasional dalam isu Papua, Indonesia dapat pula memanfaatkan kerangka kerja sama Indo-Pasifik Indonesia perlu terus menggerakkan diplomasi dalam rangka melindungi integritas wilayah dan keutuhan NKRI. Selain mengintensifkan kerja sama saling dukung untuk pemilihan anggota Dewan HAM PBB, Indonesia juga perlu memberdayakan forum-forum kerja sama di Pasifik Selatan, seperti *Pacific Island Forum (PIF)*, mengingat pentingnya negara-negara di Pasifik Selatan dalam persoalan Papua. Seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia di forum tersebut untuk meredam upaya Presidium Dewan Papua (PDP) menginternasionalisasikan isu Papua, pada tahun 2000 di Kiribati (Elisabeth, 2005:49). Forum tersebut akhirnya menerbitkan *statement* positif yakni dukungan integritas teritorial Indonesia dan menetapkan PDP sebagai kelompok separatis. Rekam jejak keberhasilan diplomasi ini harus terus dilanjutkan, termasuk dengan menggunakan pendekatan *building block* sebagai penguatan arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang menjadi esensi kerja sama Indo-Pasifik.

Pada akhirnya keterpaduan strategi pertahanan militer dan nirmiliter dengan memanfaatkan kerja sama Indo-Pasifik ini akan makin mendukung suatu strategi pertahanan semesta yang membutuhkan komitmen dan kerja keras seluruh komponen bangsa. Pemetaan prioritas kerja sama dalam kerangka AOIP yang akan diproyeksikan untuk mendukung pertahanan negara, baik militer dan nirmiliter, memerlukan komitmen pemerintah untuk tetap melakukan kendali total dalam suatu sistem kebijakan nasional. Dalam hal ini faktor kepemimpinan akan memegang peran penting sebagaimana konsep perang semesta. Visi Poros Maritim Dunia sebagai kebijakan yang

telah dicanangkan pemerintah semestinya konsisten untuk dilaksanakan dan direalisasikan sesuai keyakinan para perintisnya, termasuk Presiden Joko Widodo, bahwa Indonesia perlu membangkitkan kejayaan maritim sebagaimana rekam jejak historis pada masa kerajaan-kerajaan besar Nusantara. Dari kajian teoritis mengenai proses strategi, analisis ilmiah sekalipun tetap harus dikombinasikan dengan perspektif historis sehingga strategi yang dibuat akan lebih komprehensif bagi dinamika perkembangan yang terjadi dan inovasi yang diperlukan (Yarger, 2006:44). Dari tinjauan ini dapat pula dipahami motif Cina untuk mengembalikan kejayaan Jalur Sutra pada masa dinasti lampau melalui BRI yang diterjemahkan dengan konteks kekinian.

Selain menjadi kesinambungan gagasan masa lalu, PMD juga menjadi upaya strategis untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kekuatan nasional. Dalam konteks PMD, kekuatan nasional yang dikerahkan dapat dirangkum menjadi sebuah *sea power*. Menurut Prof. Marsetio, *sea power* tidak selalu bermakna pada kekuatan armada kapal perang saja. *Sea power* juga mencakup potensi kekuatan nasional lainnya yang menggunakan laut sebagai wahananya, seperti penegak hukum di laut, armada kapal niaga, pelabuhan serta industri dan jasa maritim (Wawancara 7 Agustus 2019). Dengan demikian, *sea power* sejatinya juga mengandung aspek kesemestaan.

Apabila seluruh kekuatan nasional dapat dihimpun sedemikian rupa untuk mendukung terwujudnya PMD, maka pemerintah dapat mengartikulasikannya dalam elemen-elemen diplomatik, informasi, militer dan ekonomi sebagaimana konsep DIME. Diplomasi maritim yang menjadi salah pilar PMD akan menjadi elemen diplomatik yang mencerminkan upaya pemerintah untuk menawarkan bentuk-bentuk kerja sama berdasarkan keunggulan kekuatan nasional dari sisi sumber daya maritim, seperti kerja sama industri perikanan, kerja sama pertahanan maritim, dan lain

sebagainya. Elemen informasi akan direpresentasikan dari pembangunan *maritime domain awareness* yang memuat substansi kesadaran akan kewaspadaan lingkungan maritim. Melalui pertukaran informasi, jaringan dan kegiatan analisis antara stakeholder terkait, maka ancaman terhadap keamanan maritim dapat direspon secara cepat dan tepat. Elemen militer mencakup kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan pertahanan yang harus diselaraskan dengan kebutuhan PMD. Sedangkan kekuatan ekonomi ditunjukkan dari kemampuan Indonesia untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya dari pembangunan industri di sektor maritim.

Selanjutnya keberhasilan Indonesia merealisasikan PMD akan menjadi indikator penting bagi kelanjutan aspirasi Indonesia dalam kerja sama Indo-Pasifik yang berbasis AOIP. Keselarasan antara keduanya juga akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih disegani sehingga secara tidak langsung turut memberikan efek penggentar (*deterrence effect*) yang bermakna krusial bagi pertahanan negara.

## BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 5.1 Kesimpulan

Pergeseran pusat gravitasi ekonomi dan politik global ke wilayah Indo-Pasifik saat ini tidak hanya menawarkan berbagai peluang kerja sama yang dapat menjadi modalitas untuk mendukung pertahanan negara. Tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi Indonesia bersama negara-negara lainnya di kawasan, khususnya ASEAN, yang bahkan mengarah pada ancaman tradisional apabila tidak dapat dikelola dengan baik. Mengarahkan strategi Indo-Pasifik ke arah kerja sama untuk menghadapi ancaman tradisional atau dengan kata lain kerja sama yang justru diarahkan untuk terus memupuk *trust deficit* dan siap berperang, bukanlah pilihan strategis. Karena artinya kita menggiring ancaman yang selama ini terkategori sebagai ancaman belum nyata menjadi sebuah ancaman nyata.

Masa depan Indo-Pasifik akan bergantung pada upaya menjadikan kawasan ini sebagai arena kerja sama bagi kepentingan bersama (*common interest*) untuk menopang kesejahteraan kawasan dibandingkan menjadikan kawasan tersebut sebagai mandala perang yang destruktif bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk menunjang kelancaran pembangunan yang diarahkan pada pembangunan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan upaya dalam mengatasi ancaman-ancaman nyata dalam suatu upaya pertahanan negara. Berdasarkan telaah lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik, ancaman-ancaman nyata tersebut menyeruak di antara dua *flashpoint* yang menonjol saat ini, yaitu ketegangan di Laut Cina Selatan dan Perang Dagang AS-Cina. Ancaman-ancaman nyata yang berwujud perompakan, *illegal fishing*, penyelundupan narkoba, kejahatan siber, resesi yang mengakibatkan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi dan berujung pada gejolak dan instabilitas keamanan. Ancaman-ancaman nyata tersebut tentu

berimbang pada stabilitas keamanan yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah pembangunan di bidang lainnya.

*ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)* yang bercikal bakal dari perspektif Indonesia sudah semestinya dapat dioptimalkan untuk mencapai kepentingan nasional. Dengan mencermati ruang lingkup kerja sama yang dielaborasi dalam AOIP, Indonesia perlu memformulasikan suatu strategi kerja sama Indo-Pasifik dari perspektifnya sendiri dan menindaklanjutinya dalam kebijakan-kebijakan di tingkat teknis berupa prioritas implementasi kerja sama yang dapat menguntungkan bagi kepentingan nasional, termasuk diantaranya untuk mendukung pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional. Salah satu konsideran penting dalam pembangunan pertahanan adalah persepsi ancaman (*threat based*). Untuk itulah pemetaan ancaman berdasarkan analisis lingkungan strategis akan relevan dalam penentuan sebuah strategi pertahanan, termasuk dalam hal mengembangkan peluang yang juga dicermati dari situasi lingkungan strategis terkini.

Khusus di bidang pertahanan, Indonesia dapat menjadikan AOIP sebagai salah satu modalitas dalam mendukung pertahanan militer dan nirmiliter yang dipadukan menjadi bagian dari strategi pertahanan semesta dalam menghadapi ancaman-ancaman yang telah diidentifikasi berdasarkan dinamika lingkungan strategis, khususnya di kawasan Indo-Pasifik. Ancaman nyata yang perlu diantisipasi bersama dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik yang menonjol saat ini adalah isu-isu keamanan maritim dan perlambatan kinerja ekonomi global yang salah satunya diakibatkan oleh Perang Dagang yang juga diwarnai dengan isu keamanan siber. Kerja sama-kerja sama Indo-Pasifik yang akan dominan menggunakan mekanisme ASEAN dengan melibatkan mitra eksternal ASEAN perlu menjadi pertimbangan Indonesia dalam menyusun kebijakan kerja sama prioritas di bidang pertahanan negara.

Kerja sama Indo-Pasifik berbasis AOIP yang akan diprioritaskan untuk mendukung pertahanan negara harus diarahkan untuk langkah-langkah penguatan pertahanan militer dan nirmiliter. Kerja sama untuk penguatan pertahanan militer akan diarahkan pada dukungan untuk memperkuat postur pertahanan dari sisi kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, khususnya dengan menitikberatkan pada pertahanan maritim yang diarahkan untuk mendukung PMD. Dengan postur pertahanan yang semakin paripurna maka kekuatan TNI sebagai komponen utama sistem pertahanan negara akan lebih meningkat. Peningkatan postur ketiga elemen postur pertahanan akan berdampak pula pada efektivitas upaya-upaya menghadapi ancaman, baik ancaman nyata maupun ancaman belum nyata. Kerja sama dalam konteks diplomasi pertahanan juga menjadi strategi Indo-Pasifik yang dapat diarahkan untuk mendukung langkah Indonesia membangun kemandirian industri pertahanan serta pembangunan kapasitas bagi personil TNI.

Sedangkan strategi kerja sama Indo-Pasifik dari perspektif Indonesia berdasarkan AOIP perlu diarahkan pada prioritas penguatan pertahanan nirmiliter, yaitu dalam membangun pertahanan siber, penguatan diplomasi ekonomi dan mempertajam diplomasi untuk mendukung langkah penegakan kedaulatan dan keutuhan NKRI, khususnya yang berkaitan dengan isu Papua. Strategi kerja sama ini pada akhirnya memerlukan sinergi dan koordinasi dari K/L terkait dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri sebagai instansi penjurur (*focal points*).

## **5.2 Rekomendasi**

Penelitian ini pada akhirnya merekomendasikan beberapa langkah yang perlu ditindaklanjuti untuk lebih mematangkan strategi kerja sama Indo-Pasifik yang didasarkan pada AOIP, khususnya dalam mendukung

pertahanan negara yang bersifat semesta. Rekomendasi ditujukan pada *stakeholder* terkait, yaitu:

- a. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri. Kedua kementerian ini akan menjadi instansi kunci yang menjadi *focal points* dalam pelaksanaan pertahanan negara yang bersifat defensif aktif dan diarahkan lebih bersifat *outward looking* dengan menitikberatkan diplomasi sebagai lini terdepan pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri perlu duduk bersama memformulasikan prioritas kerja sama Indo-Pasifik yang diarahkan untuk penguatan pertahanan militer dan nirmiliter dalam sebuah rancangan strategi tersendiri sehingga nantinya akan dapat dilakukan pengukuran efektivitas (*evaluasi efektivitas*) secara periodik dan menjadi bagian dari *Strategic Defense Review (SDR)* yang sudah diterapkan. Apabila pemetaan kerja sama prioritas dengan mengutamakan kepentingan nasional tersebut sudah dirumuskan, maka Kementerian Luar Negeri perlu melanjutkan upaya diplomasi sebagai tindak lanjut AOIP, yaitu mengusulkan proyek konkret yang dapat dieksplorasi dan dilembagakan secara lebih komprehensif. Institusionalisasi kerja sama tersebut mencakup kerja sama dalam kerangka dalam *ASEAN-led mechanism* seperti ADMM Plus, ARF, *ASEAN Plus One* maupun mekanisme regional dan sub-regional terkait lainnya sesuai pendekatan *building block*, seperti IORA dan PIF.
- b. Pemangku kepentingan terkait program kemandirian industri pertahanan yang tercakup dalam *triple helix*, yaitu akademisi pendidikan tinggi, industri pertahanan dan pemerintah. Sinergi ketiga komponen tersebut juga diperlukan untuk melakukan *assesment* dan kajian lebih lanjut mengenai inovasi-inovasi yang dibutuhkan industri pertahanan menuju kemandirian yang nyata dengan memanfaatkan kerja sama Indo-Pasifik. Ini menjadi bagian dari langkah untuk

mengurangi *importation of weaponry* yang tidak memberikan *multiplier effect* secara ekonomi.

- c. Akademisi secara luas, khususnya yang menekuni isu-isu di bidang pertahanan dan hubungan internasional (HI) perlu melanjutkan pengkajian dan pengembangan strategi yang berkaitan dengan Indo-Pasifik sebagai sebuah geostrategi. Hal ini dikarenakan proses perumusan strategi juga harus selalu disesuaikan dan dimutakhirkan berdasarkan pengamatan atas perubahan lingkungan strategis yang akan terus bergerak dinamis dari waktu ke waktu, sehingga rekomendasi formulasi strategi dari kacamata akademis akan selalu diperlukan dan bermanfaat bagi pemangku kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Allison, Graham. (2017). *“Destined for War: Can America and China Escape Thucydides Trap?”*. Massachusetts: Houghton Mifflin Harcourt
- Barston, RP. 2014. *Modern Diplomacy*. New York : Routledge
- Bennis, Warren dan Nanus Burt. (1985). *The Strategies for Taking Charge*. New York: Harper & Row.
- Bhakti, Ikrar Nusa. (2004). “Geopolitik, Lingkungan Strategis Asia Pasifik, dan Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia di Masa Mendatang”, dalam Sri Yanuarti (ed.) *Kaji Ulang Pertahanan Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Bull, Hedley. (1977). *The Anarchical Society*. New York: Columbia University Press
- Bungin, M. Burhan. (2012). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. (edisi kedua). Jakarta: Kencana.
- Cresswell. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (ed. Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darlis, Andi Muh. 2019. *Terminologi Militer*. Yogyakarta: Matapadi Presindo.
- Drew, Dennis M and Donald M.Snow. 1988. *Making Strategy: an Introduction to National Security Processes and Problems*. Alabama: Air University Press Maxwell Air Force Base
- Adriana Elisabeth. 2005. *Dimensi Internasional Kasus Papua*. Jakarta: LIPI Press.
- Gray, Colin S. 1999. *The Grammar of Strategy I: Terrestrial Action*, dalam *Modern Strategy*. New York: Oxford.
- Gray, Colin S. dan Geoffrey Sloan 1999. *Geopolitics, Geography and Strategy*. London and Portland, Oregon: Frank Cass.
- Hart, B.H Liddell. 1991. *Strategy*. New York: Plume

- Jablonsky, D. 2004. 'National Power' in J.Boone Bartholomees, Jr. (ed.), *U.S. Army War College Guide to National Security Policy and Strategy* (Carlisle, PA: US Army War College)
- Jacques, Martin. 2009. *When China Rules the World: The Rise of Middle Kingdom and the End of the Western World*. London: Penguin Books
- Khanna, Parag. 2019. *The Future is Asian*. New York: Simon&Schuster Publishing
- Limbong. B. (2015). *Poros Maritim*. Jakarta : Margaretha Pustaka
- Locke, L.E. Spirduso, W.W. & Silverman, S.J. (2007). *Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals (5th ed.)* Thousand Oaks, CA: Sage.
- Mahan, A.T. 2011. *The Influence of Sea Power upon History:1660-1783*. Cambridge: Cambridge University Press
- Mahnken, Thomas G dan Joseph A. Maiolo. 2008. *Strategic Studies: a Reader*. London: Routledge
- Mauna, Boer, 2005. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT Alumni.
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J. (2009) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Morgenthau, Hans J. (1978). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. Alfred A. Knopf. New York
- Nasution, A.H --- *Pokok-pokok Gerilya" (Fundamentals of Guerrilla Warfare) - Dan Pertahanan Republik Indonesia Di Masa Yang Lalu Dan Masa Yang Akan Datang"*, Jenderal Besar DR AH Nasution- penyunting Kol Caj Dra Nasikhah MA Yogaswara, Cet. I - Yogyakarta, Penerbit: NARASI.
- Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

- Plano, Jack C dan Roy Olton. 1979. *The International Relations Dictionary*. Kalamazoo: New Issues Press, Western Michigan University
- Prabowo, J. Suryo.(2009). *Pokok Pokok Pemikiran Tentang Perang Semesta*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit. CV Alfabeta, Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D*, Bandung: Alfabeta
- Sun Tzu, (1963). *The Art of War*, trans. Samuel Griffith (New York: Oxford University Press
- Supriyanto, Makmur. (2017). *Tentang Perang Bagian I*. Jakarta: MCI
- Suropati, Untung; Montratama, Ian dan Sulaiman, Yohanes. (2018). *Indonesia Inc. : Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia*. Jakarta: Gramedia.
- Wahyono, S.K. 2007. *Indonesia Negara Maritim*. Jakarta: Teraju (Anggota IKAPI)
- Winarno. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta; Center of Academic Publishing Service (CAPS)
- Wirartha I. Made. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Andi Offset
- Worley, D.R. 2015. *Orchestrating the Instruments of Power: A Critical Examination of the U.S. National Security System*. USA: Potomac Books
- Yarger, Harry. R. (2006). *Strategic Theory for The 21st Century : The Little Book on Big Strategy*. Strategic Studies Institute Carlisle

## **ARTIKEL JURNAL DAN ARTIKEL DARING**

- Acharya, Amitav. 2019. *Why ASEAN's Indo-Pacific Outlook Matters* diakses

dari <https://www.aspistrategist.org.au/why-aseans-indo-pacific-outlook-matters/>

Andika, Dedi. 2019. *Aksi FONOps Amerika Serikat di LCS Telah Mengusik China* diakses dari <https://jakartagreater.com/aksi-fonops-amerika-serikat-di-lcs-telah-mengusik-china/>

Bhakti, Ikrar Nusa. 2004. *Geopolitik Lingkungan Strategis Asia Pasifik dan Arah Kebijakan Pertahanan Indonesia di Masa Mendatang*, dalam Sri Yanuarti, *Kaji Ulang Pertahanan Indonesia*, Jakarta : Pusat Penelitian Politik-LIPI

Booth, Ken. 1991 *Security and Emancipation*. Cambridge University Press. Review of International Studies. Vol. 17. No.4

*Council on Foreign Relations*. (2018). *U.S. Relations With China* [Online], 20 Oktober 2018 (diakses 10 Juni 2019)

Froman, Michael B. 2014. *The Strategic Logic of Trade: New Rules of the Road for the Global Market* diakses dari <https://www.foreignaffairs.com/articles/americas/strategic-logic-trade>

Garcia, Zhorea Shara. 2019. *Asia Reassurance Act ASEAN* diakses dari <https://www.aseanbriefing.com/news/2019/01/24/asia-reassurance-initiative-act-asean.html> (diakses pada 11 Juni 2019)

Godbole, A. (2017), *What is IndoPacific and what is it not?* Retrieved from Asia Times: <http://www.atimes.com/indopacificindiocean/>

Huang, David. (2015). "Building Security and Integration in The Asia Pacific" (online). dalam <http://www.eastasiaforum.org/2015/06/13/building-security-and-integration-in-the-asia-pacific/> (diakses 4 Mei 2019)

Indrajit, Richardus Eko. 2019. *Cyber Resilience*-strategi holistic mengatasi ancaman pertahanan kontemporer di dunia siber. BSSN. Diakses dari <https://govcsirt.bssn.go.id/download/fgd2019/Cyber-Resilience.pdf>

Irfani, Faisal. 2019. "Rivalitas Cina-AS dan Lonjakan Anggaran Militer Global" dari <https://tirto.id/rivalitas-cina-as-dan-lonjakan-anggaran-militer-global-dnAv>, diakses 8 Mei 2019

Ita, (2019). "WNI Sandera Abu Sayyaf Dibebaskan dalam Proses Semi Intelijen" diakses dari <https://news.detik.com/bbc-world/d-4390053/wni->

sandera-abu-sayyaf-dibebaskan-dalam-proses-semi-intelijen, 18 Mei 2019

John, R.M..(2006). 'All Elements of National Power': Re-Organizing the Interagency Structure and Process for Victory in the Long War,' Strategic Insights, 5:6

Khasru, Syed Munir. (2017). "The Geopolitical Landscape of Asia Pacific Is Changing Dramatically. Here's How" (online). dalam <https://www.weforum.org/agenda/2017/07/the-geopolitical-landscape-of-asia-pacific-is-changing-dramatically-here-s-how/> (diakses 6 Mei 2019)

Konstantin Khomko. (2019). *A Nation Needs More than a DIME*. Diakses dari <http://centralblue.williamsfoundation.org.au/a-nation-needs-more-than-a-dime-konstantin-khomko/>

Le Trinh, 2018. *How the US-China Trade War Could Impact the South China Sea*. <https://thediplomat.com/2018/11/how-the-us-china-trade-war-could-impact-the-south-china-sea/>

Montratama, Ian. (2016) "Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di tengah dinamika lingkungan Strategis Indo-Pasifik abad ke-21". *Intermestic: Journal of International Studies*, Vo. 1, No 1, November 2016.

Notohamijoyo, Andre. 2019. *Tantangan Kemaritiman Indonesia* diakses dari <https://analisis.kontan.co.id/news/tantangan-kemaritiman-indonesia?page=2>

Nurrohman, Gunawan, Sumarlan. 2019. Peran Diplomasi Pertahanan dalam Implementasi Kebijakan Kerjasama Program KFX/IFX Indonesia-Korea Selatan. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol 5. No 1. April 2019

Palit, A., & Sano, S. (2018). *The United States' Free and Open Indo-Pacific Strategy: Challenges for India and Japan*. Institute of South Asian Studies.

Pedrason, Rodon. (2019). *Intelijen dan Lingkungan Strategis*. (online) dalam <https://stin.ac.id/jurnal/download.php?file=20190228-INTELIJEN%20DAN%20LINGKUNGAN%20STRATEGIS.pdf> (diakses 23 Mei 2019)

- Priatna, PLE. (2019). "Diplomasi Indonesia Merangkul Indo-Pasifik" diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-4477622/diplomasi-indonesia-merangkul-indo-pasifik>, 10 Mei 2019
- Ras, Abdul Rivai. (2018). "Kerja Sama Indo-Pasifik harus Kompatibel dengan Poros Maritim Dunia" diakses dari <https://kumparan.com/abdul-rivai-ras/kerjasama-indo-pasifik-harus-kompatibel-dengan-poros-maritim-dunia-1538475910679321746>, 9 Mei 2019
- Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Indonesian Perspective
- Saha, Pramesha. 2019. ASEAN's *Indo-Pacific Outlook: an Analysis* diakses dari <https://www.orfonline.org/expert-speak/aseans-indo-pacific-outlook-an-analysis-52542/>
- Sambodo. Maxensius. 2019. Poros Maritim Dunia dan Pengaruhnya dalam Politik Luar Negeri Indonesia. *Focus Group Discussion (FGD)* <https://www.indovoices.com/internasional/indonesia-layak-jadi-negara-poros-maritim-dunia/>, diakses pada 3 Agustus 2019
- Saraswati, Ni Made Vira. (2018). "ASEAN dan Tatanan Maritim dalam Dinamika Geopolitik" <https://mediaindonesia.com/read/detail/150597-asean-dan-tatanan-maritim-dalam-dinamika-geopolitik-indo-pasifik>, diakses pada 27 April 2019
- Setiadji, Agus Laksda TNI. 2017. *Kekuatan Pertahanan Indonesia dalam Bingkai Negara Maritim*. <http://maritimnews.com/2017/05/kekuatan-pertahanan-indonesia-dalam-bingkai-negara-maritim/>, diakses pada 7 Agustus 2019
- Sony Iriawan (2018). "Diskursus Indo-Pasifik: Hegemoni Amerika, Persaingan Strategis, Hingga Transformasi Geopolitik Kawasan". Mandala: Jurnal Hubungan Internasional, Vol 1. No. 2 Juli-Desember 2018
- Tertia, Joseph dan Anak Agung Banyu Perwita. (2016). "Maritime Security in Indo-Pacific: Issues, Challenges and Prospects"
- Teodoro, Joycee A. 2016. *Distracted ASEAN: Where to for ASEAN Centrality?* , diakses dari <http://www.fsi.gov.ph/distracted-asean-where-to-for-asean-centrality/>
- Wadrianto, Glori K. 2016. Menlu RI: Sentralitas dan Kesatuan adalah Kunci bagi ASEAN. Internasional Kompas. Diakses dari

<https://internasional.kompas.com/read/2016/07/25/06570421/menlu.ri.seutralitas.dan.kesatuan.adalah.kunci.bagi.asean.>

Winarno, Tri. 2019. Perang Dagang Amerika-Cina Ronde Kedua, diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1236097/perang-dagang-amerika-cina-ronde-kedua/full&view=ok>

Wolfgang, Koerner. 2006 "Security Sector Reform: Defence Diplomacy" (Parliamentary Information and Research Service: Library of Parliament), Diakses dari <https://lop.parl.ca/Content/LOP/ResearchPublications/prb0612-e.pdf>

## **DOKUMEN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Doktrin Pertahanan Negara*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan

Permenhan No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemhan

Lampiran Keputusan Menhan No 1008 /M/V/2017 tentang Kebijakan Pertahanan Negara tahun 2018

## **SITUS WEB/INTERNET**

<https://www.asean2019.go.th/en/news/asean-senior-officials-meeting-som-retreat-on-asean-collective-concept-an-indo-pacific-outlook-8-march-2019-chiang-rai-thailand/>, diakses pada 2 Mei 2019

Council Foreign Relations. 2018. *US-China Trade Dispute* diakses dari <https://www.cfr.org/conference-calls/us-china-trade-dispute>

Kementerian Luar Negeri RI. (2018). *Perkenalkan Konsep Indo-Pasifik, Indonesia Set the Tone di East Asia Summit*. Diakses dari <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Perkenalkan-Konsep-Indo-Pasifik,-Indonesia-Set-the-Tone-di-East-Asia-Summit-.aspx> pada 1 November 2018

<http://apdf-magazine.com/id/trump-meningkatkan-komitmen-a-s-terhadap-indo-pasifik-dengan-undang-undang-baru/> (diakses pada 11 Juni 2019)

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190529175641-185-399561/huawei-lawan-balik-amerika-serikat> (diakses pada 11 Juni 2019)

<https://www.aljazeera.com/news/2019/01/southeast-asia-wary-china-belt-road-initiative-survey-190107030233089.html> (diakses pada 11 Juni 2019)

<https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2188667/six-key-takeaways-china-premier-li-keqiangs-annual-policy>

<http://ksp.go.id/presiden-jokowi-presentasikan-konsep-indo-pasifik-di-eas/>

<http://lipi.go.id/siaranpress/riset-untuk-optimalisasi-potensi-hayati-dan-ekonomi-laut-indonesia/21605>

## SUMBER LAINNYA

Bendini, Roberto. 2016. *United States - China Relations: A Complex Balance Between Cooperation and Confrontation*. Directorate General for External Policies Policy Department, European Union

Farlin, Commander Jeff. 2014. *Instruments of National Power: How America Earned Independence*. Carlisle Barracks, PA: US Army War College

Krenson, Lieutenant Colonel John G.. 2012. *On Strategy: Integration of DIME in the Twenty-first Century*. (Carlisle Barracks, PA: US Army War College, 2012)

Libor Frank, 2003, *The Czech Republic Security Environment* diakses dari [www.army.cz/mo/om/obrana\\_a\\_strategic/1-2003eng/frank.pdf](http://www.army.cz/mo/om/obrana_a_strategic/1-2003eng/frank.pdf)

- Kuliah Umum yang diberikan oleh Menteri Pertahanan RI 2015-2019, Ryamizard Ryacudu. “*Kalibrasi Ulang Konsep Strategi Pertahanan RI Menghadapi Disrupsi Dinamika Perkembangan Lingkungan Strategis*” yang disampaikan di Auditorium Universitas Pertahanan, Rabu 19 September 2018
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. *Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Y.M. Retno L. P. Marsudi 9 Januari 2018*”
- Lowy Institute 2019 Asia Power Index. Diakses dari <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/power-shifts-fevered-times-2019-asia-power-index> pada 15 Agustus 2019
- Michael W. Guillot. 2003. *Strategic Leadership: Defining the Challenge, Air and Space Journal, Maxwell AFB: Winter, Vol 17*
- Pompeo, M. (2018). *Remarks on "America's Indo-Pacific Economic Vision."* (<https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/07/284722.htm>)
- Press Release PCA. 2016 diakses dari <https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf>
- Roderick R. Magee II, ed., 1998. *Strategic Leadership Primer*, Carlisle Barracks, PA: U.S Army War College
- SIPRI Fact Sheet 2019. “Trend in World Military Expenditure 2018.” Diakses pada 18 Mei 2019 dari [https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs\\_1904\\_milex\\_2018.pdf](https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018.pdf)
- US Army War College, Department of National Security and Strategy, *Theory of War and Strategy Course Directive*. AY12 (Carlisle Barracks, PA: US Army Warcollege, 2012
- Wawancara Siswo Pramono, Kepala BPPK Kemlu RI dalam *talkshow "Indonesia Forward: Diplomasi Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik* di CNN Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/tMlxYu5QcJs>
- Weatherbee, Donald E. 2019. *Indonesia, ASEAN and the Indo-Pacific Cooperation Concept*. ISEAS Yusof Ishak Institut

## LAMPIRAN 1

### **Panduan Wawancara Akademisi/*Think tank***

#### **Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia**

Narasumber :

Tanggal/Waktu:

Tempat :

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan menyampaikan isu yang berkaitan dengan perkembangan terkini lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik dan keberhasilan diplomasi Indonesia untuk menggulirkan konsep Wawasan Indo-Pasifik (*Indo-Pacific Outlook*) di tingkat ASEAN, dilanjutkan dengan pertanyaan berikut

#### **Bagian I. Dinamika Lingkungan Strategis Indo-Pasifik dan Pengaruhnya bagi Pertahanan Negara**

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Bagaimana analisa lingkungan strategis terkini di kawasan Indo-Pasifik?	
2	Bagaimana pengaruh dinamika lingkungan strategis di Indo-Pasifik bagi pertahanan negara Indonesia?	
3	Seberapa penting Indonesia perlu	

	mengkalibrasi ulang sistem pertahanan negaranya terkait dengan ancaman yang muncul akibat perubahan lingkungan strategis di kawasan?	
4	Strategi apa yang ideal untuk diformulasikan Indonesia di bidang pertahanan dalam merespon dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik, khususnya jika dikaitkan dengan teori strategi pertahanan?	

**Bagian II. Tercapainya *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yang digagas Indonesia**

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Apa saja kerja sama kunci dalam dokumen <i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i> yang harus optimal ditindaklanjuti Indonesia dalam kaitannya untuk mendukung pertahanan negara?	
2	Bagaimana langkah mengoptimalkan komitmen kerja sama dalam kerangka Indo-Pasifik tersebut, khususnya di bidang pertahanan yang diarahkan untuk mendukung Poros Maritim Dunia?	
3	Bagaimana seharusnya Indonesia menjabarkan komitmen yang telah disepakati dalam <i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i> ke dalam sebuah kebijakan pertahanan yang	

	lebih komprehensif?	
4	Dalam kebijakan pertahanan yang telah disesuaikan dengan perkembangan Indo-Pasifik sebagaimana pertanyaan butir 3, bagaimana menjaga relevansi kesemestaan yang dimaknai sebagai keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pertahanan negara?	

## Panduan Wawancara Kemhan

### Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia

Narasumber :

Tanggal/Waktu:

Tempat :

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan menyampaikan isu yang berkaitan dengan perkembangan terkini lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik dan keberhasilan diplomasi Indonesia untuk menggulirkan konsep Wawasan Indo-Pasifik (*Indo-Pacific Outlook*) di tingkat ASEAN, dilanjutkan dengan pertanyaan berikut

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Bagaimana analisa lingkungan strategis terkini di kawasan Indo-Pasifik yang penting untuk dicermati dan signifikan pengaruhnya bagi pertahanan negara?	
2	Apakah strategi pertahanan Indonesia telah disesuaikan dengan analisis lingkungan strategis terkini yang berkaitan dengan pertarungan hegemoni kekuatan besar di Indo-Pasifik?	
3	Seberapa penting Kemhan menilai perlunya kalibrasi ulang strategi pertahanan Indonesia	

	yang berkaitan dengan dinamika di kawasan?	
4	Bagaimana Kemhan memetakan ancaman yang berkaitan dengan dinamika lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik?	
5	Bagaimana pendapat Kemhan tentang tercapainya kesepakatan di tingkat ASEAN untuk mengadopsi konsep <i>Indo-Pacific Outlook</i> yang merupakan gagasan Indonesia dan akan menjadi dasar komitmen ASEAN untuk terus meningkatkan kerja sama dalam rangka memitigasi ketegangan antara kekuatan negara-negara besar di kawasan?	
6	Bagaimana peranan Kemhan dalam perumusan strategi pertahanan negara menindaklanjuti perkembangan capaian Indonesia dalam menggulirkan <i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i>	
7	Dalam formulasi rekalisasi pertahanan negara yang berkaitan dengan dinamika lingkungan strategis, hal-hal signifikan apa saja yang dijadikan pertimbangan oleh Kemhan?	
8	Bagaimana menjaga relevansi kesemestaan yang dimaknai sebagai keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pertahanan negara yang telah diadaptasi dengan perubahan lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik?	
9	Bagaimana peranan Kemhan dalam	

	implementasi kebijakan pertahanan tersebut ke depan, khususnya dikaitkan dengan tujuan mewujudkan visi Poros Maritim Dunia	
--	--	--

**Panduan Wawancara Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN  
dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK)  
Kementerian Luar Negeri**

**Strategi Kerja Sama Indo-Pasifik untuk Mendukung Pertahanan Negara:  
Perspektif Indonesia**

Narasumber :

Tanggal/Waktu:

Tempat :

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika tidak berkeberatan, hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan menyampaikan isu yang berkaitan dengan perkembangan terkini lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik dan keberhasilan diplomasi Indonesia untuk menggulirkan konsep Wawasan Indo-Pasifik (*Indo-Pacific Outlook*) di tingkat ASEAN dilanjutkan dengan pertanyaan berikut

No	Pertanyaan Kunci	Jawaban
1	Bagaimana analisa lingkungan strategis terkini di kawasan Indo-Pasifik yang penting untuk dicermati dan signifikan pengaruhnya bagi stabilitas kawasan?	
2	Bagaimana akhirnya ASEAN dapat menerima konsep Indo-Pasifik yang digagas Indonesia sejak tahun 2018? Apa saja faktor	

	pendukung bagi tercapainya kesepakatan untuk mengadopsi konsep tersebut?	
3	Apa saja kerja sama kunci dalam dokumen <i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i> yang harus optimal ditindaklanjuti Indonesia dalam kaitannya untuk mendukung pertahanan negara?	
4	Bagaimana Kemlu akan menindaklanjuti komitmen ASEAN dalam kerangka <i>Indo-Pacific Outlook</i> ke beberapa <i>stakeholder</i> terkait, khususnya di bidang pertahanan?	
5	Bagaimana peranan Kemlu RI untuk terus mengawal dan mendukung implementasi <i>ASEAN Outlook on the Indo-Pacific</i> menjadi kerja sama yang efektif, khususnya yang mampu mendukung pertahanan negara dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia	

**“ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC”****I. BACKGROUND AND RATIONALE**

1. The Asia-Pacific and Indian Ocean regions are amongst the most dynamic in the world as well as centers of economic growth for decades. As a result, these regions continue to experience geopolitical and geostrategic shifts. These shifts present opportunities as well as challenges. On the one hand, the economic growth of the region opens up possibilities of cooperation to alleviate poverty and elevate living standards of millions of people. On the other hand, the rise of material powers, i.e. economic and military, requires avoiding the deepening of mistrust, miscalculation, and patterns of behavior based on a zero-sum game.
2. Southeast Asia lies in the center of these dynamic regions and is a very important conduit and portal to the same. Therefore, it is in the interest of ASEAN to lead the shaping of their economic and security architecture and ensure that such dynamics will continue to bring about peace, security, stability and prosperity for the peoples in the Southeast Asia as well as in the wider Asia-Pacific and Indian Ocean regions or the Indo-Pacific.
3. ASEAN, which for decades has been engaging in the development of an inclusive regional architecture, needs to consistently come up with its collective leadership in forging and shaping the vision for closer cooperation in the Indo-Pacific and to continue to maintain its central role in the evolving regional architecture in Southeast Asia and its surrounding regions. ASEAN also needs to continue being an honest broker within the strategic environment of competing interests.
4. Against this backdrop, ASEAN Leaders have agreed to further discuss an initiative that reinforces the ASEAN-centered regional architecture, namely, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. This Outlook is not aimed at creating new mechanisms or replacing existing ones; rather, it is an Outlook intended to enhance ASEAN’s Community building process and to strengthen and give new momentum for existing ASEAN-led mechanisms to better face challenges and seize opportunities arising from the current and future regional and global environments. Moreover, the Outlook is intended to be inclusive in terms of ideas and proposals.
5. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific envisages ASEAN Centrality as the underlying principle for promoting cooperation in the Indo-Pacific region, with ASEAN-led mechanisms, such as the East Asia Summit (EAS), as platforms for dialogue and implementation of the Indo-Pacific cooperation, while preserving their formats. Furthermore, ASEAN may also seek to develop, where appropriate, cooperation with other regional and sub-regional mechanisms in the Asia-Pacific and Indian Ocean regions on specific areas of common interests to complement the relevant initiatives.

## **II. ASEAN OUTLOOK ON THE INDO-PACIFIC**

6. Consistent with decades of ASEAN's role in developing and shaping regional architectures in Southeast Asia and beyond, and with ASEAN's norms and principles as contained in the ASEAN Charter and other relevant ASEAN documents, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific envisioned by ASEAN consists of the following key elements:
  - A perspective of viewing the Asia-Pacific and Indian Ocean regions, not as contiguous territorial spaces but as a closely integrated and interconnected region, with ASEAN playing a central and strategic role;
  - An Indo-Pacific region of dialogue and cooperation instead of rivalry;
  - An Indo-Pacific region of development and prosperity for all;
  - The importance of the maritime domain and perspective in the evolving regional architecture.

## **III. OBJECTIVES**

7. This ASEAN Outlook on the Indo-Pacific should support and provide ballast for the current dynamism in the Indo-Pacific region, which should be viewed from the perspective, of encouraging progress. As such, it should also provide added value to the existing regional arrangements. Therefore, the said ASEAN Outlook on the Indo-Pacific is aimed at: (1) offering an outlook to guide cooperation in the region; (2) helping to promote an enabling environment for peace, stability and prosperity in the region in addressing common challenges, upholding the rules-based regional architecture, and promoting closer economic cooperation, and thus strengthen confidence and trust; (3) enhancing ASEAN's Community building process and further strengthening the existing ASEAN-led mechanisms, such as the EAS; and (4) implementing existing and exploring other ASEAN priority areas of cooperation, including maritime cooperation, connectivity, the Sustainable Development Goals (SDGs), and economic and other possible areas of cooperation.
8. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific involves the further strengthening and optimization of ASEAN-led mechanisms, including the East Asia Summit (EAS), the ASEAN Regional Forum (ARF), the ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM-Plus), the Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF) and others such as the relevant ASEAN Plus One mechanisms.
9. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific is meant to contribute to the maintenance of peace, freedom, and prosperity.

## **IV. PRINCIPLES**

10. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific is based on the principles of strengthening ASEAN Centrality, openness, transparency, inclusivity, a rules-based framework, good governance, respect for sovereignty, non-intervention, complementarity with existing cooperation frameworks, equality, mutual respect, mutual trust, mutual benefit and respect for international law, such as UN Charter, the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, and

other relevant UN treaties and conventions, the ASEAN Charter and various ASEAN treaties and agreements and the EAS Principles for Mutually Beneficial Relations (2011).

11. Recognizing the continuing importance, relevance and positive contributions of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC) to sustaining peace and stability in the region for over 40 years, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific would be guided by the purposes and principles contained in the TAC, which, among others, encompass peaceful settlement of disputes, renunciation of the threat or use of force and promotion of rule of law, with a view to further promoting amity and cooperation among countries in the Indo-Pacific region.
12. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific will, at the same time, help to generate momentum for building strategic trust and win-win cooperation in the region, which would be further reinforced by ASEAN reaffirming those purposes and principles of the TAC and promoting their application in the conduct of relations between states in a wider Indo-Pacific region, including through an appropriate ASEAN document.

## V. AREAS OF COOPERATION

13. In order to realize the key elements of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, ASEAN will undertake cooperation in a broad range of areas, including:

### *Maritime Cooperation*

14. The existing and arising geopolitical challenges facing countries in the region also revolve around maritime issues such as unresolved maritime disputes that have the potential for open conflict. In addition, unsustainable exploitation of maritime resources and maritime pollution have also increasingly become major problems. There is a need to prevent, manage and eventually resolve these issues in a more focused, peaceful and comprehensive way.
15. Areas of maritime cooperation, in accordance with universally recognised principles of international law including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, may include the further enhancement of:
  - cooperation for peaceful settlement of disputes; promoting maritime safety and security, and freedom of navigation and overflight; addressing transnational crimes, including trafficking in persons or of illicit drugs, sea piracy, robbery and armed robbery against ships at sea; etc.
  - cooperation for sustainable management of marine resources; to continue to promote maritime connectivity; to protect livelihood of coastal communities and to support small-scale fishing communities; to develop blue economy and to promote maritime commerce, etc.
  - cooperation to address marine pollution, sea-level rise, marine debris, preservation and protection of the marine environment and biodiversity; promoting green shipping, etc.
  - technical cooperation in marine science collaboration; research and development; sharing of experience and best practices, capacity-building, managing marine hazards, marine debris, raising awareness on marine and ocean-related issues, etc.

### **Connectivity**

16. The second area of cooperation is connecting the connectivities. The existing and future connectivity initiatives in the Indo-Pacific region should complement and support the existing Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025. The ASEAN vision on Connectivity, that is to achieve a seamlessly and comprehensively connected and integrated region that will promote competitiveness, inclusiveness, and a greater sense of community, as well as the Declaration on the 6<sup>th</sup> East Asia Summit on ASEAN Connectivity should guide the ASEAN outlook on connectivity in Indo-Pacific region. The increasing integration and interconnection among Indian Ocean and Pacific Ocean countries require investments and efforts to build connectivity infrastructures, including physical, institutional and people-to-people linkages. Environmental and ecological impacts and considerations must be taken into account to ascertain the sustainability of such initiatives in the long term.
17. Connecting the connectivities may include:
- Exploring key priority area of cooperation to reinforce the existing MPAC 2025 and promote prosperity and development in the Indo-Pacific region;
  - Developing a regional public-private partnership (PPP) development agenda to mobilize resources for connectivity projects, including infrastructure projects in Indo-Pacific region;
  - Exploring potential synergies with sub-regional frameworks, such as, IORA, BIMSTEC, BIMP-EAGA, Mekong subregional cooperation frameworks, including ACMECS, etc.;
  - Working towards the establishment of a Seamless ASEAN Sky, with ASEAN airspace as a seamless block of airspaces with harmonised and interoperable procedures and operations, to increase air traffic management capacity and efficiency while enhancing safety;
  - People-to-people connectivity, through cooperation, collaboration and exchanges between the academe and business, etc.; and
  - Addressing challenges of rapid urbanization through the ASEAN Smart Cities Network (ASCN) initiative.

### **UN Sustainable Development Goals 2030**

18. The SDGs targets are in line with those of the ASEAN Community Vision 2025 as well as the wider EAS vision. This common objective of realizing SDGs under ASEAN Outlook on the Indo-Pacific will be a major contribution of the region to the global community.
19. Activities to attain the SDGs may include:
- Contributing to achieving the SDGs including through the utilization of digital economy;
  - Enhancing complementarities and aligning regional development agenda with the SDGs, such as the ASEAN Community Vision 2025 and the 2030 UN Agenda for Sustainable Development.; and

- Promoting cooperation with the ASEAN Center for Sustainable Development Studies and Dialogue and other relevant institutions in the region.

20. **Economic and Other Possible Areas of Cooperation:**

- South-South Cooperation (including South - South Triangular Cooperation /SSTC)
- Trade Facilitation and Logistics Infrastructure and Services
- Digital Economy and the facilitation of cross-border data flow
- Micro, Small and Medium Enterprises
- Science, Technology Research and Development, and Smart Infrastructure
- Climate Change and Disaster Risk Reduction and Management
- Active ageing and innovation
- Deepening economic integration, ensuring financial stability and resilience, as well as strengthening and promoting trade and investment by supporting the implementation of the ASEAN Economic Community Blueprint 2025 and other free trade agreements including the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
- Cooperation on preparing for the Fourth Industrial Revolution, including by facilitating the sharing of experiences and expertise on ways to benefit from, and address challenges of, the digital revolution.
- Development of private sector, including Micro, Small and Medium Enterprises, can also be further explored to enable their participation in the regional and global value chains.

## **VI. MECHANISM**

21. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific provides a guide for ASEAN's engagement in the Asia-Pacific and Indian Ocean regions.
22. The Outlook also recognizes the potential for cooperation with other regional mechanisms in the Asia-Pacific and Indian Ocean regions on issues of common interests through innovative, inter-disciplinary and complementary approaches based on the relevant ASEAN-led mechanisms, such as the EAS.
23. Strategic discussions on this matter and practical cooperative activities can be pursued at ASEAN-led mechanisms including, among others, the EAS, the ASEAN Plus One mechanisms, ARF, and ADMM-Plus.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

Nomor : BI 2302-MII/2019  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian.

Bogor, /6 Juli 2019

Kepada

Yth. Pejabat tersebut dalam  
lampiran

di

Tempat

1. Dasar:
  - a. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Universitas Pertahanan Sebagai Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
  - b. Kalender Pendidikan Program Studi Strategi Perang Semesta Unhan TA. 2018/2019.
2. Sehubungan dasar di atas, mohon dapatnya Bapak/Ibu pejabat berkenan mengizinkan Mahasiswa program studi Strategi Perang Semesta Cohort 10 Universitas Pertahanan TA. 2018/2019 atas nama Indri Yanuarti NIM 120180101006 untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan studi dokumen / laporan yang diperlukan dalam penyusunan tesis dengan judul "Strategi Kerjasama Indo-Pasifik Untuk Mendukung Pertahanan Negara: Perspektif Indonesia".
3. Mohon konfirmasi waktu dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut. *Contact Person* e-mail : [n.dryanuar@gmail.com](mailto:n.dryanuar@gmail.com) dan HP 08119196619
4. Demikian mohon menjadikan periksa.

a.n Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,

Dr. Hpdizah, S.Adm., M.Si  
Mayor Jenderal TNI

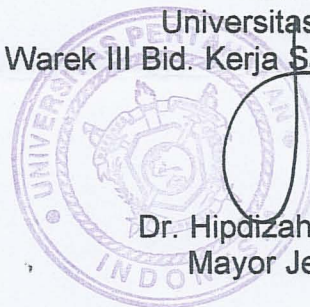
Tembusan:

1. Rektor Unhan
2. Kasatwas Unhan
3. Dekan FSP Unhan
4. Karo Aka dan Kemahasiswaan Unhan
5. Ses Prodi Strategi Perang Semesta FSP Unhan.

**DAFTAR NAMA PEJABAT:**

1. Dr. Siswo Pramono,  
Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Kementerian Luar Negeri RI;
2. Vedi Kurnia Buana,  
Plt. Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI;
3. Laksdya TNI Agus Setiadji, S.IP, M.A,  
Sekjen Kementerian Pertahanan RI,
4. Mayjen TNI Rizerius Eko HS, S.E, S.AP, M.Si,  
Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI;
5. Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T. M.Sc., D.E.S.D  
Danseskoal
6. Prof. Purnomo Yusgiantoro,  
Guru Besar UNHAN dan Mantan Menteri Pertahanan (periode 2009-2014)'
7. Laksamana TNI (Purn.) Prof . Dr. Marsetio,  
Guru Besar UNHAN dan Mantan KSAL (periode 2012-2014);
8. Connie Rahakundini Bakrie,  
Presiden *Indonesia Institute for Maritime Studies*;
9. Dr. Ian Montratama,  
*Geostrategy Analyst* dan Penulis Buku "Indonesia Inc.: Peta Jalan Menuju Poros Maritim Dunia".

a.n Rektor  
Universitas Pertahanan  
Warek III Bid. Kerja Sama dan Kelembagaan,



Dr. Hipdizah, S.Adm., M.Si  
Mayor Jenderal TNI

## LAMPIRAN 4

Dokumentasi Penelitian

### Foto 1

Wawancara dengan Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Mayjen Rizerius Eko Handisancoko, 10 Agustus 2019



### Foto 2

Wawancara dengan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemlu, Dr. Siswo Pramono, 15 Agustus 2019



Foto 3

Wawancara dengan Guru Besar UNHAN dan Menteri Pertahanan Periode 2009-2014, 5 Agustus 2019



Foto 4

Wawancara dengan Guru Besar UNHAN dan mantan KSAL (periode 2012-2014), Dr. Marsetio, 7 Agustus 2019



**Foto 5**

Wawancara dengan Danseskoal, Laksdya TNI Dr. Amarulla Octavian, 17 Juli 2019



**Foto 6**

Wawancara dengan Tenaga Profesional Bidang HI dan Strategi LEMHANAS, Laksda TNI (Purn) Robert Mangindaan, 12 Agustus 2019

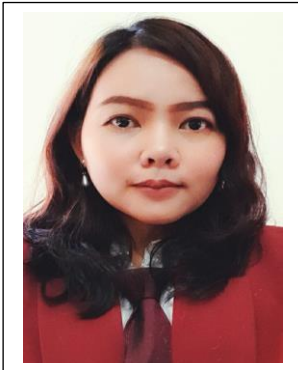


**Foto 7**

Wawancara dengan Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, 13 Agustus 2019



## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Indri Yanuarti, lahir di Semarang pada 7 Januari 1981, anak ke-5 dari pasangan Bapak Fadelan dan Ibu Sri Purwaningsih. Menyelesaikan pendidikan di SDN Kartini Semarang, lulus tahun 1993, SMP Negeri 3 Semarang lulus tahun 1996, SMA Negeri 3 Semarang lulus tahun 1999, Sarjana (S-1) Universitas Negeri Sebelas Maret Solo, Jurusan Komunikasi Massa lulus tahun 2003 dan pada tahun 2018 melanjutkan program Magister (S-2) di Universitas Pertahanan.

Peneliti saat ini merupakan Pejabat Fungsional Diplomat di Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri. Peneliti mengawali karier di Kementerian Luar Negeri pada Direktorat Informasi dan Media tahun 2010-2011); Pusat Pengembangan dan Pengkajian Kebijakan Kawasan (P3K2) Asia Pasifik dan Afrika (2010-2014), dan penugasan luar negeri sebagai Pejabat Fungsi Penerangan Sosial Budaya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia (2014-2017).

Peneliti pernah mewakili Indonesia pada *ASEAN Young Leaders Training Program* di Nanning, Cina, tahun 2011. Di bidang karya tulis, peneliti pernah berkontribusi sebagai salah satu investigator untuk penulisan Buku *ASEAN Connectivity in Indonesian Context: a Preliminary Study on Geopolitics of Hydropower and Maritime Transport* yang diterbitkan P3K2 Aspasaf, Kemlu RI, tahun 2011.

Menikah dengan Ricky Ardiansyah pada tahun 2011 dan dikaruniai 2 orang anak: Kanaya Alyshandrea dan Nayaka Arsyandendra